

Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional

by Nur Hayati

Submission date: 19-Feb-2025 12:33PM (UTC+0700)

Submission ID: 2412681312

File name: EKONOMI_KERAKYATAN_BAB_1_Nurhayati.docx (431.68K)

Word count: 3838

Character count: 26733

LENGKAPI DATA:

Kode Buku : B19
Judul Buku : Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional

Chapter ke-	: 1
Penulis	: Nurhayati
No WA	: 081285000508

Ketentuan Penulisan:

1. Jumlah halaman tulisan 10-20 halaman isi.
2. Jenis huruf, ukuran, spasi sesuaikan dengan contoh template ini saja.
3. Kutipan menggunakan *Bodynote*.
4. Daftar Referensi menggunakan *Style Harvard*.
5. Gambar dibuat penomoran gambar (di bawah Gambar)
6. Tabel dibuat penomoran tabel (di atas Tabel)

Catatan:

Tulisan yang ada pada template ini hanya contoh saja, silahkan sesuaikan dengan chapter / BAB masing-masing !

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Ekonomi Kerakyatan	5
1.2 Pemberdayaan Ekonomi Desa	10
1.3 Peran Ekonomi Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan	Error! Bookmark not defined.
1.4 Potensi dan Tantangan Ekonomi Desa	16
DAFTAR PUSTAKA	19
PROFIL PENULIS	21

BAB 1

Konsep Dasar Ekonomi Kerakyatan

Indonesia merupakan negara dengan populasi besar dan memiliki struktur ekonomi yang beragam. Salah satu aspek fundamental dalam perekonomian nasional adalah ekonomi berbasis rakyat atau ekonomi kerakyatan. Sistem ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Prinsip dari system ini adalah memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, ekonomi kerakyatan menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi kerakyatan berpijak pada prinsip bahwa rakyat harus memiliki kendali atas sumber daya ekonomi, baik dalam produksi maupun distribusi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Salah satu elemen penting dalam ekonomi kerakyatan adalah **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**. Keberadaan UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan ekonomi. Selain itu, koperasi sebagai wadah ekonomi berbasis kolektif juga menjadi instrumen utama dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama.

Keunggulan ekonomi kerakyatan terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap krisis. Berbeda dengan sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada investasi asing atau industri besar, ekonomi berbasis rakyat memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Ketika krisis ekonomi global melanda, UMKM dan

koperasi tetap mampu bertahan karena keterkaitannya yang erat dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Namun, tantangan dalam implementasi ekonomi kerakyatan masih cukup besar. Keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar menjadi kendala utama bagi UMKM dan koperasi untuk berkembang. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam kebijakan ekonomi yang sering lebih berpihak kepada sektor industri besar dibandingkan usaha rakyat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan melalui berbagai kebijakan strategis. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal untuk UMKM, serta pelatihan kewirausahaan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis rakyat. Selain itu, regulasi yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan besar harus terus diperkuat.

Tidak hanya dari sisi kebijakan, peran masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan juga sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis lokal, seperti membeli produk UMKM, mendukung koperasi, dan mengembangkan bisnis berbasis komunitas, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat. Kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi harus ditanamkan sebagai bagian dari upaya kolektif menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam tatanan mengembangkan pembangunan berkelanjutan, ekonomi kerakyatan juga memiliki potensi besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Sistem ekonomi ini mendorong penggunaan sumber daya lokal secara efisien, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendukung model bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Dengan demikian, ekonomi kerakyatan tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.



Gambar 1.1 Potret Kegiatan di Pasar

Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep ekonomi kerakyatan, peran UMKM dan koperasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat ekonomi berbasis rakyat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan ekonomi kerakyatan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan perekonomian nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

1.1 Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Tujuan ekonomi kerakyatan adalah mewujudkan kesejahteraan bersama secara adil dan berkelanjutan. Menurut Sri-Edi Swasono (1985), ekonomi kerakyatan berpijak pada demokrasi ekonomi yang menekankan asas kebersamaan, kemandirian, dan keadilan sosial. Sistem ini berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada segelintir pemilik modal dan pihak yang berkepentingan. Orientasi ini yang akan mendorong kesejahteraan yang lebih merata. Di Indonesia, ekonomi kerakyatan memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Konsep dasar ekonomi kerakyatan menekankan pada peran rakyat sebagai poros utama dalam kegiatan ekonomi. Rakyat merupakan produsen, konsumen, maupun pengelola seluruh sumber daya ekonomi di Indonesia. Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif dan memiliki daya tahan, terutama dalam menghadapi dinamika globalisasi dan krisis ekonomi. Sistem ini memungkinkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkembang sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Semua hal ini tidak terlepas dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (Melati et al., 2022).

Selain itu, ekonomi kerakyatan juga memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Sistem ekonomi ini mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab serta berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Styaningrum, 2021). Dengan pendekatan ini, ekonomi kerakyatan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga

memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi dalam jangka panjang. Regulasi yang mendukung ekonomi kerakyatan harus mampu menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah persaingan global. Oleh karena itu, sistem ekonomi ini tidak hanya relevan untuk kebutuhan nasional, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan globalisasi (Hapsari, 2019).

Ekonomi kerakyatan memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan berbagai system ekonomi lainnya. Berikut ini adalah perbedaan antara prinsip ekonomi kerakyatan dengan tiga (3) prinsip ekonomi lainnya.

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kapitalis

Ekonomi kapitalis berorientasi pada kebebasan pasar dan kepemilikan pribadi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bebas menjadi mekanisme utama distribusi sumber daya. Meliala (2022) dalam Buku *Melawan Dinamika Kapitalisme dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan* menyoroti bahwa kapitalisme cenderung menghasilkan kesenjangan ekonomi yang besar. Kekayaan terakumulasi pada segelintir individu atau korporasi yang memang memiliki daya saing yang kuat. Sebaliknya, ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kesejahteraan dengan mengutamakan partisipasi kolektif dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil serta menengah. Sistem ini berusaha menghindari eksploitasi ekonomi oleh kelompok modal besar dengan menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam pengelolaan ekonomi (Swasono, 1985).

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Sosialis

Ekonomi yang berprinsip sosialisme mengedepankan peran negara sebagai pengendali utama sumber daya ekonomi. Tujuan dari prinsip ini adalah menciptakan keadilan sosial melalui distribusi yang terpusat. Meskipun memiliki kesamaan dengan ekonomi kerakyatan dalam hal keadilan ekonomi, ekonomi sosialisme sering mengorbankan kebebasan individu dalam berusaha. Di sisi lain, ekonomi kerakyatan berbeda dengan sosialisme dalam kebebasan masing-masing individu. Ekonomi kerakyatan mengakui peran pasar dan inisiatif individu. Persaingan yang sehat dapat terus berjalan tanpa tekanan yang terlalu memaksa. Penetapan kebijakan pada ekonomi kerakyatan sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak (Melati et al., 2022).

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Campuran

Ekonomi campuran merupakan kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan. Meskipun ekonomi campuran dan ekonomi kerakyatan mengakui peran negara dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pada fokus utama dalam kedua sistem. Ekonomi campuran tetap membuka ruang bagi dominasi modal besar. Negara-negara yang menganut system ini memperbolehkan pihak di luar rakyat negara tersebut yang memiliki kemampuan dalam modal untuk mendominasi suatu sektor. Sedangkan ekonomi kerakyatan menitikberatkan pada pemberdayaan rakyat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Negara-negara yang menganut system ekonomi kerakyatan akan mengutamakan kepentingan rakyat untuk mendominasi maupun menerima keuntungan yang paling besar.

Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ekosistem yang mendukung usaha kecil dan menengah untuk bersaing secara berkelanjutan (Styaningrum, 2021).

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan berlandaskan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pilar dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun penerapan ekonomi kerakyatan pada berbagai wilayah dan negara memiliki keunikan dan gaya masing-masing, prinsip-prinsip yang dipegang teguh pada dasarnya adalah sama. Berikut ini adalah penjelasan terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut.

Keadilan Sosial dan Pemerataan Ekonomi

Ekonomi kerakyatan menekankan keadilan sosial sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Sri-Edi Swasono (1985) menegaskan bahwa sistem ini bertujuan untuk menghindari monopoli dan oligopoli yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Selain itu, system keadilan sosial ditegakkan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata pada masyarakat. Ekonomi kerakyatan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Masyarakat yang memiliki daya ekonomi yang lemah menjadi prioritas dalam prinsip ekonomi kerakyatan (Melati et al., 2022).

Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan Usaha

Prinsip kemandirian ekonomi dalam ekonomi kerakyatan menekankan bahwa rakyat harus memiliki kemampuan untuk mengelola ekonomi tanpa ketergantungan yang berlebihan pada

modal asing atau korporasi besar. Hukum ekonomi kerakyatan harus melindungi kedaulatan ekonomi nasional dari tekanan kapitalisme global yang sering kali merugikan usaha lokal (Meliala, 2022). Keberlanjutan usaha menjadi aspek penting agar ekonomi rakyat dapat bertahan dalam jangka Panjang. Untuk keberlanjutan usaha, diperlukan pemanfaatan berbagai sumber daya dengan bijak, inovatif, dan optimal.

Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Ekonomi

Ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi. Rakyat berperan sebagai produsen, konsumen, maupun pengelola sumber daya. Hapsari (2019) dalam artikelnya menyoroti bahwa sistem ini membutuhkan kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Dengan adanya partisipasi aktif, masyarakat dapat memiliki kontrol lebih besar terhadap perekonomian, sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam ekonomi kerakyatan, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan bagi sektor ini dari ancaman persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan ekonomi kerakyatan harus menciptakan regulasi yang mendukung penguatan modal, akses pasar, serta peningkatan kapasitas usaha kecil agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun global (Setyaningrum, 2021). Swasono (1985) menambahkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi, pelatihan, dan fasilitasi teknologi sangat diperlukan untuk memperkuat daya saing UMKM dalam menghadapi era digital dan globalisasi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dukungan pemerintah harus dititikberatkan pada pengembangan sumber daya

UMKM. Bantuan dalam bentuk pendanaan yang berlebih akan memberikan efek ketergantungan yang tidak sehat bagi para pelaku UMKM. Hal ini dapat mematikan daya kreativitas dan inovatif dari para pelaku usaha.

1.2 Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan memiliki karakteristik yang membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Ciri utama dari ekonomi kerakyatan adalah penekanan pada peran aktif rakyat dalam kegiatan ekonomi. Rakyat berperan aktif sebagai produsen, konsumen, maupun pengelola sumber daya ekonomi. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu atau korporasi besar. Hal yang menjadi tujuan utama dalam system ini adalah kesejahteraan bersama melalui mekanisme yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem yang berakar dari nilai-nilai gotong royong dan kemandirian. Hal ini yang melandasi pembangunan ekonomi agar dapat berjalan secara berkelanjutan dengan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu aspek fundamental dalam ekonomi kerakyatan adalah peran usaha kecil, koperasi, dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional (Swasono, 1985). Berikut ini akan dibahas mengenai peran usaha kecil, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.

Peran UMKM dalam Membangun Perekonomian Nasional

Keberadaan UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Di Indonesia, UMKM merupakan wadah penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pemerataan ekonomi bagi rakyat. Melati et al. (2022) pada *Buku Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia* menyoroti bahwa

UMKM telah menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menjadikan UMKM sebagai sektor strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi domestik karena sebagian besar produk dan jasa yang dihasilkan berasal dari sumber daya lokal. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia pada saat ini adalah keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar. Hal-hal tersebut masih menjadi kendala yang perlu diatasi melalui kebijakan yang berpihak kepada sektor ini.

Koperasi sebagai Bentuk Ekonomi Berbasis Kebersamaan

Selain UMKM, koperasi juga merupakan elemen penting dalam ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan wujud nyata dari demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kebersamaan (Swasono, 1985). Dalam mekanisme koperasi, seorang anggota tidak hanya bertindak sebagai bagian kecil dari koperasi. Setiap anggota juga merupakan pemilik dan pengguna manfaat, sehingga sistem koperasi memungkinkan distribusi keuntungan yang lebih adil dibandingkan dengan perusahaan konvensional. Koperasi dapat menjadi solusi untuk menghadapi dominasi modal besar karena prinsip operasionalnya lebih menitikberatkan pada kesejahteraan bersama dibandingkan eksploitasi keuntungan semata (Meliala, 2022).

Dukungan Regulasi dan Kebijakan bagi Usaha Kecil

Agar ekonomi kerakyatan dapat berkembang secara optimal, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada usaha kecil dan menengah. Styaningrum (2021) mengungkapkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan

lingkungan bisnis yang kondusif bagi UMKM dan koperasi. Langkah-langkah seperti pemberian insentif pajak, kemudahan akses kredit, serta penyediaan pelatihan dan teknologi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing usaha kecil. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM juga harus diwujudkan dalam kebijakan yang tidak hanya mempermudah perizinan usaha, tetapi juga melindungi para pengusaha UMKM dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan berpihak kepada ekonomi rakyat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Melati et al., 2022).

1.3 Tujuan dan Manfaat Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berbeda dengan sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan segelintir kelompok, ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi. Swasono (1985) menekankan bahwa ekonomi kerakyatan bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan sebuah strategi pembangunan. Tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Melalui prinsip gotong royong, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta peran aktif masyarakat, sistem ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Secara Merata

Salah satu tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Ekonomi yang berbasis pada

usaha kecil, koperasi, dan UMKM memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan ekonomi berbasis kapitalisme. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, sistem ini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat secara luas (Melati et al., 2022).

Agar ekonomi kerakyatan dapat berjalan dengan efektif, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Meliala (2022) menegaskan bahwa negara memiliki peran yang amat krusial dan strategis dalam melindungi pelaku usaha kecil. Cara yang digunakan dapat melalui menegakkan regulasi yang adil, memberikan akses permodalan yang mudah, serta pemberian insentif yang mendorong pertumbuhan UMKM secara optimal dan berkelanjutan. Tanpa peran aktif pemerintah, ekonomi kerakyatan akan sulit berkembang dan cenderung terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang didominasi oleh korporasi besar.

Ekonomi kerakyatan juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi dan modal asing. Ketergantungan ini sering berdampak pada eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja lokal. Hal ini tidak menguntungkan bagi rakyat yang biasanya mendapatkan insentif yang biasa saja, sedangkan korporasi asing memperoleh keuntungan yang melimpah. Kemandirian ekonomi harus menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada modal asing yang dapat melemahkan kedaulatan ekonomi negara (Swasono, 1985).

Untuk meningkatkan daya saing industri lokal menuju industri nasional maupun kancah internasional, ekonomi kerakyatan memiliki fokus dalam memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri. Melati et al. (2022) menjelaskan bahwa pemberian dukungan terhadap UMKM dan koperasi dapat membangun ekosistem ekonomi Indonesia yang mandiri dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global.

Penguatan industri lokal tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Salah satu manfaat utama ekonomi kerakyatan adalah menciptakan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber daya sering kali hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Pada prinsip sementara ekonomi kerakyatan berusaha mendistribusikannya secara lebih merata kepada masyarakat. Swasono (1985) menekankan bahwa prinsip demokrasi ekonomi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan kesempatan bagi rakyat kecil untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ekonomi kerakyatan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM). Akses terhadap modal usaha dan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial (Meliala, 2022). Dengan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, ekonomi kerakyatan mampu mengangkat kelompok masyarakat bawah ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Salah satu manfaat utama ekonomi kerakyatan adalah menciptakan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber daya sering kali hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Pada prinsip sementara ekonomi kerakyatan berusaha mendistribusikannya secara lebih merata kepada

masyarakat. Swasono (1985) menekankan bahwa prinsip demokrasi ekonomi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan kesempatan bagi rakyat kecil untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ekonomi kerakyatan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM). Akses terhadap modal usaha dan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial (Meliala, 2022). Dengan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, ekonomi kerakyatan mampu mengangkat kelompok masyarakat bawah ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Partisipasi Rakyat

Ekonomi kerakyatan membuka ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan usaha lokal. Usaha kecil yang berbasis komunitas sering kali lebih inovatif karena lebih memahami kebutuhan dan potensi lokal. Dengan dukungan yang tepat, inovasi dalam sektor UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (Melati et al., 2022).

Partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi kerakyatan bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pemilik usaha. Swasono (1985) menggarisbawahi bahwa ekonomi berbasis komunitas dapat memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat pemerataan kesejahteraan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, perencanaan dan pengelolaan ekonomi kerakyatan dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih kuat secara berkelanjutan.

Ekonomi kerakyatan bukan hanya sekadar model ekonomi alternatif, tetapi merupakan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis keadilan sosial. Melalui dukungan kebijakan yang tepat, ekonomi berbasis rakyat dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi nasional dan mendorong Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mandiri.

1.4 Studi Kasus Penerapan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Ekonomi kerakyatan telah diterapkan dalam berbagai aspek perekonomian Indonesia, terutama melalui koperasi dan UMKM. Peran aktif masyarakat dalam sistem ini memungkinkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta distribusi kesejahteraan yang lebih merata. menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan harus menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional karena bersumber dari kekuatan rakyat sendiri. Berbagai studi kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana koperasi, UMKM, dan kebijakan pemerintah telah berperan dalam menggerakkan ekonomi berbasis rakyat (Swasono, 1985).

Keberhasilan Koperasi dalam Mendukung Ekonomi Rakyat

Koperasi telah menjadi salah satu bentuk konkret penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Keberhasilan koperasi dalam mendukung ekonomi rakyat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut adalah manajemen yang baik, partisipasi aktif anggota, dan dukungan regulasi dari pemerintah. Koperasi harus dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi (Swasono, 1985). Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Dengan model ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga

ekonomi melainkan sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemandirian ekonomi.

Salah satu contoh suksesnya koperasi dalam mendukung ekonomi berbasis kerakyatan adalah Koperasi Kredit CU (*Credit Union*) Sauan Sibarrung di Toraja. Koperasi ini berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha kecil. Koperasi yang dikelola secara transparan dan profesional mampu menciptakan ekonomi berbasis kebersamaan yang kuat dan berkelanjutan (Melati et al., 2022).

Peran UMKM dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Selain itu, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional karena berbasis pada sumber daya lokal dan tidak bergantung pada modal asing (Meliala, 2022).

Meskipun memiliki kontribusi besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia, sebagian besar UMKM masih mengalami keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, serta masih rendahnya adopsi teknologi dan digitalisasi. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, pemerintah perlu melakukan berbagai pembaharuan. Pemerintah dapat memperkuat infrastruktur keuangan inklusif, memberikan pelatihan digitalisasi, serta memperluas akses pasar melalui platform e-commerce dan kemitraan dengan perusahaan besar.

Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal usaha bagi UMKM, serta program penguatan koperasi. Peran negara dalam mendukung ekonomi kerakyatan harus diarahkan pada pemberdayaan, bukan hanya sekadar subsidi. Salah satu contoh sukses adalah Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang membantu perempuan prasejahtera mendapatkan akses modal untuk memulai usaha kecil.

Regulasi yang berpihak pada ekonomi rakyat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan UMKM dan koperasi. Meliala (2022) menjelaskan bahwa kebijakan seperti penghapusan pajak bagi UMKM berpenghasilan di bawah Rp500 juta per tahun, kemudahan perizinan usaha, serta insentif bagi koperasi modern telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Selain itu, regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan adanya berbagai studi kasus dan kebijakan yang telah diterapkan, ekonomi kerakyatan terbukti memiliki peran krusial dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

633-2443-1-PB. (n.d.).

2133-Article Text-5500-1-10-20221102. (n.d.).

¹ Abdul Kader, M., & Galuh Ciamis, U. (2018). PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA. In *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* (Vol. 15, Issue 1).

Fitriyani, I., Kadewi Sumbawati, N., Rachman, R., Ekonomi dan Manajemen, F., & Samawa Sumbawa Besar, U. (2024). Peran Entrepreneur dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Indonesia. In *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* (Vol. 4, Issue 1). <http://m.kemenpora.go.id>

Hakim, L., Indra, ;, & Irawan, A. (n.d.). *STRATEGI MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL DENGAN MEMINIMALISIR IMPOR UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT.*

Kerakyatan, P. E., Ratna, D., & Hapsari, I. (2018). *Dwi Ratna Indri Hapsari Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional ditinjau dari HUKUM DALAM MENDORONG DINAMIKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI KERAKYATAN* (Vol. 26, Issue 2). <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bea2c400d717/7-perjanjian-perdagangan-internasional-ini-akan->

Melati, I. S., dkk. (2022). *Eksistensi ekonomi kerakyatan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

- Meliala, A. J. (n.d.). *Melawan dinamika kapitalisme dengan hukum ekonomi kerakyatan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada - Rajawali Pers.
- Nur Sarfiah, S., Eka Atmaja, H., & Marlina Verawati, D. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA MSMEs THE PILLAR FOR ECONOMY. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1).
<https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Rinawati, A. (2020). DALAM MENGHADAPI KAPITALISME GLOBAL. *Jurnal Terapung : Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2).
- Styaningrum, F., Kunci, K., & Ekonomi Kerakyatan, S. (2021). *E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA KONSEP SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM INDONESIA*. 10(8), 656–663. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>
- Swasono, S.-E. (1985). *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi: Membangun sistem ekonomi nasional*. Jakarta: LP3ES.
- Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(1).
<https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>

PROFIL PENULIS



Dr. Nurhayati, SE, ME

Merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulus dari Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Trisakti dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan melanjutkan Pasca Sarjana (S3) di Program Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Pengalaman mengajar Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi Makro, Statistika, Ekonometrika dan Praktikum Alat Analisis Kuantitatif. Banyak menulis artikel di bidang Ekonomi, Regional, dan Pembangunan Berkelanjutan. Penulis aktif sebagai pengurus Jurnal sebagai Managing Editor pada Jurnal Media Ekonomi. Penulis juga aktif sebagai Ketua Lembaga Pengolahan Data dan Statistik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.

Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.universitasbumigora.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

EKONOMI KERAKYATAN

Membangun Kemandirian Nasional



Penulis:

Nurhayati - Dwi Wulan Pujiriyani
Reza Arviciena Sakti - Mohamad Bawazeer
Andi Kurniawan - Bainalhuri Halim - Ayu Minarsi
Endah Kurnia Lestari - Lutfi Muta'ali - Andra Juansa



StarDigital Publishing
www.stardigitalpublishing.com

EKONOMI KERAKYATAN:

Membangun Kemandirian Nasional

Penulis:

Nurhayati

Dwi Wulan Pujiriyani

Reza Arviciena Sakti

Mohamad Bawazeer

Andi Kurniawan

Bainalhuri Halim

Ayu Minarsi

Endah Kurnia Lestari

Lutfi Muta'ali

Andra Juansa



EKONOMI KERAKYATAN:

Membangun Kemandirian Nasional

Penulis :

Nurhayati, Dwi Wulan Pujiriyani, Reza Arviciena Sakti, Mohamad Bawazeer, Andi Kurniawan, Bainalhuri Halim, Ayu Minarsi, Endah Kurnia Lestari, Lutfi Muta'ali, Andra Juansa

Editor :

Syifa Nurhaliza

Cover :

Deka Sugama

Penerbit : PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia

Email : ptstardigitalpublishing@gmail.com

Website : www.stardigitalpublishing.com

Anggota IKAPI : No. 202/DIY/2024

ISBN : 978-623-89803-0-7

Copyright © 2025 PT. Star Digital Publishing

Cetakan Pertama, Maret 2025

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian maupun seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai di maksud pada Ayat [1] di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku ini yang berjudul "**Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional**." Buku ini hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan ekonomi berbasis rakyat yang berorientasi pada kesejahteraan bersama serta kemandirian bangsa.

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat, dengan menitikberatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Model ekonomi ini bukan hanya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam buku ini, kami mengupas berbagai aspek ekonomi kerakyatan, mulai dari Konsep Dasar Ekonomi Kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan menitikberatkan pada kemandirian dan keadilan sosial, pilar-pilar utama yang menopangnya, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor ini. Selain itu, peran UMKM, koperasi, dan model bisnis berbasis gotong royong dibahas sebagai elemen penting dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di era globalisasi dan digitalisasi, ekonomi berbasis sumber daya lokal menjadi kunci dalam membangun kemandirian nasional. Buku ini juga mengupas bagaimana teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui digitalisasi UMKM, e-commerce, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan pendekatan komprehensif, buku ini memberikan wawasan bagi akademisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip ekonomi kerakyatan. Melalui pemanfaatan potensi lokal dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, ekonomi kerakyatan dapat menjadi solusi dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan

penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi sumbangsih bagi kemajuan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selamat membaca!

Jakarta, Maret 2025

Penulis

EKONOMI KERAKYATAN:

Membangun Kemandirian Nasional

Bab	Penulis	Judul	Halaman
1	Nurhayati	Konsep Dasar Ekonomi Kerakyatan	1 – 16
2	Dwi Wulan Pujiriyani	Pilar - Pilar Ekonomi Kerakyatan	17 - 27
3	Reza Arviciena Sakti	Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan	28 - 40
4	Mohamad Bawazeer & Andi Kurniawan	Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Global	41 - 54
5	Bainalhuri Halim	Peran UMKM Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi	55 - 66
6	Ayu Minarsi	Koperasi dan Model Bisnis Berbasis Gotong Royong	67 -75
7	Endah Kurnia Lestari	Pembangunan Ekonomi Desa Sebagai Fondasi Kemandirian Nasional	76 -88
8	Lutfi Muta'ali	Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal	89 -108
9	Andra Juansa	Peran Teknologi dan Digitalisasi Dalam Ekonomi Kerakyatan	109-116

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR EKONOMI KERAKYATAN	1
A. Pengertian Ekonomi Kerakyatan	4
B. Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Ekonomi Kerakyatan	11
D. Studi Kasus Penerapan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia ...	14
BAB 2 PILAR-PILAR EKONOMI KERAKYATAN	17
A. Ekonomi Kerakyatan: Kebijakan yang Diprioritaskan untuk Berpihak pada Rakyat	19
B. Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan	23
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan	25
BAB 3 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN	28
A. Kebijakan Pemerintah dan Ekonomi Kerakyatan	29
B. Strategi Pemerintah Sebagai Penyokong Ekonomi Kerakyatan	31
C. Penyediaan Infrastruktur Sebagai Alat Ekonomi Kerakyatan	34
D. Kolaborasi Sektor Swasta Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	35
E. Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan	38
F. Kesimpulan	40
BAB 4 EKONOMI KERAKYATAN DALAM PERSPEKTIF GLOBAL.....	41
A. UKM, Ekonomi Kerakyatan, dan Pembangunan Global.....	44
B. Pengalaman Brazil Dan Thailand	49

BAB 5 PERAN UMKM DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI.....	55
A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	56
B. Tujuan UMKM.....	56
C. Hambatan UMKM.....	57
D. Manfaat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	59
E. UMKM Keripik Pisang Sinta di Bandar Lampung	60
F. UMKM Ternak Ayam Kampung.....	62
G. Kesimpulan	66
 BAB 6 KOPERASI DAN MODEL BISNIS BERBASIS GOTONG ROYONG	67
A. Prinsip-prinsip Koperasi dan Gotong Royong	68
B. Koperasi sebagai Model Bisnis Berbasis Gotong Royong.....	69
C. Keunggulan Koperasi dan Model Bisnis Gotong Royong	70
D. Tantangan dalam Menerapkan Koperasi Berbasis Gotong Royong.....	71
E. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Peran Koperasi dalam Ekonomi Masyarakat	71
F. Sinergi antara Koperasi dan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	72
G. Inovasi dalam Pengelolaan Koperasi Berbasis Gotong Royong.....	73
 BAB 7 PEMBANGUNAN EKONOMI DESA SEBAGAI FONDASI KEMANDIRIAN NASIONAL.....	76
A. Desa Sebagai Subyek Pembangunan	78
B. Konsep Pembangunan Desa.....	79
C. Proses Pembangunan Desa	81
D. Pembangunan Desa Berbasis Komoditas Unggulan.....	83
E. Strategi Pengembangan Ekonomi Menuju Kemandirian Desa	84
 BAB 8 EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	89
A. Pendahuluan.....	90
B. Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi Lokal	92

C. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal	96
D. Tantangan dan Strategi Dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal.....	98
E. Studi Kasus Implementasi Local Economic Development (LED) Di Indonesia.....	102
F. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis	106
BAB 9 PERAN TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI DALAM EKONOMI KERAKYATAN	109
A. Akses ke Pasar Global	110
B. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan	112
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	112
D. Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan).....	113
E. Transformasi Ekonomi Digital.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
PROFIL PENULIS.....	127

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI

KERAKYATAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi besar dan memiliki struktur ekonomi yang beragam. Salah satu aspek fundamental dalam perekonomian nasional adalah ekonomi berbasis rakyat atau ekonomi kerakyatan. Sistem ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Prinsip dari system ini adalah memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, ekonomi kerakyatan menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi kerakyatan berpijak pada prinsip bahwa rakyat harus memiliki kendali atas sumber daya ekonomi, baik dalam produksi maupun distribusi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Salah satu elemen penting dalam ekonomi kerakyatan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemerataan ekonomi. Selain itu, koperasi sebagai wadah ekonomi berbasis kolektif juga menjadi instrumen utama dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama.

Keunggulan ekonomi kerakyatan terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan ekonomi nasional terhadap krisis. Berbeda dengan sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada investasi asing atau industri besar, ekonomi berbasis rakyat memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi. Ketika krisis ekonomi global melanda, UMKM dan koperasi tetap mampu bertahan karena keterkaitannya yang erat dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Namun, tantangan dalam implementasi ekonomi kerakyatan masih cukup besar. Keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, dan pasar menjadi kendala utama bagi UMKM dan koperasi untuk berkembang. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam kebijakan ekonomi yang sering lebih berpihak kepada sektor industri besar dibandingkan usaha rakyat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan melalui berbagai kebijakan strategis. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal untuk UMKM, serta pelatihan kewirausahaan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sektor ekonomi berbasis rakyat. Selain itu, regulasi yang memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan besar harus terus diperkuat.

Tidak hanya dari sisi kebijakan, peran masyarakat dalam membangun ekonomi kerakyatan juga sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis lokal, seperti membeli produk UMKM, mendukung koperasi, dan mengembangkan bisnis berbasis komunitas, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat. Kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi harus ditanamkan sebagai bagian dari upaya kolektif menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Dalam tatanan mengembangkan pembangunan berkelanjutan, ekonomi kerakyatan juga memiliki potensi besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Sistem ekonomi ini mendorong penggunaan sumber daya lokal secara efisien, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mendukung model bisnis yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial.



Gambar 1.1 Potret Kegiatan di Pasar

Bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai konsep ekonomi kerakyatan, peran UMKM dan koperasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat ekonomi berbasis rakyat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan ekonomi kerakyatan dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan perekonomian nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

A. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Tujuan ekonomi kerakyatan adalah mewujudkan kesejahteraan bersama secara adil dan berkelanjutan. Menurut Sri-Edi Swasono (1985), ekonomi kerakyatan berpijak pada demokrasi ekonomi yang menekankan asas kebersamaan, kemandirian, dan keadilan sosial. Sistem ini berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada segelintir pemilik modal dan pihak yang berkepentingan. Orientasi ini yang akan mendorong kesejahteraan yang lebih merata. Di Indonesia, ekonomi kerakyatan memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang

menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Konsep dasar ekonomi kerakyatan menekankan pada peran rakyat sebagai poros utama dalam kegiatan ekonomi. Rakyat merupakan produsen, konsumen, maupun pengelola seluruh sumber daya ekonomi di Indonesia. Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif dan memiliki daya tahan, terutama dalam menghadapi dinamika globalisasi dan krisis ekonomi. Sistem ini memungkinkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkembang sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Semua hal ini tidak terlepas dengan dukungan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (Melati et al., 2022).

Selain itu, ekonomi kerakyatan juga memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Sistem ekonomi ini mendorong pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab serta berorientasi pada keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Styaningrum, 2021). Dengan pendekatan ini, ekonomi kerakyatan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi dalam jangka panjang. Regulasi yang mendukung ekonomi kerakyatan harus mampu menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah persaingan global. Oleh karena itu, sistem ekonomi ini tidak hanya relevan untuk kebutuhan nasional, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan globalisasi (Hapsari, 2019).

Ekonomi kerakyatan memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan berbagai system ekonomi lainnya. Berikut ini adalah perbedaan antara prinsip ekonomi kerakyatan dengan tiga (3) prinsip ekonomi lainnya.

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kapitalis

Ekonomi kapitalis berorientasi pada kebebasan pasar dan kepemilikan pribadi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, persaingan bebas menjadi mekanisme utama distribusi sumber daya. Meliala (2022) dalam Buku *Melawan Dinamika Kapitalisme dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan* menyoroti bahwa kapitalisme cenderung menghasilkan kesenjangan ekonomi yang besar. Kekayaan terakumulasi pada segelintir individu atau korporasi yang memang memiliki daya saing yang kuat. Sebaliknya, ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kesejahteraan dengan mengutamakan partisipasi kolektif dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil serta menengah. Sistem ini berusaha menghindari eksploitasi ekonomi oleh kelompok modal besar dengan menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam pengelolaan ekonomi (Swasono, 1985).

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Sosialis

Ekonomi yang berprinsip sosialisme mengedepankan peran negara sebagai pengendali utama sumber daya ekonomi. Tujuan dari prinsip ini adalah menciptakan keadilan sosial melalui distribusi yang terpusat. Meskipun memiliki kesamaan dengan ekonomi kerakyatan dalam hal keadilan ekonomi, ekonomi sosialisme sering mengorbankan kebebasan individu dalam berusaha. Di sisi lain, ekonomi kerakyatan berbeda dengan sosialisme dalam kebebasan masing-masing individu. Ekonomi kerakyatan mengakui peran pasar dan inisiatif individu. Persaingan yang sehat dapat terus berjalan tanpa tekanan yang terlalu memaksa. Penetapan kebijakan pada ekonomi kerakyatan sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak (Melati et al., 2022).

Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Campuran

Ekonomi campuran merupakan kombinasi antara mekanisme pasar dan intervensi pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan. Meskipun ekonomi campuran dan ekonomi kerakyatan mengakui peran negara dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan pada fokus utama dalam kedua sistem. Ekonomi campuran

tetap membuka ruang bagi dominasi modal besar. Negara-negara yang menganut system ini memperbolehkan pihak di luar rakyat negara tersebut yang memiliki kemampuan dalam modal untuk mendominasi suatu sektor. Sedangkan ekonomi kerakyatan menitikberatkan pada pemberdayaan rakyat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Negara-negara yang menganut system ekonomi kerakyatan akan mengutamakan kepentingan rakyat untuk mendominasi maupun menerima keuntungan yang paling besar. Dalam ekonomi kerakyatan, pemerintah tidak hanya mengatur dan mengawasi, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan ekosistem yang mendukung usaha kecil dan menengah untuk bersaing secara berkelanjutan (Styaningrum, 2021).

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan berlandaskan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pilar dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun penerapan ekonomi kerakyatan pada berbagai wilayah dan negara memiliki keunikan dan gaya masing-masing, prinsip-prinsip yang dipegang teguh pada dasarnya adalah sama. Berikut ini adalah penjelasan terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut.

1. Keadilan Sosial dan Pemerataan Ekonomi

Ekonomi kerakyatan menekankan keadilan sosial sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Sri-Edi Swasono (1985) menegaskan bahwa sistem ini bertujuan untuk menghindari monopoli dan oligopoli yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Selain itu, system keadilan sosial ditegakkan untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata pada masyarakat. Ekonomi kerakyatan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Masyarakat yang memiliki daya ekonomi yang lemah menjadi prioritas dalam prinsip ekonomi kerakyatan (Melati et al., 2022).

2. Kemandirian Ekonomi dan Keberlanjutan Usaha

Prinsip kemandirian ekonomi dalam ekonomi kerakyatan menekankan bahwa rakyat harus memiliki kemampuan untuk mengelola ekonomi tanpa ketergantungan yang berlebihan pada modal asing atau korporasi besar. Hukum ekonomi kerakyatan harus melindungi kedaulatan ekonomi nasional dari tekanan kapitalisme global yang sering kali merugikan usaha lokal (Meliala, 2022). Keberlanjutan usaha menjadi aspek penting agar ekonomi rakyat dapat bertahan dalam jangka Panjang. Untuk keberlanjutan usaha, diperlukan pemanfaatan berbagai sumber daya dengan bijak, inovatif, dan optimal.

3. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Ekonomi

Ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam aktivitas ekonomi. Rakyat berperan sebagai produsen, konsumen, maupun pengelola sumber daya. Hapsari (2019) dalam artikelnya menyoroti bahwa sistem ini membutuhkan kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Dengan adanya partisipasi aktif, masyarakat dapat memiliki kontrol lebih besar terhadap perekonomian, sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

4. Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam ekonomi kerakyatan, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu, negara harus memberikan perlindungan bagi sektor ini dari ancaman persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan ekonomi kerakyatan harus menciptakan regulasi yang mendukung penguatan modal, akses pasar, serta peningkatan kapasitas usaha kecil agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun global (Setyaningrum, 2021). Swasono (1985) menambahkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi, pelatihan, dan fasilitasi teknologi sangat diperlukan untuk memperkuat daya saing UMKM dalam menghadapi era

digital dan globalisasi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dukungan pemerintah harus dititikberatkan pada pengembangan sumber daya UMKM. Bantuan dalam bentuk pendanaan yang berlebih akan memberikan efek ketergantungan yang tidak sehat bagi para pelaku UMKM. Hal ini dapat mematikan daya kreativitas dan inovatif dari para pelaku usaha.

B. Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan memiliki karakteristik yang membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Ciri utama dari ekonomi kerakyatan adalah penekanan pada peran aktif rakyat dalam kegiatan ekonomi. Rakyat berperan aktif sebagai produsen, konsumen, maupun pengelola sumber daya ekonomi. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu atau korporasi besar. Hal yang menjadi tujuan utama dalam system ini adalah kesejahteraan bersama melalui mekanisme yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem yang berakar dari nilai-nilai gotong royong dan kemandirian. Hal ini yang melandasi pembangunan ekonomi agar dapat berjalan secara berkelanjutan dengan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu aspek fundamental dalam ekonomi kerakyatan adalah peran usaha kecil, koperasi, dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional (Swasono, 1985). Berikut ini akan dibahas mengenai peran usaha kecil, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.

Peran UMKM dalam Membangun Perekonomian Nasional

Keberadaan UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Di Indonesia, UMKM merupakan wadah penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pemerataan ekonomi bagi rakyat. Melati et al. (2022) pada *Buku Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia* menyoroti bahwa UMKM telah menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Hal

ini menjadikan UMKM sebagai sektor strategis dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi domestik karena sebagian besar produk dan jasa yang dihasilkan berasal dari sumber daya lokal. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia pada saat ini adalah keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar. Hal-hal tersebut masih menjadi kendala yang perlu diatasi melalui kebijakan yang berpihak kepada sektor ini.

Koperasi sebagai Bentuk Ekonomi Berbasis Kebersamaan

Selain UMKM, koperasi juga merupakan elemen penting dalam ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan wujud nyata dari demokrasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kebersamaan (Swasono, 1985). Dalam mekanisme koperasi, seorang anggota tidak hanya bertindak sebagai bagian kecil dari koperasi. Setiap anggota juga merupakan pemilik dan pengguna manfaat, sehingga sistem koperasi memungkinkan distribusi keuntungan yang lebih adil dibandingkan dengan perusahaan konvensional. Koperasi dapat menjadi solusi untuk menghadapi dominasi modal besar karena prinsip operasionalnya lebih menitikberatkan pada kesejahteraan bersama dibandingkan eksploitasi keuntungan semata (Meliala, 2022).

Dukungan Regulasi dan Kebijakan bagi Usaha Kecil

Agar ekonomi kerakyatan dapat berkembang secara optimal, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada usaha kecil dan menengah. Styaningrum (2021) mengungkapkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UMKM dan koperasi. Langkah-langkah seperti pemberian insentif pajak, kemudahan akses kredit, serta penyediaan pelatihan dan teknologi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing usaha kecil. Keberpihakan pemerintah terhadap UMKM juga harus diwujudkan dalam kebijakan yang tidak hanya mempermudah perizinan usaha, tetapi juga melindungi para pengusaha UMKM dari persaingan tidak sehat dengan perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, regulasi yang

jelas dan berpihak kepada ekonomi rakyat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Melati et al., 2022).

C. Tujuan dan Manfaat Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Berbeda dengan sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan segelintir kelompok, ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi. Swasono (1985) menekankan bahwa ekonomi kerakyatan bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan sebuah strategi pembangunan. Tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Melalui prinsip gotong royong, pemerataan akses terhadap sumber daya, serta peran aktif masyarakat, sistem ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Secara Merata

Salah satu tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Ekonomi yang berbasis pada usaha kecil, koperasi, dan UMKM memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan ekonomi berbasis kapitalisme. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, sistem ini dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan daya beli masyarakat secara luas (Melati et al., 2022).

Agar ekonomi kerakyatan dapat berjalan dengan efektif, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Meliala (2022) menegaskan bahwa negara memiliki peran yang amat krusial dan strategis dalam melindungi pelaku usaha kecil. Cara yang digunakan dapat melalui menegakkan regulasi yang adil, memberikan akses permodalan yang mudah, serta pemberian insentif yang mendorong pertumbuhan UMKM secara optimal dan

berkelanjutan. Tanpa peran aktif pemerintah, ekonomi kerakyatan akan sulit berkembang dan cenderung terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang didominasi oleh korporasi besar.

Ekonomi kerakyatan juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap investasi dan modal asing. Ketergantungan ini sering berdampak pada eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja lokal. Hal ini tidak menguntungkan bagi rakyat yang biasanya mendapatkan insentif yang biasa saja, sedangkan korporasi asing memperoleh keuntungan yang melimpah. Kemandirian ekonomi harus menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada modal asing yang dapat melemahkan kedaulatan ekonomi negara (Swasono, 1985).

Untuk meningkatkan daya saing industri lokal menuju industri nasional maupun kancah internasional, ekonomi kerakyatan memiliki fokus dalam memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri. Melati et al. (2022) menjelaskan bahwa pemberian dukungan terhadap UMKM dan koperasi dapat membangun ekosistem ekonomi Indonesia yang mandiri dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global. Penguatan industri lokal tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Salah satu manfaat utama ekonomi kerakyatan adalah menciptakan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber daya sering kali hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Pada prinsip sementara ekonomi kerakyatan berusaha mendistribusikannya secara lebih merata kepada masyarakat. Swasono (1985) menekankan bahwa prinsip demokrasi ekonomi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan kesempatan bagi rakyat kecil untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ekonomi kerakyatan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah

(UMKM). Akses terhadap modal usaha dan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial (Meliala, 2022). Dengan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, ekonomi kerakyatan mampu mengangkat kelompok masyarakat bawah ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Salah satu manfaat utama ekonomi kerakyatan adalah menciptakan akses yang lebih adil terhadap sumber daya ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, sumber daya sering kali hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Pada prinsip sementara ekonomi kerakyatan berusaha mendistribusikannya secara lebih merata kepada masyarakat. Swasono (1985) menekankan bahwa prinsip demokrasi ekonomi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memberikan kesempatan bagi rakyat kecil untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ekonomi kerakyatan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM). Akses terhadap modal usaha dan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat miskin dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial (Meliala, 2022). Dengan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, ekonomi kerakyatan mampu mengangkat kelompok masyarakat bawah ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Partisipasi Rakyat

Ekonomi kerakyatan membuka ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan usaha lokal. Usaha kecil yang berbasis komunitas sering kali lebih inovatif karena lebih memahami kebutuhan dan potensi lokal. Dengan dukungan yang tepat, inovasi dalam sektor UMKM dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan (Melati et al., 2022).

Partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi kerakyatan bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pemilik usaha. Swasono (1985) menggarisbawahi bahwa ekonomi berbasis komunitas dapat memperkuat solidaritas sosial dan mempercepat pemerataan kesejahteraan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, perencanaan dan pengelolaan ekonomi kerakyatan dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih kuat secara berkelanjutan.

Ekonomi kerakyatan bukan hanya sekadar model ekonomi alternatif, tetapi merupakan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis keadilan sosial. Melalui dukungan kebijakan yang tepat, ekonomi berbasis rakyat dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi nasional dan mendorong Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mandiri.

D. Studi Kasus Penerapan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Ekonomi kerakyatan telah diterapkan dalam berbagai aspek perekonomian Indonesia, terutama melalui koperasi dan UMKM. Peran aktif masyarakat dalam sistem ini memungkinkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta distribusi kesejahteraan yang lebih merata. menegaskan bahwa ekonomi kerakyatan harus menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional karena bersumber dari kekuatan rakyat sendiri. Berbagai studi kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana koperasi, UMKM, dan kebijakan pemerintah telah berperan dalam menggerakkan ekonomi berbasis rakyat (Swasono, 1985).

Keberhasilan Koperasi dalam Mendukung Ekonomi Rakyat

Koperasi telah menjadi salah satu bentuk konkret penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Keberhasilan koperasi dalam mendukung ekonomi rakyat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut adalah manajemen yang baik, partisipasi aktif anggota, dan dukungan regulasi dari pemerintah. Koperasi harus dijalankan

berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi (Swasono, 1985). Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Dengan model ini, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi melainkan sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemandirian ekonomi.

Salah satu contoh suksesnya koperasi dalam mendukung ekonomi berbasis kerakyatan adalah Koperasi Kredit CU (*Credit Union*) Sauan Sibarrung di Toraja. Koperasi ini berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memberikan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha kecil. Koperasi yang dikelola secara transparan dan profesional mampu menciptakan ekonomi berbasis kebersamaan yang kuat dan berkelanjutan (Melati et al., 2022).

Peran UMKM dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Selain itu, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi nasional karena berbasis pada sumber daya lokal dan tidak bergantung pada modal asing (Meliala, 2022).

Meskipun memiliki kontribusi besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan. Di Indonesia, sebagian besar UMKM masih mengalami keterbatasan modal, akses pasar yang terbatas, serta masih rendahnya adopsi teknologi dan digitalisasi. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, pemerintah perlu melakukan berbagai pembaharuan. Pemerintah dapat memperkuat infrastruktur keuangan inklusif, memberikan pelatihan digitalisasi, serta memperluas akses pasar melalui platform e-commerce dan kemitraan dengan perusahaan besar.

Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai program pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti program Kredit Usaha Rakyat

(KUR), bantuan modal usaha bagi UMKM, serta program penguatan koperasi. Peran negara dalam mendukung ekonomi kerakyatan harus diarahkan pada pemberdayaan, bukan hanya sekadar subsidi. Salah satu contoh sukses adalah Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang membantu perempuan prasejahtera mendapatkan akses modal untuk memulai usaha kecil.

Regulasi yang berpihak pada ekonomi rakyat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan UMKM dan koperasi. Meliala (2022) menjelaskan bahwa kebijakan seperti penghapusan pajak bagi UMKM berpenghasilan di bawah Rp500 juta per tahun, kemudahan perizinan usaha, serta insentif bagi koperasi modern telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat. Selain itu, regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan adanya berbagai studi kasus dan kebijakan yang telah diterapkan, ekonomi kerakyatan terbukti memiliki peran krusial dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB 2

PILAR-PILAR EKONOMI KERAKYATAN

Ekonomi kerakyatan memadukan kata 'ekonomi' dan 'kerakyatan'. Dalam konteks ini, secara sederhana ekonomi kerakyatan mengantarkan pada pemahaman mengenai sebuah sistem ekonomi yang menunjukkan keberpihakannya pada rakyat sebagai subjek. Rakyat memiliki peran sentral dalam ekonomi kerakyatan. Melengkapi pemahaman ini, sebagaimana dijelaskan Bung Hatta dalam (Yuskar, 2006), ekonomi kerakyatan mengimplikasikan adanya peran nyata yang bersifat dinamis dari rakyat pada setiap tahapan kegiatan ekonomi dari mulai produksi hingga distribusinya. Peran yang dinamis ini bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan. Perekonomian rakyat merujuk pada semua kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan orang banyak dalam kedudukannya sebagai produsen, pedagang maupun konsumen (Kader, 2018). Sistem ekonomi kerakyatan mengandaikan sebuah sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam skala mikro, ekonomi kerakyatan mengamanatkan jaminan kepada setiap rakyat atau warga negara untuk memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan menjamin terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu dalam skala makro, ekonomi kerakyatan mengamanatkan penguatan ekonomi nasional yang didorong melalui peningkatan daya saing produk dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor. Ekonomi kerakyatan bersama dengan demokrasi ekonomi dan konsep koperasi merupakan bagian dari 'soko guru' perekonomian rakyat (Arifqi, 2021). Dengan berlandaskan pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945, ekonomi kerakyatan dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ekonomi kedaulatan rakyat.

Merujuk pada Sabil (2014), sistem ekonomi kerakyatan dicirikan dengan beberapa hal yaitu: 1) bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan melalui kompetisi yang baik; 2) memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial dan kualitas hidup, 3) mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 4) menjamin kesempatan yang setara dalam berusaha

dan bekerja; serta 5) perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

Ekonomi kerakyatan seringkali dikaikan dengan istilah ‘ekonomi rakyat’, ‘demokrasi ekonomi’ atau ‘ekonomi Pancasila’. Dalam perjalanannya, Sistem Ekonomi Kerakyatan dianggap sebagai pengganti Sistem Ekonomi Pancasila. Indahsari (2012) menyebutkan bahwa Sistem Ekonomi Kerakyatan lebih sempit dari Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi Pancasila mengharuskan sistem ekonomi Indonesia berorientasi pada seluruh sila dalam Pancasila, sedangkan Sistem Ekonomi Kerakyatan lebih memfokuskan diri pada penerapan sila ke-4 dan ke-5 Pancasila.

A. Ekonomi Kerakyatan: Kebijakan yang Diprioritaskan untuk Berpihak pada Rakyat

Tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa bertahan hidup, mendorong terjadinya tukar menukar barang dan jasa. Situasi inilah yang menjadi awal mula dari timbulnya perekonomian (Munzir and Syamsuddin, 2020). Hal ini sejalan dengan manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*). Manusia sebagai *homo economicus* diartikan bahwa mereka senantiasa melakukan usaha atas dasar perhitungan ekonomi. Dalam konteks ini, prinsip yang kemudian dilakukan adalah bahwa ada pertimbangan mengenai untung dan rugi. Untung apabila memperoleh imbal balik besar sementara itu rugi apabila mengalami kehilangan atau penyusutan dari apa yang dikeluarkan.

Sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki tendensi untuk mencari keuntungan pribadi atau profit atau kepuasan (Maharani, 2016). Manusia berpotensi untuk memperlakukan manusia yang lain sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks *homo economicus*, ada kecenderungan yang perlu diantisipasi diantaranya: keinginan untuk bertindak secara rasional dengan

mempertimbangkan antara pengorbanan dengan hasil yang diperoleh, rasa ketidakpuasan yang tidak terbatas, bertindak berdasarkan dorongan kepentingan sendiri dan memilih suatu kegiatan yang paling dekat dengan pencapaian tujuannya.

Sifat dasar sebagai *homo economicus* akan menciptakan pola-pola kegiatan ekonomi yang kurang sehat. Bahkan *homo economicus* dapat menjadi apa yang disebut (Fuchs and Lingnau, 2024) sebagai '*a psychopath prototipe*'. Situasi ini bisa tercipta karena perbedaan akses dan aset akan menjadi jurang yang mempertajam ketimpangan. Aktivitas ekonomi dengan situasi seperti ini akan menciptakan kompetisi yang tidak seimbang. Mereka yang tidak mampu berkompetisi secara proporsional akan tersingkirkan dari arena kegiatan ekonomi atau pun akan menjadi objek penghisapan bagi kelas yang lain. Situasi inilah yang dihindari dari sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan berbeda dengan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kerakyatan menawarkan sebuah ruang berkeadilan untuk memastikan akses yang proporsional bagi mereka yang terlibat dalam sebuah siklus kegiatan ekonomi. Tidak ada penghisapan ataupun eksploitasi yang mengatasi ikatan kekeluargaan dan kebersamaan.

Mubyarto dalam Mujahidin, Saifuddin and Busrah (2021), menyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat dan menunjukan pemihakan yang sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi jejaring (*network*) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi, dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya pasar domestik di antara sentra dan pelaku usaha masyarakat. Sebagai kancah kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil, ekonomi kerakyatan bukanlah usaha formal berbadan hukum yang secara resmi diakui sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam ekonomi nasional.

Ekonomi kerakyatan mensyaratkan adanya demokratisasi kepemilikan modal material, intelektual, dan institusional oleh rakyat

secara merata. *Land reform* pada sektor pertanian, dan kepemilikan saham oleh karyawan merupakan contoh modal material. Dalam konteks modal material ini, negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi tetapi juga memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki modal material (Indahsari, 2012). Modal intelektual berkaitan dengan pendidikan bagi seluruh rakyat dimana pendidikan bukanlah kegiatan yang dikomersialkan dalam rangka ekonomi kerakyatan. Modal institusional berkaitan dengan jaminan kebebasan rakyat untuk menyatakan pendapat melalui serikat-serikat rakyat. Kata kunci utama dari ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengutamakan pada pembangunan masyarakat ekonomi lemah; rakyat menjadi subjek sekaligus objek Pembangunan; serta pembangunan ekonomi dilakukan oleh dan untuk mereka sendiri dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Ekonomi positif merupakan arah yang dibangun dari ekonomi kerakyatan. Penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta pendistribusiannya diupayakan untuk memberikan keuntungan yang maksimal bagi produsen serta konsumennya (Hasmawati, 2018). Ekonomi kerakyatan mengimplikasikan tatanan ekonomi yang memiliki watak pemerayaan dan keadilan. Pemilikan aset ekonomi bukan dilakukan untuk akumulasi pribadi melainkan distribusikan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Pasar akan mengalami kegagalan apabila pemilikan asetnya terjadi secara tidak merata dan tidak adil. Ekonomi kerakyatan akan memberikan jaminan pertumbuhan output perekonomian yang memberikan jaminan keadilan bagi rakyat.

Terdapat beberapa kelebihan yang ada pada tata ekonomi kerakyatan (Hasmawati, 2018). Dalam ekonomi kerakyatan, mereka yang kurang mampu bisa tetap mendapatkan perlakuan yang sama secara ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program yang nyata sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Ekonomi kerakyatan akan memastikan siklus produksi distribusi dan konsumsi yang baik dan saling membutuhkan sehingga dapat

mendorong kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Selain kelebihan, tentunya terdapat beberapa kelemahan yang juga perlu disadari dalam sistem ekonomi kerakyatan ini. Beberapa kelemahan ini sebagaimana disebutkan oleh (Hasmawati, 2018) yaitu: pengetahuan mengenai investasi yang masih kurang, penerapan manajemen yang kurang baik, serta kemandirian finansial yang belum sepenuhnya terbangun.

Gagasan ekonomi kerakyatan pada dasarnya diupayakan untuk membangun kembali teori-teori dari ideologi kapitalis dan sosialis yang dinilai gagal dalam menjawab persoalan ekonomi. Paradigma ekonomi konvensional ini memiliki dampak besar pada terjadinya kegiatan ekonomi yang tidak seimbang (Pohan, Krisdayanti and Simanjuntak, 2019). Terdapat beberapa inti atau pokok dari ekonomi kerakyatan yaitu: penghapusan monopoli, persaingan berkeadilan (*fair competition*), peningkatan alokasi sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah, penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap, serta pembaruan UU Koperasi dan pendirian koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan.

Munzir and Syamsuddin (2020) menyebutkan bahwa belum ada negara yang sepenuhnya mampu menjalankan ekonomi kerakyatan secara murni. Situasi ini terjadi karena perekonomian negara di dunia sudah sangat terbuka. Korea Selatan, Jepang, dan Jerman adalah contoh negara yang sudah mampu mendorong sektor UMKM atau sektor rumah tangga untuk berkontribusi pada perekonomian nasionalnya. Jerman dan Jepang adalah negara industri maju dimana industri besarnya ditopang oleh industri kecil sebagai pemasok manufaktur. Ekonomi kerakyatan tidak kemudian digambarkan sebagai keharusan bagi para pelaku ekonominya untuk beraktivitas secara tradisional. Usaha kecil tetap harus bergerak agar tidak tertinggal dan tetap bisa berkembang.

Dalam konteks menelaah pilar ekonomi kerakyatan, Hatta dalam (Pohan, Krisdayanti and Simanjuntak, 2019), menyebutkan bahwa

koperasi dan usaha kecil menengah merupakan usaha perekonomian yang dekat dengan jiwa dan semangat gotong royong yang ada pada masyarakat Indonesia. Keduanya terbukti telah menjadi penyelamat perekonomian ketika Indonesia dilanda krisis. Merujuk pada (Hidayat, 2023), UMKM dan koperasi merupakan cerminan dari solidaritas sosial ekonomi yang pada dasarnya merujuk pada mainstreaming keberpihakan pada rakyat. UMKM dan Koperasi memiliki peran penting dalam Pembangunan karena industri besar terbukti tidak bisa menjadi pemeran tunggal dalam memecahkan masalah pengangguran, ketidakmerataan distribusi pendapatan dan ketidakseimbangan struktur pembangunan ekonomi sektoral-regional serta desa-kota.

B. Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Koperasi secara etimologi berasal dari kata '*coopere*' dalam bahasa latin atau '*cooperation*' dalam bahasa Inggris yang berarti bekerjasama. Koperasi merupakan wadah ekonomi yang dinilai paling sesuai dengan ekonomi kerakyatan. Koperasi merupakan salah satu pilar dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Koperasi disebut sebagai usaha ekonomi kerakyatan. Nilai dan semangat penting dari koperasi adalah kegotongroyongan yang tetap berorientasi pada keuntungan. Keuntungan dalam konsep koperasi adalah keuntungan sebagai instrumen kesejahteraan bersama. Koperasi ditawarkan untuk menunjukkan semangat kolektifitas, gotong royong dan tolong menolong (Pohan, Krisdayanti and Simanjuntak, 2019).

Keberadaan koperasi secara konstitusional tidak terlepas dari usaha Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dicita-citakan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan (Amran, 2021). Politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan ekonomi Indonesia secara berangsur-angsur berdasarkan koperasi.

Koperasi menjadi '*soko guru*' perekonomian di Indonesia. Sebagaimana disebutkan oleh Mujahidin, Saifuddin and Busrah (2021), keberadaan koperasi dalam sejarahnya di masa orde baru, sangat membantu ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan. Hal ini salah satunya dapat ditemukan dari keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) di hampir setiap desa. Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dan anggotanya. Koperasi berfungsi menjadi urat nadi perekonomian Indonesia, mendemokratisasi sosial ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta memperkuat perekonomian rakyat Indonesia (Sabil, 2014).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kegiatan usaha koperasi dapat dilaksanakan secara Tunggal usaha atau serba usaha. Aktivitas usaha yang dilakukan tidak hanya untuk keuntungan satu pihak saja tetapi untuk dibagi bersama baik keuntungan dan kerugiannya.

Koperasi bertumpu pada tujuan utamanya untuk mengembangkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Laba bukan ukuran utama kesejahteraan anggota. Tujuan kesejahteraan dicapai melalui karya dan jasa yang disumbangkan masing-masing anggota. Koperasi merujuk pada Basri dan Nugroho dalam Sabil (2014) berfungsi untuk: membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi serta kesejahteraan anggota dan masyarakat; mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional; serta mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Lebih lanjut Basri dan Nugroho (2009) dalam (Sabil, 2014) menyebutkan 5 jenis koperasi menurut fungsinya yaitu: 1) koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi; 2) koperasi penjualan; 3) koperasi produksi; 4) koperasi jasa dan 5) koperasi tunggal usaha/koperasi serba usaha. Dalam setiap koperasi ini, anggota memiliki peran masing-masing. Dalam koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi, anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen untuk koperasinya. Dalam koperasi penjualan/pemasaran, anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dalam koperasi produksi, anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi. Dalam koperasi jasa, anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menerapkan asas kekeluargaan, demokrasi, kebersamaan dan efisiensi berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam sistem ekonomi kerakyatan. UMKM berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM menjadi bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Usaha kecil dapat dicontohkan melalui usaha tani, pedagang di pasar grosir/agen, pengrajin industri kayu, pengrajin industri pakaian, peternak perikanan berskala kecil. Sementara itu, usaha menengah dapat dicontohkan diantaranya: usaha pertanian/peternakan skala menengah, usaha perdagangan, usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi, dan jasa transportasi bus antar provinsi.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara. UMKM dapat menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. UMKM juga menjadi penyedia lapangan kerja terbesar. UMKM memiliki andil kuat dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Melalui UMKM, pasar baru dan inovasi bisa diciptakan. UMKM juga berkontribusi pada neraca pembayaran (Gustika and Susena, 2022).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merujuk pada PP Nomor 7 Tahun 2021 dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Usaha Mikro memiliki modal usaha dengan paling banyak satu miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari satu miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari lima miliar rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Merujuk pada (Gustika and Susena, 2022), UMKM memiliki posisi yang strategis di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena UMKM tidak memerlukan modal yang besar seperti Perusahaan besar. Tenaga kerja untuk UMKM juga tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Sebagian besar lokasi UMKM yang berada di pedesaan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana Perusahaan besar. UMKM juga memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. UMKM dinilai mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian di Indonesia. UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan Perusahaan besar yang lebih mengutamakan penggunaan teknologi. Oleh karena itulah, UMKM bisa menjadi dinamisator dan stabilisator perekonomian di Indonesia. UMKM mampu menopang usaha besar melalui penyediaan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya. Selain itu UMKM juga bisa menjadi sektor terdepan bagi usaha besar untuk mendistribusikan produk ke konsumen.

Menurut perkembangannya, Gustika and Susena (2022), membedakan UMKM menjadi empat kelompok yaitu: *livelihood activity*, *micro enterprise*, *small dynamic enterprise*, dan *fast moving enterprise*. *Livelihood activity* merupakan kelompok usaha sektor informal yang usahanya dianggap dan digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari demi pemenuhan kebutuhan hidup (*survival*). *Micro enterprise* merupakan kelompok usaha yang kegiatannya adalah menghasilkan suatu produk namun belum memiliki sifar kewirausahaan untuk memajukan produknya. *Small dynamic enterprise* adalah kelompok usaha yang menjalankan bisnisnya dengan basis kewirausahaan dan bisa menerima pekerjaan sub-kontrak. Sementara itu *fast moving enterprises* adalah kelompok yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan memiliki tujuan memajukan usaha dengan mentransformasinya menjadi usaha besar.

BAB 3

**KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM MENDUKUNG EKONOMI
KERAKYATAN**

A. Kebijakan Pemerintah dan Ekonomi Kerakyatan

Kebijakan pemerintah merupakan aspek yang sangat penting dalam memahami bagaimana suatu negara mengatur dan mengelola berbagai isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Kebijakan pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, termasuk kebijakan fiskal, kebijakan publik, dan kebijakan desentralisasi, yang semuanya memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah

Kebijakan fiskal, sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah, berperan penting dalam pengelolaan pendapatan negara dan pengeluaran public, kebijakan fiskal melibatkan pinjaman publik, perpajakan, dan pengeluaran untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam konteks negara-negara yang berusaha untuk membangun aset dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang memberikan alternatif dalam pengelolaan keuangan public.(Maysarah, Rahma, Almira Hani, 2016)Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Melalui berbagai program dan regulasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam konteks ekonomi kerakyatan di Indonesia berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui

pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi. UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lapangan pekerjaan yang merata. (Sulistyo Budi Utomo *et al.*, 2024) Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor ini, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. (Bersama and Kemakmuran, 2024)

Pemerintah sebagai pemilik wewenang dalam setiap pengambilan keputusan yakni dengan kebijakan-kebijakan yang dirasa dapat meningkatkan nilai ekonomi dan menghasilkan nilai positif untuk setiap kebijakan fiskal yang dikeluarkan diharapkan mampu memberikan hasil yang signifikan dengan meningkatkan ekonomi local di pedesaan, sehingga meningkatnya potensi ekonomi kerakyatan. Selain itu, desentralisasi fiskal juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dengan memberikan otonomi lebih kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran dan investasi.

Kebijakan pemerintah juga berfokus pada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlangsungan UMKM. Dalam konteks ini, koperasi berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat kerjasama antar pelaku usaha kecil, sehingga mereka dapat saling mendukung dan meningkatkan daya saing. Dengan demikian, kebijakan ekonomi kerakyatan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Styaningrum, 2021)

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam pengelolaan isu-isu publik. Kebijakan yang baik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat

untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

B. Strategi Pemerintah Sebagai Penyokong Ekonomi Kerakyatan

Kebijakan ekonomi kerakyatan di Indonesia berakar dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, sistem ekonomi kerakyatan bertujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu kapitalisme, dengan fokus pada pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan harus didukung oleh perangkat hukum yang memadai untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai pendorong untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.

Strategi pemerintah sebagai penyokong ekonomi kerakyatan di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui insentif dan pembiayaan yang tepat. Ekonomi kerakyatan, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memerlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung, pembiayaan, dan insentif yang relevan.

Pertama, insentif fiskal dan non-fiskal merupakan salah satu strategi utama pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Menurut Utomo et al., pemerintah memberikan perhatian besar terhadap UMKM dan koperasi yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan kontribusi mencapai 60%. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak, subsidi, atau dukungan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaku usaha. Selain itu, Kusumawardhana menekankan pentingnya modalitas kontrol pemerintah dalam mengawasi dan mengatur

kebijakan fiskal yang mendukung agenda pembangunan di negara berkembang. Dengan demikian, insentif yang diberikan harus terintegrasi dengan kebijakan fiskal yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan ekonomi kerakyatan. (Kusumawardhana, 2023)

Pemberian insentif dari pemerintah diartikan juga pemberian modal usaha kepada pelaku usaha yang dianggap membutuhkan sentuhan pemerintah melalui pemberian modal. Kebijakan ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang wewenang penuh atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini biasanya dikenal dengan istilah kebijakan fiskal, kebijakan fiskal merupakan putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu menangani permasalahan-permasalahan masyarakat yang dianggap membutuhkan campur tangan pemerintah, kebijakan fiskal ini akan menjadi keputusan pemerintah yang dianggap mampu menciptakan ekosistem baru.

Kedua, pembiayaan yang memadai juga menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan seperti lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan, ekonomi kerakyatan artinya berbicara tentang ekonomi lokal yang biasanya dari sudut pandang pedesaan sehingga dalam hal ini bisa memberikan regulasi khusus terhadap koperasi. Koperasi berperan penting dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal. (Basri, Saifuddin, 2021)

Pembiayaan ini tidak hanya membantu pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang ada di masyarakat. Selain itu, menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan dapat membantu pelaku kewirausahaan lokal dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program pembiayaan yang tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada pengembangan SDM.

Ketiga, program-program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal harus didorong oleh pemerintah, seperti halnya program pada UMKM yang berbasis ekonomi kerakyatan dan akan meningkatkan potensi pengembangan pada kemandirian ekonomi daerah, program-program seperti pelatihan manajemen UMKM dan digitalisasi usaha dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. (Wahyuni *et al.*, 2024) Selain itu, pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. (Bersama and Kemakmuran, 2024)

Akhirnya, penting bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang ada, evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan akan memberikan dampak positif terhadap luaran positif dari perkembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, pemerintah harus bersikap responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta terus berinovasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung ekonomi kerakyatan.

Secara keseluruhan, strategi pemerintah sebagai penyokong ekonomi kerakyatan melalui insentif dan pembiayaan harus bersifat komprehensif dan terintegrasi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan ekonomi kerakyatan dapat tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pembiayaan dalam ekonomi kerakyatan di Indonesia harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM dan koperasi. Dengan pendekatan yang tepat, pembiayaan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

C. Penyediaan Infrastruktur Sebagai Alat Ekonomi Kerakyatan

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur menjadi semakin krusial, terutama dalam konteks ekonomi kerakyatan. Infrastruktur yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), seperti keterbatasan akses pasar dan modal, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas transportasi, dapat membuka akses bagi para produsen untuk menjangkau konsumen dengan lebih efisien. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan volume penjualan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan demikian, inisiatif pemerintah dalam membangun infrastruktur bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan melalui penyediaan infrastruktur pemasaran yang memadai. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga memperkuat jaringan distribusi yang diperlukan untuk memasarkan produk lokal. Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas pasar, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan daerah terpencil, yang pada gilirannya mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (Perdana *et al.*, 2023)

Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan program yang memfasilitasi digitalisasi juga sangat penting. Dalam era digital, kemampuan untuk memasarkan produk secara online menjadi

semakin krusial. Pemerintah dapat mendorong pengembangan platform digital yang menghubungkan UMKM dengan konsumen, serta memberikan pelatihan tentang pemasaran digital. Hal ini tidak hanya membantu UMKM untuk bertahan tetapi juga untuk berkembang dalam lingkungan yang semakin kompetitif. (DEWI, DEWI and NURAK, 2023)

Disisi lain faktor eksternal lain yang memberikan pengaruh pada pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai jembatan untuk berkembangnya yakni infrastruktur sosial, infrastruktur sosial disini yang dimaksudkan adalah seperti pendidikan dan kesehatan, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di desa-desa tertinggal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang inklusif harus mencakup peningkatan infrastruktur sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara holistik. Infrastruktur sosial ini akan menciptakan ekosistem baru dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga pemerintah dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang mendukung ekonomi kerakyatan yang kondusif dan berkembang pesat. (Abdillah and Primitasari, 2023)

Secara keseluruhan, penyediaan infrastruktur yang baik, dukungan terhadap teknologi, dan akses ke layanan keuangan merupakan elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek ini, komunitas dapat mengembangkan strategi pemasaran produk yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Junarto and Salim, 2022)

D. Kolaborasi Sektor Swasta Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan UMKM dapat terlaksana apabila terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, pengusahaUMKM, stakeholder dan pihak-pihak swasta. Dengan landasan semangat ideologi sistem Ekonomi Kerakyatan dari beberapa pihak tersebut,

maka akan meningkatkan perekonomian daerah yang secara langsung akan memiliki dampak pada peningkatan perekonomian nasional.

Kolaborasi sektor swasta dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang semakin penting dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat, tetapi juga sektor swasta yang berperan sebagai mitra strategis dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal maupun nasional. (Ibrahim, Leus and Dewi, 2024)

Sektor swasta memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Indonesia. Ekonomi kerakyatan, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Melalui kolaborasi yang efektif, sektor swasta dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan akses terhadap modal, serta menyediakan pelatihan dan inovasi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Salah satu kontribusi utama sektor swasta adalah dalam penyediaan infrastruktur dan layanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dukungan sektor swasta dalam ekonomi kerakyatan memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi pengembangan masyarakat dan perekonomian lokal, adapun manfaat tersebut yakni: Pertama, sektor swasta berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk lokal seperti kolaborasi antara sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan pertanian terpadu yang dimana mampu memberikan dampak positif dengan adanya manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan. Dengan adanya dukungan dari sektor swasta, masyarakat dapat mengakses teknologi dan praktik pertanian

yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan hasil pertanian dan pendapatan mereka. (Ibrahim, Leus and Dewi, 2024)

Kedua, sektor swasta juga berkontribusi pada peningkatan daya saing ekonomi melalui inovasi. Dalam konteks ini, sektor swasta dapat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Termasuk dalam dukungan ini yakni adanya inovasi, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, sektor swasta dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Dengan adanya investasi dari sektor swasta, peluang kerja akan meningkat, sehingga mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata, yang sering kali didukung oleh investasi sektor swasta, dapat menjadi sumber utama lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal, hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (Reform *et al.*, 2023)

Akhirnya, keterlibatan sektor swasta dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui CSR, perusahaan dapat memberikan dukungan kepada komunitas lokal dalam bentuk pelatihan, bantuan modal, dan pengembangan usaha kecil. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan dan komunitas, yang penting untuk keberlanjutan usaha. (Fahrizal, Anisah and Hidayatullah, 2024)

Secara keseluruhan, dukungan sektor swasta dalam ekonomi kerakyatan sangat penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang

baik antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat, tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan dapat tercapai dengan lebih efektif.

E. Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sejak masa Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin, kebijakan fiskal telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariah, termasuk kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan. (Harmon Amir, Dwi Maisyaroh, Rindi Anita, 2023)

Salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam adalah zakat, yang berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Zakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. (Juwita Sari et al., 2024) Selain zakat, instrumen lain seperti pajak, infak, dan hibah juga berperan penting dalam mendukung kebijakan fiskal Islam. Pajak dalam konteks ini harus dikumpulkan dan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam.

Kebijakan fiskal Islam memiliki peran yang signifikan dalam mendukung ekonomi kerakyatan, terutama dalam konteks distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal tidak hanya berfungsi untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti keadilan dan pemerataan. Salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam

adalah zakat, yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif. Zakat, infak, dan hibah merupakan komponen penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. (Arham et al., 2024)

Kebijakan fiskal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan mencakup pengalokasian sumber daya untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. Misalnya, dalam sejarah pemerintahan Umar bin Khattab, semua pendapatan negara dialokasikan untuk kesejahteraan umat dan proyek pembangunan, yang menunjukkan komitmen terhadap distribusi kekayaan yang adil. (Refliani, Sri Indah Lestari, Syarif Hidayatullah, 2024) Selain itu, kebijakan fiskal yang transparan dan akuntabel juga sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal yang diterapkan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termasuk dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran negara (APBN) yang harus mencerminkan keadilan dan pemerataan dalam pembangunan. Kebijakan fiskal yang baik dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi tingkat kemiskinan, yang merupakan tujuan utama dari ekonomi kerakyatan.

Lebih lanjut, integrasi prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan fiskal dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif. Misalnya, penerapan konsep maslahat mursalah dalam kebijakan fiskal di tingkat daerah dapat meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Arham et al., 2024) Dengan demikian, kebijakan fiskal Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

F. Kesimpulan

Dalam upaya mendukung ekonomi kerakyatan, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Melalui berbagai kebijakan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ekonomi kerakyatan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai pengatur dan fasilitator sangat krusial. Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendorong yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan memberikan dukungan yang tepat, pemerintah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dukungan insentif dan pembiayaan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Melalui program-program yang memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Hal ini juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya kolaborasi sektor swasta dengan pemerintah dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui kemitraan yang saling menguntungkan, sektor swasta dapat berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, dan pemasaran produk lokal. Regulasi hukum yang mendukung ekonomi kerakyatan sangat penting untuk menciptakan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Terakhir kebijakan fiskal Islam menawarkan pendekatan alternatif yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan syariah, pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih inklusif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional.

BAB 4

EKONOMI KERAKYATAN

DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

Globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah menjadi salah satu faktor penentu dalam dinamika perekonomian global dengan semakin meningkatnya interdependensi antar negara dan terintegrasinya pasar global. Dalam lanskap ekonomi ini, produsen dapat mengambil keuntungan melalui biaya produksi yang relatif terjangkau dengan banyaknya pilihan baku baik lokal maupun impor. Sementara itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk membeli beragam produk pilihan menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan mereka. Belum lagi sektor-sektor pendukung lainnya seperti jasa transportasi dan logistik, keterbukaan pasar di berbagai belahan dunia telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dunia. Namun demikian, model perekonomian liberal tidak sepenuhnya memberikan keuntungan kepada semua lapisan masyarakat. Kesenjangan ekonomi justru semakin melebar terutama di negara-negara berkembang, di mana produsen kecil, dan industri lokal berjuang untuk bersaing dengan perusahaan multinasional (Leal-Arcas *et al.*, 2025; Neupane, Neupane and Tamang, 2025). Liberalisasi perdagangan yang menjanjikan pertumbuhan dan efisiensi ekonomi dalam kenyataannya cenderung mengabaikan ekonomi akar rumput, dan menciptakan ketergantungan terhadap rantai pasok global (DiMenna, 2022). Pasar bebas telah berimbas secara signifikan terhadap pasar domestik dengan melonjaknya impor produk asing, mengikis industri lokal dan secara perlahan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri.

Fenomena ini telah membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya mendorong model ekonomi alternatif yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, lebih inklusif, dimana rakyat adalah penggerak utama dalam pembangunan ekonomi. Dalam dimensi yang lebih luas, ekonomi kerakyatan berpusat pada kepemilikan lokal, tata kelola partisipatif, dan kegiatan perekonomian yang berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang berorientasi pasar, kerangka ekonomi kerakyatan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, dan memastikan pemerataan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu,

usaha kecil, dan menengah (UKM) merupakan aktor yang sangat relevan sebagai representasi dari aspirasi sosial dan kesejahteraan masyarakat (Surya *et al.*, 2021; Healey-Benson and Kirby, 2024). Hal ini turut ditegaskan dalam laporan Bank Dunia dimana UKM mencakup 90% bisnis global dan menghasilkan lebih dari 50% lapangan kerja di berbagai sektor (Tewari *et al.*, 2013; ILO, 2019).

Dalam aspek penting lainnya, pelaku usaha UKM yang mengakar pada komunitas dan masyarakat daerah setempat memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan bahan baku lokal secara efisien. Kebermanfaatan peran UKM ini untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi tetap didistribusikan dalam masyarakat daerah daripada diserahkan sepenuhnya kepada investor asing atau konglomerat multinasional. Lebih dari itu, model pemberdayaan ekonomi *bottom-up* ini dapat memperkuat jejaring sosial ekonomi diantara masyarakat, dan memperluas akses rantai pasok domestik untuk kebutuhan pasar global (Fajarika, Trapsilawati and Sopha, 2024). Kendati begitu, dalam realitanya terdapat kecenderungan UKM terus dirugikan secara struktural di tengah semakin kuatnya persaingan ekonomi global. Secara kelembagaan, para pelaku UKM seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan, dan adaptasi teknologi, sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan daya saing dan berkompetisi secara global (Yoshino and Taghizadeh-Hesary, 2018). Institusi keuangan acapkali berpandangan bahwa usaha kecil sebagai peminjam berisiko tinggi, yang menyebabkan terbatasnya akses ke kredit, sedangkan regulasi yang berlebihan dan inefisiensi birokrasi semakin membatasi potensi pertumbuhan mereka.

Bab ini akan membahas peran UKM sebagai aktor ekonomi kerakyatan dalam mengakselerasi pembangunan di negara-negara berkembang. Menggunakan beberapa pandangan teoritis dan studi kasus, artikel ini berupaya memberikan penjelasan ilmiah tentang peranan UKM sebagai katalisator pembangunan di Selatan Global yang dapat menjembatani pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah semakin terintegrasinya perekonomian dunia. Artikel ini

berargumentasi bahwa mendukung pemberdayaan UKM bukan hanya masalah kebijakan ekonomi nasional, tetapi keharusan global untuk membangun ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan tangguh.

A. UKM, Ekonomi Kerakyatan, dan Pembangunan Global

Dalam pengertian umum, ekonomi kerakyatan didefinisikan sebagai perekonomian yang bersifat inklusif dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi partisipasi masyarakat, dan komunitas pengusaha lokal dalam rangka mendukung pertumbuhan industri domestik. Karena sifatnya yang inklusif, ekonomi kerakyatan mengutamakan model pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan akses ekonomi yang merata kepada semua lapisan masyarakat dalam rangka kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Liwaul, 2023). Melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, para pelaku ekonomi rakyat, mulai dari petani, nelayan, pekerja informal, hingga usaha kecil dan menengah, didorong untuk mengelola sumber daya secara mandiri dengan dukungan negara yang diharapkan dapat menciptakan iklim usaha kondusif dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, konsep ekonomi kerakyatan telah menjadi perhatian serius para *founding fathers* yang mencita-citakan keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Karno dalam pembelaannya di Landraad Bandung pada Agustus 1930 menuliskan “ekonomi rakyat oleh sistim monopoli disempitkan, sama sekali didesak, dan dipadamkan.” Sementara itu, Bung Hatta menulis suatu artikel berjudul ‘Ekonomi Kerakyatan dalam Bahaya’ dalam surat kabar Daulat Rakyat pada 1931 (Hasmawati, 2018). Jejak sejarah ini menunjukkan betapa pentingnya konsep ekonomi kerakyatan dalam basis pemikiran para tokoh pendiri bangsa Indonesia, sehingga sudah sepatutnya pengembangan dan pelestarian model ekonomi ini menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan ekonomi.

Untuk memastikan penyelenggaraan sistem ekonomi yang berkeadilan, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi

usaha kecil dan menjamin kesempatan kerja, sehingga mereka yang selama ini tertinggal pun turut merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi. Globalisasi ekonomi telah menciptakan ruang gerak yang lebih bebas bagi korporasi-korporasi multinasional, daripada kesempatan usaha bagi pelaku usaha kecil dan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Kehadiran negara merupakan faktor krusial dalam menciptakan regulasi dan kebijakan ekonomi yang mendukung kemandirian masyarakat (Hasmawati, 2018; Rompas, 2018). Peran serta negara dapat dilakukan antara lain dengan memberi dukungan permodalan, insentif, dan kemudahan usaha bagi koperasi, komunitas pelaku usaha lokal, usaha kecil dan menengah. Hal ini secara bersamaan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan permodalan yang masih dihadapi oleh sebagian besar industri kecil dan menengah, serta membantu terciptanya lapangan kerja yang lebih luas bagi rakyat, baik di sektor pertanian, perdagangan, industri kreatif, hingga pariwisata.

Tidak hanya sebatas menyediakan pendanaan atau kemudahan akses kredit, tetapi peran pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan diwujudkan juga dengan membentuk ekosistem pasar yang kondusif bagi para pelaku usaha rakyat (Salam and Prathama, 2022). Penguatan tata kelola bisnis dan industri yang memperkuat keberadaan pasar tradisional, termasuk penataan zonasi pasar modern, merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem yang berkeadilan bagi para pelaku usaha kecil, dan komunitas lokal. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat bawah, dimana akses terhadap sumber daya ekonomi lebih merata dan potensi lokal pun tidak tergeser oleh dominasi pemodal besar (Ayunda *et al.*, 2022). Dalam konteks penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan, pemerintah pun dapat memberikan pembekalan keterampilan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan teknologi, dalam rangka meningkatkan daya saing produk lokal hingga mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Dengan jejaring pemasaran dan distribusi yang lebih luas, pemerintah berkontribusi secara signifikan agar usaha

rakyat tidak kalah dengan penetrasi pasar modern (Sumilat, 2021). Selain itu, peran pendampingan pemerintah yang memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara pelaku ekonomi daerah dan perusahaan berskala besar dapat memberikan manfaat besar untuk membantu terciptanya kemitraan strategis, termasuk mendapatkan dukungan permodalan, bimbingan teknis, serta peluang ekspor yang lebih luas (Anjani *et al.*, 2023).

Dari beragam elemen ekonomi kerakyatan, UKM merupakan salah satu unsur strategis dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Terdapat beberapa argumentasi mengapa UKM memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan pemerataan kesejahteraan terhadap semua lapisan masyarakat. Pertama, lahirnya kelompok-kelompok usaha kecil ini menunjukkan tumbuhnya jiwa kewirausahaan di tengah masyarakat yang sangat diperlukan untuk membantu kepentingan pembangunan nasional melalui penciptaan kesempatan bisnis dan lapangan kerja bagi masyarakat di setempat, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat bisnis dan industri. Kegiatan usaha ini dapat melibatkan keterampilan-keterampilan sederhana yang mengakar pada tradisi setempat dan tidak dimiliki oleh masyarakat perkotaan, seperti para pengrajin terampil, produsen makanan tradisional, dan jenis usaha lainnya yang dapat memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan lokal. Faktor ini penting untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, serta mengantisipasi lonjakan mobilisasi penduduk dari desa ke kota yang dipicu oleh minimnya ketersediaan lapangan kerja. Sebagaimana semangat ekonomi kerakyatan, pembangunan ekonomi ditujukan untuk mencapai kemakmuran bersama, kemajuan berkelanjutan, dan perluasan akses ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Jauh berbeda dengan karakteristik perusahaan multinasional yang relatif fokus kepada kapitalisasi pasar dan sumber daya alam, UKM menciptakan potensi bisnis dan memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal dan daerah setempat. Peran strategis ini dapat

menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat, serta memperkuat ketahanan kolektif dalam menghadapi volatilitas pasar global. Dengan jejaring kerjasama bisnis dengan para *supplier*, pekerja, dan konsumen di lingkungan sekitar, UKM dapat berkembang menjadi sentra kegiatan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), peran besar UKM dalam penciptaan lapangan kerja global berkontribusi terhadap upaya pencapaian Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah menjadi komitmen bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam SDG 1 termaktub komitmen bersama untuk “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia” membutuhkan ketersediaan lapangan kerja yang memadai agar semua rumah tangga memiliki penghasilan sehingga dapat hidup sejahtera. SDG 8 mengamankan agar “mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang,” tentunya sangat relevan dengan upaya pemberdayaan UKM sebagai salah satu aktor penggerak perekonomian rakyat yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat di pedesaan dan daerah-daerah lainnya yang sangat jauh dari sentra bisnis dan industri. Tidak hanya itu, SDG 10 berisikan tujuan pembangunan global untuk “mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara,” dimana UKM memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah memperkecil kesenjangan ekonomi di tingkat nasional dan antar negara melalui kemampuannya dalam kewirausahaan, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan menggerakkan roda perekonomian daerah (International Labour Organizations, 2019).

Kedua, peran strategis UKM dalam kerangka ekonomi kerakyatan adalah memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Tidak semua daerah memiliki akses yang mudah terhadap permodalan dan pekerjaan, sehingga keberadaan UKM dapat

memperkuat ketahanan ekonomi lokal (Vella, 2011; Surya *et al.*, 2021). Berdasarkan sejumlah literatur, pemerintah khususnya di negara-negara berkembang membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk bantuan keuangan dan subsidi kepada kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu setiap tahunnya (Banerjee *et al.*, 2024). Alokasi bantuan sosial ekonomi ini dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar jika dimanfaatkan untuk bantuan pendidikan, permodalan bisnis, dan pembangunan teknologi di wilayah-wilayah terpencil, sehingga membuka peluang ekonomi baru termasuk membangun ekosistem ekonomi berbasis digital. Melalui kerangka bantuan ini, UKM menjadi lebih berdaya untuk menciptakan lebih banyak peluang bisnis dan lapangan pekerjaan sehingga mengatasi permasalahan kemiskinan, dan pengangguran di daerah mereka (Okugbere, 2025). Secara bersamaan, beban anggaran untuk bantuan sosial ekonomi masyarakat akan semakin berkurang dan dapat dikelola untuk kebutuhan sektor strategis lainnya. Melalui kemandirian ekonomi masyarakat yang digerakkan oleh UKM, pemerintah di Selatan Global akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengelola anggaran bantuan sosial ekonomi di sektor-sektor lain yang berprioritas tinggi seperti perawatan kesehatan, infrastruktur berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan.

Ketiga, UKM yang mengakar pada komunitas lokal tidak hanya berperan menggerakkan roda perekonomian daerah, tetapi juga dapat meningkatkan upaya pelestarian lingkungan melalui praktik bisnis berkelanjutan. Beberapa kegiatan UKM meliputi usaha berbasis pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan yang sebagian besar menggunakan ketersediaan bahan baku lokal, termasuk berasal dari alam sekitar. Dengan semakin meningkatnya literasi, dan kesadaran akan pentingnya pelestarian dari sumber produksi ini, UKM telah bertransformasi untuk memprioritaskan praktik bisnis berkelanjutan, termasuk penggunaan bahan baku berkelanjutan dan proses produksi ramah lingkungan. Sejumlah studi telah mengidentifikasi beberapa praktik ekonomi hijau (*green practices*) yang dilakukan oleh para pelaku UKM termasuk diantaranya pengendalian limbah dan sampah,

efisiensi penggunaan energi, dan manajemen rantai pasok yang berkelanjutan (Bamidele Micheal Omowole *et al.*, 2024; De Andrade *et al.*, 2025). Penemuan dalam beberapa studi tersebut menunjukkan besarnya potensi UKM dalam rangka mendukung pencapaian SDGs tidak hanya dalam aspek penciptaan lapangan kerja, dan mengatasi kesenjangan ekonomi antar daerah dan negara, tetapi juga memperkuat pertumbuhan hijau melalui operasional bisnis berkelanjutan.

B. Pengalaman Brazil Dan Thailand

Berdasarkan laporan analisis Mastercard Economics Institute, terdapat 10 negara yang memiliki pertumbuhan tertinggi dalam jumlah bisnis baru berskala kecil dan menengah. Menariknya dari 10 negara ini, dua diantaranya adalah negara berkembang yaitu Brazil dan Thailand. Dalam laporan tersebut diuraikan terdapat sekitar 35 persen pertambahan unit usaha kecil dan menengah di Brazil, dan 29 persen di Thailand pada tahun 2020, dibandingkan dengan periode 2019 (World Economic Forum, 2021). Bagaimana Brazil dan Thailand berhasil memperkuat pertumbuhan bisnis UKM di negara mereka?

Dengan keberlimpahan sumber daya alam dan jumlah populasi yang signifikan, Brazil telah menempatkan UKM sebagai salah satu sektor prioritas untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Menurut studi Godke Veiga and McCahery, (2019), jumlah pelaku bisnis UKM di Brazil mencapai 98,5 persen dari sekitar 11,5 juta perusahaan yang terdaftar di negara tersebut, menyumbang 41 persen dari total daftar upah (*payroll*), dan 20 persen terhadap PDB. Data tersebut dapat mengilustrasikan posisi strategis sektor UKM dalam struktur perekonomian Brazil.

**Tabel 5.1 Pembentukan Bisnis Kecil dan Menengah Baru
(2020 vs. 2019)**

Negara	Peningkatan	Negara	Peningkatan
Inggris	101%	Thailand	29%
Amerika Serikat	86%	Mexico	13%
Australia	73%	Afrika Selatan	13%
Jerman	62%	Polandia	5%
Kanada	58%	Indonesia	-2%
Italia	44%	Rumania	-10%
Perancis	40%	Federasi Rusia	-10%
Jepang	38%	Turki	-21%
Brazil	35%	Filipina	-30%

Sumber: Mastercard Economics Institute
(*Exclude cash-only businesses*)

Kendati demikian, tidak berarti perjalanan bisnis sektor kecil dan menengah ini berjalan tanpa hambatan. Pelaku UKM, sebagaimana di banyak negara berkembang, mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan eksternal, khususnya usaha-usaha baru yang belum memiliki pengalaman dan portofolio bisnis yang meyakinkan. Selain itu, menurut laporan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), pelaku UKM di Brazil juga menghadapi masalah tingginya bunga pinjaman yang mencapai rata-rata 20,8 persen per tahun. Beberapa kondisi ini berimplikasi terhadap produktivitas, menghambat pertumbuhan UKM, dan menempatkan mereka pada situasi yang berisiko (Godke Veiga and McCahery, 2019).

Menyadari kelemahan dan faktor penghambat pertumbuhan bisnis ini, para pelaku UKM dengan dukungan dari pemerintah membentuk dua organisasi nirlaba yang memiliki fokus dalam pengembangan bisnis skala kecil dan menengah. Dua organisasi adalah *the Brazilian Micro and Small Business Support Service* (SEBRAE) dan *Confederation of National Industries* (CNI). SEBRAE berdiri pada 1972 dengan misi utamanya adalah meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis berskala mikro dan kecil, serta memperluas aktivitas kewirausahaan dalam rang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Brazil. SEBRAE memiliki 27 kantor perwakilan, 613 pusat layanan bisnis, 6.554 staf, 9,864 konsultan terakreditasi, dan lebih dari 2.000 kerjasama kelembagaan (Roofe and Roofe, 2016).

Dengan jejaring organisasi yang relatif luas ini, SEBRAE memiliki kemampuan yang signifikan menyelenggarakan jasa konsultasi dan intermediasi dalam membantu para pelaku usaha kecil di negara tersebut. Ruang lingkup konsultasi ini mencakup hal-hal strategis yang selama ini menjadi kendala bagi pelaku UKM seperti pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah, akses terhadap pasar baru, teknologi dan inovasi, serta memfasilitasi akses terhadap jasa pembiayaan. Lebih dari itu, SEBRAE juga sangat memahami kebutuhan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia para pelaku usaha mikro dan kecil. Beberapa program prioritas yang difasilitasi oleh organisasi ini termasuk juga pelatihan-pelatihan, kuliah dari para pakar, dan kegiatan seminar untuk memperkuat literasi pasar dan kemampuan manajerial yang krusial bagi keberlanjutan UKM (Rallo and Donadone, 2019; Marconatto *et al.*, 2022).

Tidak kalah pentingnya adalah *the Confederation of National Industries* (CNI) yang didirikan sejak 1938. Hampir seluruh anggota konfederasi ini adalah pelaku usaha UKM. Salah satu tujuan utama pendirian organisasi ini adalah untuk mendukung transformasi pelaku usaha Brazil menjadi perusahaan-perusahaan global melalui fasilitas *trade intelligence*, pelatihan bisnis, dan promosi yang disediakan oleh CNI. Dengan jumlah keanggotaan yang mencapai lebih dari 700.000

perusahaan, CNI memiliki kantor perwakilan di setiap daerah dan mencakup beberapa jaringan organisasi mitra seperti *the National Service of Industry Learning* (SENAI), *the Social Service Industry* (SESI), dan *the Euvaldo Lodi Institute* (IEL). SENAI, misalnya, merupakan lembaga penyedia pelatihan-pelatihan industri yang terdiri dari jaringan sekolah-sekolah profesional. Program pelatihan mereka dianggap krusial untuk menciptakan inovasi di sektor UKM terutama di aspek produk, pengolahan, dan pemasaran (Schwartz, Bar-El and Bentolila, 2022). Dalam *Strategic Map of Industry 2013-2022*, CNI menetapkan beberapa program prioritas untuk membantu ekspansi usaha kecil ke pasar global termasuk internasionalisasi UKM, dan meningkatkan partisipasi mereka dalam rantai pasok industri global (Roofe and Roofe, 2016).

Besarnya kontribusi sektor UKM dalam perekonomian terdokumentasi juga dalam beberapa literatur yang mempelajari perkembangan bisnis kecil dan menengah di Thailand. Menurut studi Chittithaworn *et al.*, (2011), sebagian besar sektor industri di Thailand didominasi oleh UKM. Dalam sektor manufaktur misalnya, terdapat lebih dari 90 persen industri kecil dan menengah yang bergerak di bidang ini meliputi 76 persen adalah usaha kecil, dan 17,8 persen merupakan usaha menengah. Industri kecil dan menengah mampu menyerap sebanyak 868.000 pekerja atau sekitar 39 persen dari total serapan tenaga kerja oleh industri di Thailand.

Semakin berkembangnya bisnis UKM di Thailand tidak dapat dipisahkan dari peranan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang berpihak kepada usaha kecil dalam beberapa dekade terakhir. Dalam sejarah perekonomian Thailand, pesatnya pertumbuhan UKM di negara ini khususnya terjadi setelah peristiwa Krisis Finansial Asia 1997 yang telah berdampak buruk terhadap kinerja perekonomian negara-negara Asia. Krisis ini telah menyebabkan banyak industri padat karya tidak mampu bertahan karena semakin beratnya biaya produksi dan tingginya ketidakpastian pasar global. Sebagai konsekuensinya, tingkat pengangguran meningkat secara signifikan karena banyak pekerja dan buruh pabrik terkena pemutusan

hubungan kerja (Knowles, Pernia and Racelis, 1999). Sebagai jalan keluar, UKM hadir membantu pemulihan ekonomi Thailand pasca krisis dengan menciptakan peluang bisnis dan penyerapan tenaga kerja.

Sebab itu, pemerintah Thailand telah menetapkan serangkaian kebijakan yang mendukung perkembangan industri kecil dan menengah. Sebelum tahun 2000, Thailand tidak memiliki regulasi dan lembaga khusus yang mengelola keberadaan UKM di negara tersebut. Aturan-aturan mengenai usaha kecil dan menengah digabungkan ke dalam regulasi kementerian lainnya. Namun setelah itu, parlemen menetapkan *SME Promotion Act* yang dianggap sebagai suatu terobosan dalam memperkuat pemberdayaan UKM di negara tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah Thailand membentuk organisasi baru untuk menyusun rencana strategis pemerintah dan program pengembangan UKM yang diberi nama *the Office of Small and Medium Enterprises Promotion* (OSMEP). Secara khusus, OSMEP melibat semua unsur pemerintah dan swasta dalam serangkaian lokakarya untuk mendengarkan ide, saran, dan pandangan mereka dalam proses penyusunan rencana strategis pemerintah untuk program UKM di Thailand. Setidaknya terdapat empat fase rencana strategis *five-year master plans* yang telah ditetapkan oleh pemerintah Thailand untuk memperkuat eksistensi UKM dalam perekonomian nasional (Turner *et al.*, 2016).

Dalam perkembangan lima tahun terakhir, pemerintah Thailand secara serius mendorong UKM untuk berinovasi memanfaatkan teknologi digital dalam proses bisnis mereka. Pemerintah memperkenalkan konsep Thailand 4.0 dalam strategi pembangunan ekonomi yang mengutamakan kreativitas dan inovasi. Dalam hal ini, pemerintah bahkan melibatkan universitas-universitas untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku UKM terutama agar dapat mengintegrasikan ide-ide baru yang dihasilkan oleh para pakar dan akademisi dengan industri kecil dan menengah, sehingga dapat memperbesar skala bisnis UKM dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Sriboonlue and Puangpronpitag, 2019). Selain itu,

sejak 2019, pemerintah Thailand melalui OSMEP bekerjasama dengan *Digital Economy Promotion Agency* (Depa), *the National Science and Technology Development Agency* (NSTDA), UOB Thailand, dan FinLab telah menyelenggarakan program *the Smart Business Transformation Program* (SBTP) yang memberikan dukungan finansial dan non-finansial kepada UKM untuk membantu mereka dalam proses digitalisasi bisnis. Transformasi bisnis digital ini banyak memberikan manfaat khususnya kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor jasa. Pemanfaatan internet sebagai media *e-commerce*, dan kanal pembayaran online telah memberikan dampak positif terhadap operasional bisnis kecil dan menengah di Thailand (Jongwanich and Kohpaiboon, 2024).

BAB 5

PERAN UMKM DALAM

MEMBANGUN KEMANDIRIAN

EKONOMI

A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah jenis usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, Mengurangi pengangguran dan kemiskinan, Memperkenalkan berbagai produk lokal ke dunia internasional, Memeratakan tingkat ekonomi rakyat kecil, Memasukkan devisa. Kelemahan UMKM Modal terbatas, Kredibilitas, Permasalahan pegawai, Tingginya biaya langsung, Keterbatasan kualitas produk.

Pengembangan UMKM

- Dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan UMKM
- Revolusi digital 4.0 membuat banyak perubahan kepada UMKM
- Pergeseran gaya belanja konsumen dari offline ke online
- Penting bagi calon UMKM atau wirausaha skala UMKM memiliki wawasan yang cukup

B. Tujuan UMKM

Tujuan utama dari berdirinya UMKM adalah:

1. Untuk menciptakan usaha- usaha baru, baik dilevel mikro, kecil, menengah.
2. Terciptanya lapangan usaha baru guna dapat memperluas jaringan-jaringan usaha & ekonomi bagi rakyat dan membuka peluang bagi pelaku usaha, untuk mengembangkan jiwa wira usahanya dan meningkat tarap hidupnya.
3. Hal ini dapat mengarah kepada terciptanya multi sektor usaha yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah Ekonomi dan dapat menambah Kontribusi Ekonomi Daerah maupun Ekonomi Nasional.

UMKM yang sudah berjalan perlu diberikan dukungan (Support) baik modal & pembinaan, guna dapat berkembang lebih baik lagi, baik dari

bidang usaha, produksi, perluasan pemasarannya. Dengan demikian UMKM tidak hanya mampu bertahan tetapi juga mampu berprestasi, berinovasi, serta beradaptasi dengan perubahan-perubahan pasar & Teknologi.

C. Hambatan UMKM

Penghambat / tantangan UMKM adalah Indomaret & Alfamart yang tambah menjamur di Indonesia, sudah sampai ke pelosok- pelosok desa dan mendapat perhatian Pemerintah agar dapat membatasi setidaknya satu Alfamart dalam satu kecamatan, sehingga tidak mematikan usaha UMKM yang bersifat kerakyatan dan notabene usaha rakyat kecil. Sangat diharapkan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Mentri UMKM & Mentri perdagangan guna dapat membina pengusaha-pengusaha kecil dan menengah sehingga dapat tumbuh berkembang seirama & berimbang dalam upaya menambah kembangkan usaha-usaha kecil dan menengah yang dikelola rakyat dapat mengalami kolap/ gulung tikar. Hal ini yang seharusnya kita hindarkan.

Kalau kita berpijak pada UUD Ekonomi Kerakyatan Pasal 33 tentang usaha kecil dan kerakyatan atau koperasi, membangun ekonomi dan berperan penting guna membangun Ekonomi Kerakyatan dan Kebersamaan demi kemajuan rakyat bersama. Kebijakan Pemerintah berdasarkan pada UUD 45 Pasal 33 tersebut sangat vital atau sudah bersesuaian dengan bunyi firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

“Dan bertolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”
(Q.S. Al-Maidah: 2)

Setiap Warga Negara sudah menjadi kewajiban dan selayaknya memiliki usaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, Utamanya usaha yang sudah merakyat sejak dahulu adalah

usaha kecil dan menengah yang sudah mendarah daging yang digeluti Warga Negara kita sejak dahulu kala.

Dalam usaha dagang warung kelontongan misalnya, selalu terkendala modal yang terbatas, hal ini para pelaku bisnis ingin mengembangkan usahanya namun tak jarang mengalami hambatan modal karena pinjaman yang ada harus dibarengi dengan persyaratan- persyaratan yang belum terpenuhi.

Seiring perkembangan waktu, baik perkembangan teknologi dan peraturan-peraturan Pemerintah dalam mendapatkan modal seperti adanya Kredit Usaha Rakyat (K.U.R), tentu sangat membantu dunia usaha utama bagi para pelaku pedagang kecil & menengah di Negara kita. Meskipun demikian, para pelaku UMKM masih perlu memperhatikan berbagai syarat yang harus dipenuhi guna (sebagai jaminan) dalam pengeluaran dana dari Pemerintah yang disebut K.U.R tadi.

Dalam perkembangannya, UMKM di Lampung terkendala belum memiliki badan Hukum, tidak punya surat izin usaha, yang tidak jarang juga membuat pelaku usaha kecil memilih pinjaman yang bersifat merugikan (rente) yang berdampak sulitnya UMKM untuk berkembang dan tak jarang malah gulung tikar.

Kita ingin UMKM di Negeri kita ini berkembang dengan baik, sebagai Ekonomi Kerakyatan, yang membantu Ekonomi masyarakat kita yang berada digaris kemiskinan. Diharapkan dengan usaha kecil & menengah (UMKM) ini menjadi stimuli bagi para pelaku Ekonomi yang lebih baik sehingga kita (para pelaku Ekonomi) dapat meningkatkan tarap hidupnya yang lebih baik dan sejahtera. Namun disisi lain kita juga berharap para pelaku (UMKM) harus lebih kritis & berinovasi agar usahanya dapat berkembang lebih baik dan tidak ditinggalkan pelanggannya.

D. Manfaat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

AL: UMKM tentu banyak memiliki manfaat bagi Masyarakat.

1. Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha.
UMKM dapat meningkatkan penghasilan/ pendapatan pelaku usaha (Masyarakat) utama di kampung/ desa.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup
UMKM dapat meningkatkan taraf hidup Masyarakat, mereka dapat meningkatkan Pendidikan anak-anak nya, kesehatan, dan Sandang Pangan yang lebih baik.
3. Mengentaskan Kemiskinan
UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran & ketimpangan Ekonomi.
4. Memperkuat Ekonomi Nasional
UMKM dapat meningkatkan pertumbuhan pemasukan untuk Devisa Negara melalui Ekspor berbagai produk lokal.
5. Membantu Masyarakat yang kurang beruntung
UMKM dapat membantu Ekonomi Masyarakat yang kurang beruntung (belum memiliki pekerjaan).
6. UMKM Memperkuat daya saing wilayah/ daerah
UMKM dapat meningkatkan daya saing wilayah & meningkatkan wisatawan lokal maupun Nasional,serta dapat meningkatkan Investasi.
7. Mendukung Perekonomian Nasional
UMKM dapat meningkatkan & mendukung perekonomian Daerah dan Nasional saat berada pada situasi kritis.

Guna mendukung Perkembangan UMKM, Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi & kebijakan yang mendukung. (AL: Kemudahan dalam Biokrasi, Pemberian Modal usaha yang mudah & pelatihan-pelatihan).

E. UMKM Keripik Pisang Sinta di Bandar Lampung



Gambar 6.1. Toko Keripik Pisang Sinta

Toko keripik Sinta yang terletak di Gang PU, Jalan Pagar Alam, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat Lampung. Sinta menceritakan tentang bagaimana pengalaman dia dan proses dia dalam membangun usaha keripik pisang, dari modal awal, jatuh bangun usaha, merintis usaha, mengelola usaha sampai dititik sekarang yang sudah jauh lebih besar usaha keripik pisang Lampung tersebut. Jatuh bangun yang pernah dialami Sinta dalam membangun usaha menjadi salah satu alasan terbesarnya untuk terus berbagi ilmu. Belasan tahun yang lalu Sinta punya pengalaman berharga saat berjuang menyelamatkan usahanya yang hampir bangkrut.

Sinta sendiri sudah menjalani bisnis keripik pisang dari masih duduk dikelas 2 SMA pada tahun 2005. Saat itu, ia bertekad ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di tengah kesulitan ekonomi keluarganya. Ia memulai bisnis dengan membeli 1-2kg keripik dan mengemasnya dalam bungkus kecil. Keripik kemasan itu ia jual kembali seharga Rp. 1.000 perbungkus kepada teman-teman sekolahnya.

Keuntungan dari usaha kecil itu terus ia tabung untuk biaya kuliah di Universitas Lampung. Waktu itu Sinta harus pontang-panting membagi waktu kuliah dan menitipkan dagangan keripiknya

kewarung dan kantin. Ia juga mengikuti pelatihan cara pengolahan keripik pisang yang diadakan Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung dan mendapat kesempatan magang disalah satu pelaku usaha keripik pisang di Bandar Lampung yang telah lebih dahulu merintis.

Dari pengalaman itu Sinta melihat peluang bisnis keripik pisang di Lampung masih sangat terbuka. Sambil kuliah, ia mempelajari seluk-beluk usaha keripik pisang. Ia juga aktif kompetisi wirausaha untuk meningkatkan kapasitas dirinya.

Tahun 2007, Sinta pernah meraih peringkat ketiga saat mengikuti kompetisi wirausaha yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Setahun kemudian, ia kembali mengikuti Kompetisi Wirausaha Muda yang digelar Bank Mandiri dan berhasil meraih peringkat ketiga tingkat nasional. Dia mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 15 juta dan pelatihan pengembangan usaha kecil menjadi perusahaan selama enam bulan. Uang itu ia gunakan untuk mengembangkan usaha dan membuka toko. Untuk mencukupi kekurangan dana, Sinta memberanikan diri untuk meminjam modal usaha Rp 50 juta kepada Bank. Uang itu ia pakai untuk membangun toko dan modal usaha agar produksi keripiknya bisa lebih banyak. Beruntung, Sinta mendapat dukungan penuh dari Pemkot Bandar Lampung. Ia rutin mendapat pelatihan tentang pengolahan produk, pengemasan, hingga pemasaran digital. Ia juga mendapat bantuan peralatan untuk usaha, antara lain peralatan untuk menggoreng keripik dan alat pengering keripik pisang. Pemerintah juga mendampingi Sinta dalam mengurus berbagai dokumen perizinan usaha dan sertifikat usaha. Produknya juga sering dipromosikan dalam berbagai acara pameran di dalam kota dan di luar kota.

Sebagai pelaku UMKM yang sudah memiliki pengalaman, Sinta menjadi pembuka jalan pelaku usaha baru ketika mereka ingin berkomunikasi dengan dinas dan perbankan. Ia juga menunjukkan peluang pasar yang bisa diraih pelaku usaha baru. Saat ini, Sinta menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Keripik Pisang Bangiek. Ia

membantu pembantu pelaku UMKM yang ingin mendapat program peminjaman modal usaha dengan bunga nol persen yang digulirkan Pemkot Bandar Lampung.

Dengan program itu, pelaku usaha amat terbantu karena bisa mendapat pinjaman modal usaha dari perbankan tanpa bunga. Bunga pinjaman itu dibayarkan oleh pemerintah. Ia sangat paham, selain tekad dan kemauan pribadi, untuk mengembangkan usaha butuh dukungan, baik dari pemerintah, perbankan, maupun orang sekitar. Itu sebabnya ia ingin terus membangun ekosistem untuk mendukung pengembangan UMKM di Kota Bandar Lampung.

F. UMKM Ternak Ayam Kampung



Gambar 6.2. Ternak Ayam Kampung

Pak Hambali Pengusaha Ayam Kampung di Desa Muhajirun Negara Ratu Natar. Beternak ayam kampung di Desa Muhajirun merupakan salah satu sektor unggulan yang telah lama menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Ayam kampung dikenal dengan kualitas daging yang lebih kenyal dan rasa yang lebih gurih dibanding ayam ras, sehingga permintaan terhadap ayam kampung terus meningkat, baik di pasar lokal maupun regional.

1. Potensi Peternakan Ayam Kampung

Desa Muhajirun memiliki lahan yang cukup dan kondisi lingkungan yang mendukung untuk pengembangan peternakan ayam kampung secara alami. Selain itu, masyarakat desa yang sudah berpengalaman dalam beternak secara tradisional menjadikan produksi ayam kampung sebagai usaha yang relatif stabil.

Keunggulan Ayam Kampung:

- a. Kualitas Daging: Daging ayam kampung terkenal lebih kenyal, rendah lemak, dan memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan ayam broiler. Hal ini menjadikan ayam kampung lebih diminati konsumen yang mengutamakan kualitas rasa dan kesehatan.
- b. Harga Jual Tinggi: Ayam kampung umumnya memiliki harga jual yang lebih tinggi di pasar dibanding ayam ras atau broiler, terutama di kalangan konsumen yang mencari produk organik atau alami.
- c. Pemeliharaan nya Sederhana: Peternakan ayam kampung dapat dilakukan dengan metode semi intensif, di mana ayam dibiarkan mencari makan sendiri di lingkungan sekitar, dan diberi makanan dedeg dan pur serta sisa – sisa makanan, sehingga biaya pakan lebih rendah dibandingkan peternakan ayam ras.

2. Sistem Pemeliharaan

Di Desa Muhajirun, ayam kampung dipelihara secara tradisional dengan sistem semi intensif, di mana ayam dibiarkan bebas berkeliaran di sekitar pekarangan atau lahan terbuka untuk mencari makan sendiri secara alami, seperti biji-bijian, serangga, dan dedaunan tetap diberi makan tambahans eperti jagung rontok, dedeg, nasi –nasi sisa dilauri (dicampur) sedikit gabah padi gabah/menir.

Sistem Pemeliharaan:

- a. Kandang Ayam: Meskipun ayam kampung dibiarkan berkeliaran, peternak tetap menyediakan kandang

sederhana sebagai tempat berteduh dan berlindung pada malam hari atau saat hujan. Kandang biasanya dibuat dari bahan lokal seperti bambu atau kayu.

- b. Pakan: Selain makanan alami, peternak juga memberikan pakan tambahan seperti jagung giling, bekatul, atau dedak untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi telur ayam.
- c. Reproduksi: Ayam kampung di Desa Muhajirun biasanya dibiarkan berkembang biak secara alami. Dalam satu tahun, induk ayam bisa bertelur beberapa kali dan menghasilkan anak ayam yang dipelihara hingga dewasa.

3. Produksi Ayam Kampung

Ayam kampung yang diproduksi di Desa Muhajirun umumnya terdiri dari dua jenis: ayam kampung pedaging dan ayam kampung petelur. Kedua jenis ini memiliki potensi yang cukup besar untuk dipasarkan di wilayah sekitar, seperti pasar Natar dan warung makan yang menyajikan masakan ayam kampung.

Produksi Daging Ayam Kampung:

- a. Umur Panen: Ayam kampung biasanya dipanen pada umur 6-8 bulan, tergantung dari tujuan pemeliharaan, apakah untuk konsumsi daging atau untuk pembiakan lebih lanjut.
- b. Jumlah Produksi: Setiap peternak di Desa Muhajirun dapat memelihara puluhan hingga ratusan ekor ayam kampung, bila sudah besar dan layak untuk dijual, maka yang sebagian besar dijual dalam bentuk hidup(sistim borong) atau siap potong/ekor di pasar lokal.

Produksi Telur Ayam Kampung:

- a. Produksi Telur: Selain daging, beberapa peternak juga fokus pada produksi telur ayam kampung yang dikenal lebih sehat dan lebih kaya gizi. Telur ini biasanya dijual di pasar tradisional dan warung-warung di sekitar desa.
- b. Jumlah Telur: Produksi telur ayam kampung lebih rendah dibanding ayam ras petelur, namun harga jual telur ayam

kampung lebih tinggi karena dianggap lebih alami dan bebas bahan kimia.

4. Tantangan dan Kendala

- a. Penyakit Ayam: Salah satu tantangan utama dalam peternakan ayam kampung adalah risiko penyakit seperti tetelo (Newcastle Disease) dan flu burung. Tanpa pengelolaan yang baik, penyakit ini bisa menyebabkan kematian ayam dalam jumlah besar.
- b. Cuaca dan Lingkungan: Kondisi cuaca yang ekstrem, seperti musim hujan yang berkepanjangan, bisa mengganggu kesehatan ayam kampung, terutama jika kandang tidak cukup terlindung.
- c. Pasokan Pakan: Meskipun ayam kampung sebagian besar mencari makan sendiri, peternak tetap membutuhkan pakan tambahan untuk mempercepat pertumbuhan. Pasokan pakan yang mahal atau sulit diperoleh bisa menjadi kendala tersendiri.

5. Peluang Pengembangan

- a. Pengembangan Kandang Modern: Meningkatkan kualitas kandang dan sistem pemeliharaan yang lebih intensif, seperti menggunakan teknologi pengelolaan pakan dan air otomatis, dapat meningkatkan produktivitas ayam kampung.
- b. Pelatihan dan Penyuluhan: Penyuluhan dari dinas peternakan setempat mengenai manajemen kesehatan ternak dan pencegahan penyakit dapat membantu peternak mengatasi masalah penyakit dan meningkatkan hasil produksi.
- c. Pengolahan Produk: Selain menjual ayam hidup, peternak di Desa Muhajirun juga dapat mengembangkan produk olahan, seperti ayam kampung bakar, ayam kampung goreng, atau abon ayam kampung, untuk meningkatkan nilai tambah.

- d. Ekspansi Pasar: Meningkatkan akses pasar, baik ke kota-kota terdekat maupun ke pasar regional yang lebih luas, dapat membantu peternak ayam kampung di Desa Muhajirun Natar, untuk mendapatkan harga jual yang lebih baik.

Peternakan ayam kampung di Desa Muhajirun memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama karena tingginya permintaan terhadap daging dan telur ayam kampung yang berkualitas. Dengan pengelolaan yang lebih baik, peningkatan teknologi peternakan, dan perluasan pasar, sektor ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

G. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dan survey lapangan tentang UMKM dan usaha-usaha yang digeluti oleh rakyat Utamanya di Daerah Lampung adalah usaha UMKM bidang Usaha Keripik dan Usaha beternak Ayam kampung, dapat menyimpulkan bahwa:

1. Usaha UMKM adalah usaha yang sangat disenangi masyarakat pedesaan yang sudah turun menurun, dan berjalan dengan baik, namun masih tetap perlu pembinaan oleh pemerintah demi kemajuan dan pengembangan usaha kerakyatan yang mendukung perekonomian daerah dan nasional.
2. Pembinaan dan dukungan dari pemerintah dan pihak yang kemampuan (Aghnia/ pemilik modal) untuk memberikan dukungan (support) permodalan dan dana sangat diharapkan demi keberhasilan dan keberlangsungan dari usaha kerakyatan / UMKM sebagai aset kekayaan Bangsa.
3. Bila UMKM dapat berkembang dengan baik tentu akan mengangkat kesejahteraan rakyat, dengan demikian dapat mengangkat perekonomian dan martabat Bangsa.

BAB 6

KOPERASI DAN MODEL BISNIS BERBASIS GOTONG ROYONG

Koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan gotong royong. Dalam sistem koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat secara proporsional dari partisipasi. Konsep gotong royong, yang merupakan nilai luhur dalam budaya Indonesia, sangat cocok dengan prinsip dasar koperasi, karena keduanya menekankan pada kerjasama, saling membantu, dan pembangunan bersama.

Di tengah tantangan ekonomi global dan meningkatnya ketimpangan sosial, koperasi sebagai model bisnis berbasis gotong royong menawarkan solusi untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan kesejahteraan bersama, koperasi dan model bisnis gotong royong dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

A. Prinsip-prinsip Koperasi dan Gotong Royong

- 1. Prinsip Demokrasi Ekonomi** Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan, terlepas dari jumlah saham atau kontribusi modal. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama, bukan hanya kepentingan segelintir orang.
- 2. Bersifat Sukarela dan Terbuka** Koperasi pada prinsipnya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dan berpartisipasi. Tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Semua orang, terutama dari kalangan masyarakat marginal, memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari koperasi.
- 3. Keuntungan yang Dibagikan Secara Adil** Salah satu nilai utama koperasi adalah pembagian keuntungan yang adil berdasarkan kontribusi anggota. Keuntungan yang diperoleh oleh koperasi tidak hanya menjadi hak para pemilik modal

besar, tetapi juga diberikan kepada anggota sesuai dengan partisipasi, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun modal.

4. **Gotong Royong sebagai Nilai Inti** Gotong royong atau kerjasama adalah prinsip yang menjadikan koperasi berbeda dari jenis bisnis lainnya. Dalam koperasi, anggota bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, saling membantu dalam memecahkan masalah, dan mendukung kesejahteraan bersama.

B. Koperasi sebagai Model Bisnis Berbasis Gotong Royong

Model bisnis koperasi memiliki banyak kesamaan dengan prinsip gotong royong. Keduanya berfokus pada kepentingan bersama dan pembagian manfaat secara adil. Beberapa karakteristik koperasi yang sejalan dengan model gotong royong antara lain:

1. **Sumber Daya yang Digunakan Bersama** Dalam koperasi, sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan fasilitas digunakan bersama oleh semua anggota. Ini memungkinkan efisiensi yang lebih baik dan mengurangi pemborosan sumber daya. Selain itu, koperasi seringkali berfokus pada pemanfaatan sumber daya lokal, yang turut mendukung perekonomian daerah.
2. **Manfaat untuk Semua Anggota** Koperasi mengutamakan keuntungan yang merata bagi seluruh anggota, bukan hanya pemilik modal besar. Pembagian hasil keuntungan yang adil menjadi salah satu bentuk nyata dari gotong royong, di mana setiap orang mendapat manfaat sesuai dengan kontribusinya.
3. **Peran Aktif Masyarakat** Gotong royong dalam koperasi bukan hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya, tetapi juga pada peran aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan koperasi. Ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap perkembangan koperasi itu sendiri.

4. **Mendorong Inovasi dan Pemberdayaan** Dalam koperasi, inovasi sering kali muncul melalui kerjasama antar anggota yang memiliki keahlian berbeda. Selain itu, koperasi juga memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk mengembangkan keterampilan dan memperluas jaringan, yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

C. Keunggulan Koperasi dan Model Bisnis Gotong Royong

1. **Meningkatkan Kemandirian Ekonomi** Koperasi yang berbasis pada gotong royong memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengelola dan mengembangkan usaha secara bersama-sama. Hal ini meningkatkan kemandirian ekonomi di tingkat individu dan komunitas, serta mengurangi ketergantungan pada pihak luar atau pasar yang tidak berpihak pada kepentingan lokal.
2. **Pemberdayaan Masyarakat** Koperasi mampu memberdayakan masyarakat lokal, terutama yang berada dalam kelompok marginal atau terpinggirkan. Melalui koperasi, masyarakat mendapatkan akses ke modal, pelatihan, pasar, dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau.
3. **Pemberantasan Kemiskinan** Koperasi dengan prinsip gotong royong dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan akses ke layanan keuangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembagian keuntungan yang merata.
4. **Ketahanan Sosial dan Ekonomi** Koperasi memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, karena anggota merasa lebih aman dan terlindungi dalam sebuah organisasi yang berbasis pada kerjasama. Koperasi sering kali dapat bertahan di tengah krisis ekonomi, karena lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebutuhan anggota.

D. Tantangan dalam Menerapkan Koperasi Berbasis Gotong Royong

1. **Kurangnya Pemahaman tentang Koperasi** Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip dan keuntungan koperasi. Kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang koperasi menghambat potensi koperasi untuk berkembang, terutama di daerah-daerah terpencil.
2. **Masalah Manajerial dan Kepemimpinan** Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada manajemen dan kepemimpinan yang efektif. Dalam beberapa kasus, koperasi menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan yang profesional dan transparansi, yang dapat menghambat pertumbuhannya.
3. **Akses Pembiayaan yang Terbatas** Banyak koperasi yang kesulitan mendapatkan pembiayaan yang memadai untuk pengembangan usaha. Padahal, pembiayaan yang tepat dapat mendukung inovasi dan ekspansi koperasi, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
4. **Persaingan dengan Bisnis Konvensional** Koperasi yang berbasis gotong royong kadang kesulitan bersaing dengan perusahaan besar atau bisnis konvensional yang memiliki modal lebih besar dan akses pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, koperasi perlu lebih inovatif dalam mengelola dan memasarkan produknya.

E. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Peran Koperasi dalam Ekonomi Masyarakat

1. **Pendidikan dan Pelatihan Anggota Koperasi:** Pendidikan yang berkelanjutan mengenai prinsip koperasi, manajemen usaha, serta keterampilan teknis sangat penting untuk meningkatkan kapasitas anggota koperasi. Anggota yang

terampil dan teredukasi akan lebih mampu berkontribusi dalam pengelolaan koperasi.

2. **Peningkatan Akses ke Pembiayaan:** Pemerintah dan lembaga keuangan dapat berperan dalam menyediakan fasilitas pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh koperasi, termasuk fasilitas pinjaman dengan bunga rendah atau penyediaan dana bergulir yang dapat digunakan untuk pengembangan usaha koperasi.
3. **Kolaborasi Antar Koperasi dan Sektor Lain:** Koperasi dapat memperkuat posisinya dengan melakukan kolaborasi dengan sektor lain, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan fasilitas pelatihan, akses ke pasar, dan sumber daya lainnya yang dapat memperkuat daya saing koperasi.

F. Sinergi antara Koperasi dan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan koperasi dan menjadikannya sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat:

1. **Pemberian Fasilitas Pembiayaan yang Aksesibel:** Pemerintah dapat memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi, terutama koperasi yang berada di daerah terpencil atau memiliki potensi ekonomi yang besar namun terkendala oleh keterbatasan modal. Kredit usaha rakyat (KUR) atau program bantuan pemerintah lainnya dapat diakses oleh koperasi untuk meningkatkan modal kerja dan memperbesar kapasitas usaha.
2. **Bantuan dalam Infrastruktur dan Teknologi:** Pemerintah dapat mendukung koperasi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti akses internet cepat, tempat pelatihan,

serta fasilitas logistik untuk distribusi produk. Dengan infrastruktur yang lebih baik, koperasi akan lebih mudah mengakses pasar, baik pasar lokal maupun internasional.

3. **Sosialisasi dan Pendidikan kepada Masyarakat:** Sosialisasi yang lebih intensif mengenai koperasi dan keuntungan bergabung dengan koperasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat koperasi. Pemerintah, melalui kementerian terkait, dapat menyelenggarakan seminar, workshop, dan kampanye yang menjelaskan pentingnya koperasi dalam ekonomi kerakyatan.
4. **Regulasi yang Mendukung:** Pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang mendukung keberadaan koperasi, termasuk aturan yang mempermudah pendirian koperasi, pengelolaan koperasi yang transparan, serta pengawasan yang memadai. Kebijakan yang menguntungkan koperasi akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk bergabung dan mengembangkan koperasi di daerah masing-masing.
5. **Kolaborasi dengan Sektor Swasta:** Pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara koperasi dan sektor swasta dalam rangka peningkatan daya saing. Misalnya, sektor swasta dapat bekerja sama dengan koperasi dalam hal penyediaan bahan baku, distribusi, atau promosi produk-produk koperasi. Kolaborasi ini dapat memperluas jaringan pasar koperasi dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.\

G. Inovasi dalam Pengelolaan Koperasi Berbasis Gotong Royong

Agar koperasi tetap relevan dan mampu bersaing dalam dunia yang terus berkembang, inovasi dalam pengelolaan koperasi sangat diperlukan. Berikut adalah beberapa ide inovasi yang dapat diterapkan dalam koperasi:

1. **Model Koperasi Berbasis Teknologi:** Seiring dengan perkembangan teknologi, koperasi dapat menggunakan aplikasi

berbasis digital untuk mempercepat proses transaksi dan mempermudah komunikasi antar anggota. Misalnya, koperasi dapat mengembangkan aplikasi untuk memonitor transaksi jual-beli, pembagian hasil, dan laporan keuangan secara real-time, yang memudahkan anggota dalam berpartisipasi aktif.

2. **Koperasi Berbasis Green Economy:** Koperasi dapat mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau (green economy) dengan mengembangkan usaha yang ramah lingkungan. Misalnya, koperasi yang bergerak di bidang pertanian dapat mengembangkan sistem pertanian organik, atau koperasi yang bergerak di bidang energi dapat memanfaatkan sumber energi terbarukan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi anggota koperasi, tetapi juga bagi lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
3. **Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan dan Pendidikan:** Koperasi dapat memperluas cakupan layanan dengan menyediakan akses kepada anggota untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau atau fasilitas pendidikan. Misalnya, koperasi dapat bekerja sama dengan rumah sakit atau lembaga pendidikan untuk menyediakan layanan tersebut bagi anggota dengan harga yang lebih terjangkau.
4. **Meningkatkan Jaringan dan Kolaborasi Antar Koperasi:** Koperasi juga dapat berkolaborasi dengan koperasi lainnya, baik dalam bentuk jaringan koperasi lokal maupun koperasi nasional. Kolaborasi ini akan memperkuat posisi koperasi dalam menghadapi tantangan pasar dan membuka peluang untuk memperoleh sumber daya, pasar, dan teknologi yang lebih besar.

Koperasi sebagai model bisnis berbasis gotong royong menawarkan banyak keuntungan bagi masyarakat, terutama dalam hal menciptakan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan kesejahteraan. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, dengan pemahaman yang baik tentang prinsip koperasi, manajemen yang efektif, dan dukungan dari pemerintah

serta lembaga keuangan, koperasi dapat berkembang pesat dan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari budaya gotong royong, koperasi bisa menjadi jalan menuju kemajuan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Koperasi berbasis gotong royong memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian masyarakat, menciptakan pemerataan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan prinsip-prinsip dasar yang mengedepankan solidaritas, demokrasi, dan keadilan, koperasi dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan lokal. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, koperasi perlu berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga lainnya. Jika koperasi dikelola dengan baik dan didukung oleh kebijakan yang tepat, koperasi akan menjadi fondasi kuat bagi kemandirian ekonomi masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua pihak.

BAB 7

**PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
SEBAGAI FONDASI
KEMANDIRIAN NASIONAL**

Desa adalah sumber daya vital bagi ketahanan pangan, industri kreatif, dan stabilitas sosial ekonomi. Tanpa pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa, kesenjangan ekonomi akan semakin lebar, menghambat pertumbuhan nasional secara berkelanjutan. Pembangunan berbasis perdesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan perdesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik geografis, pola kegiatan usaha, pola keterkaitan ekonomi desa-kota serta kelembagaan desa. Didukung pemberdayaan ekonomi desa melalui inovasi, investasi dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal, Indonesia dapat membangun ekosistem ekonomi yang mandiri, berdaya saing dan tahan terhadap krisis global. Oleh karena itu menyoroti pentingnya pembangunan ekonomi desa bukan hanya sebuah urgensi, tetapi juga strategi jangka panjang dengan upaya perbaikan secara terencana dengan menyentuh kehidupan masyarakat di perdesaan dan mengelola sumber daya lokal yang tersedia melalui *collective action* dan *networking* dalam mewujudkan kemandirian nasional yang sesungguhnya.



Gambar 8.1 Kemandirian desa menuju Pembangunan Berkelanjutan
Sumber : Garuda Indonesia

A. Desa Sebagai Subyek Pembangunan

Desa bukan lagi hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai pelaku utama dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di wilayahnya. Pemerintah desa dan masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban untuk merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal hal ini untuk mewujudkan kemandirian desa yang didorong melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Desa adalah bagian pemerintahan terkecil yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Desa menjadi pusat aktivitas sosial, bisnis, dan budaya yang unik sebagai tempat tinggal sebagian besar penduduk. Kehidupan di desa biasanya lebih sederhana dibandingkan di kota, dan orang-orang masih hidup berdasarkan kebiasaan gotong royong dan kebersamaan. Gotong royong bisa menjadi perekat masyarakat ditengah-tengah ketergerusan budaya Indonesia (Bagas & Radjab, 2019)

Desa-desanya di Indonesia memiliki ciri unik dan beragam yang mencerminkan keanekaragaman sosial, budaya, dan geografis masyarakatnya. Desa di Indonesia memiliki ciri utama yaitu ketergantungan pada pertanian, perikanan, atau perkebunan sebagai mata pencaharian utama. Sebagian besar desa memiliki lahan yang luas dengan sistem pertanian tradisional yang telah diwariskan. Di pedesaan, penggunaan lahan didominasi oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan, yang memiliki luas lahan terbuka untuk aktivitas produksi pangan. Selain itu, terdapat hutan, lahan hijau, dan permukiman yang lebih tersebar dibandingkan di kota-kota. Di daerah pedesaan, infrastruktur biasanya kurang, dengan jalan yang lebih sempit dan fasilitas umum yang lebih sedikit. Selain itu, kondisi alam, seperti kesuburan tanah dan ketersediaan air, mempengaruhi jenis tanaman atau usaha tani yang dikembangkan oleh masyarakat setempat.

Keanekaragaman desa di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kondisi geografis dan topografi, yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Desa di pesisir lebih cenderung berfokus pada industri kelautan dan perikanan, sementara desa di daerah pegunungan biasanya memiliki pola pemukiman yang tersebar dengan rumah-rumah yang dibangun mengikuti kontur tanah. Selain itu, ada juga desa adat yang tetap mengikuti tradisi dan hukum adat, seperti Desa Baduy di Banten atau Desa Tenganan di Bali. Tradisi dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi masih menjadi bagian penting dari budaya desa. Kehidupan sehari-hari terus melibatkan sistem sosial yang berbasis kekeluargaan, upacara adat, dan kesenian rakyat. Desa juga sering memiliki kearifan lokal yang kuat, seperti pola bertani yang sesuai musim atau cara membangun rumah yang ramah lingkungan. Tradisi ini membuat desa menjadi tempat pelestarian budaya yang semakin jarang di zaman sekarang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia memiliki ciri unik yang dipengaruhi oleh faktor budaya, lingkungan, dan sejarahnya.

B. Konsep Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Konsep ini menjadi paradigma dalam Undang-Undang Desa, yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan berfokus pada menjadikan desa sebagai entitas yang memiliki otonomi, kemandirian, lokalitas, dan partisipasi. Tujuan pembangunan desa adalah untuk menjadikan desa sebagai dasar penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan masyarakat, dan menjadikan desa mandiri.



Gambar 8.2. Tujuan Pembangunan Desa

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. UU Desa merupakan instrumen untuk membangun visi kemandirian Desa dengan cara meningkatkan kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat (Sanur, 2023).

Konsep "Membangun desa" dapat dianggap sebagai pengejawantahan dari berbagai teori pembangunan perdesaan (pembangunan perdesaan) yang lebih dikenal dalam literatur akademik. Konsep ini menganggap desa dan pembangunan yang dilakukan di dalamnya termasuk dalam pembangunan perdesaan. Desa didirikan untuk memperkuat wilayah yang dapat menyangga atau menyokong kehidupan kota serta menyediakan hasil pertanian dan bahan baku lainnya (*hinterland*).

Menurut KepmenDesa PDTT No. 48 Tahun 2018 adalah untuk mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien serta pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif & peka terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pendekatan inovatif dalam pemberdayaan masyarakat desa mendorong partisipasi aktif warga dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pengelolaan

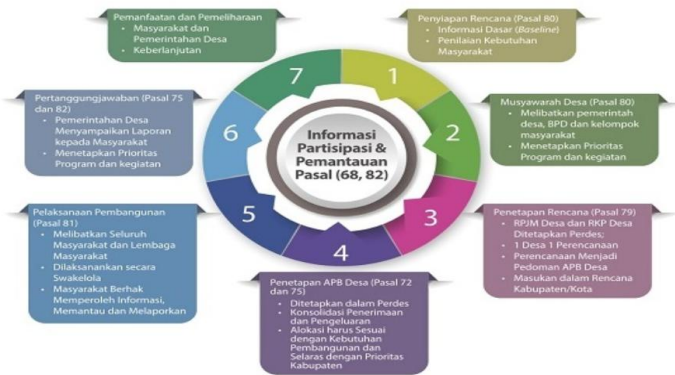
sumber daya desa, peningkatan ekonomi lokal, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dengan demikian, KepmenDesa PDTT No. 48 Tahun 2018 menjadi landasan strategis dalam menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

C. Proses Pembangunan Desa

Proses pembangunan desa adalah upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian lingkungan. Pembangunan ini melibatkan perencanaan yang partisipatif, di mana pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait bekerja sama dalam mengidentifikasi kebutuhan serta merancang solusi yang sesuai dengan potensi lokal. Proses pembangunan desa di Indonesia meliputi tiga tahapan utama:

1. **Perencanaan:** Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan.
2. **Pelaksanaan:** Kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan, mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fisik dan non-fisik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. **Pengawasan dan Pertanggungjawaban:** BPD dan masyarakat mengawasi pelaksanaan pembangunan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui musyawarah desa.

SIKLUS PEMBANGUNAN DESA



Gambar 8.3. Siklus Pembangunan Desa

Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi desa agar dapat mencapai keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat yaitu :

1. *Adanya pemerintahan yang baik.* Dalam hal ini pemerintah desa harus memiliki visi yang jelas, transparan, akuntabel, serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. *Infrastruktur yang memadai.* Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memudahkan akses masyarakat ke berbagai layanan dan aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu desa perlu untuk menciptakan infrastruktur yang memadai seperti jalan, air bersih, listrik, internet dan lainnya sesuai kebutuhan desanya.
3. *Pendidikan dan kesehatan yang baik.* Pendidikan dan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa serta akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang.
4. *Pemberdayaan masyarakat.* Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, serta akses pasar untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat di desa.

5. *Pengembangan ekonomi lokal.* Pengembangan ekonomi lokal dilakukan untuk meningkatkan potensi usaha desa. Misalnya dalam pertanian, usaha kecil dan menengah maupun pariwisata desa.
6. *Perlindungan lingkungan.* Perlindungan lingkungan yang baik agar keberlangsungan hidup masyarakat di desa dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta mengurangi terjadinya risiko bencana alam.
7. *Keamanan dan ketertiban.* Keamanan dan ketertiban adalah faktor penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan desa yang maju dan berkembang demi kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial di desa.

D. Pembangunan Desa Berbasis Komoditas Unggulan

Pembangunan desa berbasis komoditas unggulan tidak dapat berjalan tanpa adanya kebijakan yang mendukung dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan yang efektif harus mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan strategis, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan infrastruktur dan teknologi. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi dan program, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola potensi lokalnya. Selain itu, program seperti Dana Desa berperan penting dalam mendukung pengembangan komoditas unggulan di desa. Dana Desa memungkinkan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) guna mengurangi kemiskinan (Nurjhadi et al., 2019)

Dalam implementasinya, kebijakan pembangunan desa berbasis komoditas unggulan harus terintegrasi dengan kebijakan sektor lainnya, seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah. Pemerintah sering kali mengeluarkan regulasi yang mendorong penguatan ekosistem ekonomi desa, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan akses permodalan bagi petani dan

pelaku usaha kecil meskipun peran KUR dalam meningkatkan pendapatan petani mungkin terbatas, karena penerimanya tidak selalu menggunakan dana tersebut secara eksklusif untuk kegiatan pertanian (Hafsah et al., 2019). Selain itu, adanya program pendampingan teknis dari dinas terkait, seperti penyuluhan pertanian dan pelatihan pengelolaan usaha, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola komoditas unggulan mereka.

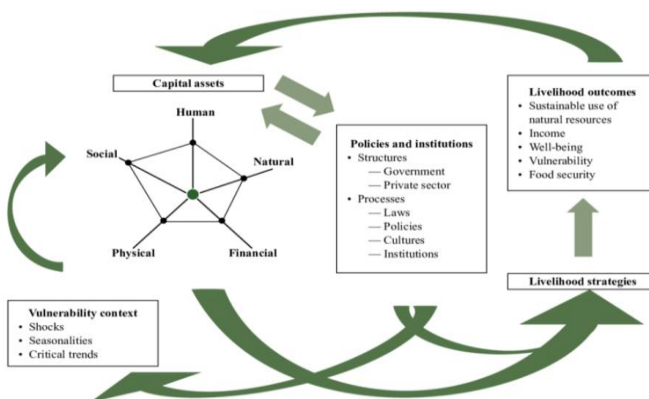
Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan keterbatasan sumber daya manusia di desa. Banyak desa yang belum memiliki perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat, sehingga pemilihan komoditas unggulan sering kali kurang tepat sasaran. Selain itu, birokrasi yang rumit dalam mengakses bantuan atau permodalan juga menjadi kendala yang perlu disederhanakan agar masyarakat desa lebih mudah dalam mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Secara teratur, evaluasi dan penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan dengan baik. Untuk mendorong inovasi dalam pengembangan komoditas unggulan, pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga penelitian. Selain itu, desentralisasi kebijakan harus terus diperkuat untuk memberi desa lebih banyak ruang untuk berinovasi dan mengembangkan ekonomi lokal. Pembangunan desa berdasarkan komoditas unggulan dapat menjadi strategi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan kebijakan yang tepat.

E. Strategi Pengembangan Ekonomi Menuju Kemandirian Desa

Dalam pengembangan desa, konsep *natural capital* mengacu pada pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam sebagai sumber daya penting yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sumber daya seperti hutan, tanah, air, dan keanekaragaman hayati dapat meningkatkan ekonomi desa melalui pertanian, ekowisata, dan industri berbasis lingkungan. Desa dapat mempertahankan keseimbangan ekologi, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang melalui pengelolaan kekayaan alam dengan menyeimbangkan penggunaan dan pelestarian sumber daya alam. Kerangka kerja *natural capital* menghubungkan perspektif ekologi dan ekonomi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efisien dan adil secara berkelanjutan (Bateman & Mace, 2020).

Kehidupan masyarakat dengan tujuan yang beragam, tidak hanya memperoleh pendapatan yang tinggi namun meningkatkan pendidikan dan kesehatan serta mengurangi kerentanan dan resiko. *Sustainable Livelihood Approach* menekankan pada aset-aset masyarakat untuk penghidupan berkelanjutan melalui *natural capital*, *infrastructure*, *capital*, *human capital*, *financial capital* dan *social capital* yang saling melengkapi untuk meningkatkan ketahanan sosial ketika terjadi guncangan terhadap sistem penghidupan.



Gambar 8.4. Sustainable Livelihood Approach

Namun pendekatan ini masih sangat normatif dari konsep pembangunan berkelanjutan. Kelimpahan sumber daya suatu negara seringkali justru menjerumuskan negara dalam jurang kemiskinan dirujuk dari banyak negara yang kaya sumber daya tidak menjamin negara tersebut menjadi makmur (Sach & Warner, 1995).

Komitmen membangun Indonesia dari wilayah pinggiran dengan memaknai kerangka dan filosofis kebangkitan desa. Implementasi perencanaan desa dalam pelaksanaan UU Desa secara konsisten dan terarah sebagai *prototipe* imajinasi tentang desa baru yang mengarah pada perubahan desa berkelanjutan pada masa depan dengan tumbuhnya kemandirian desa yang kuat dengan kebijakan pembangunan dan desentralisasi yang responsif terhadap desa.

Strategi menuju kemandirian desa dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif warga desa dalam pembangunan. Salah satu pendekatan utama adalah penguatan modal sosial, yang mencakup peningkatan kepercayaan, jaringan sosial, serta norma dan nilai yang mendukung kerja sama di tingkat lokal (Putnam, 1993). Dengan mengembangkan modal sosial, masyarakat desa dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada, baik melalui usaha ekonomi berbasis komunitas maupun penguatan kelembagaan desa. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa juga penting untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal (Chambers, 1997).

Indeks pengukur pembangunan desa mandiri, tidak terlepas dari Indeks Pembangunan Desa (IDP) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menggambarkan tingkat kemajuan desa pada suatu waktu dengan menggunakan lima dimensi pengukuran yaitu dimensi ketersediaan pelayanan dasar, dimensi kondisi infrastruktur, dimensi aksesibilitas/transportasi, dimensi pelayanan umum, dan dimensi

penyelenggaraan pemerintahan (Sanur, 2023). IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi untuk mensejahterakan kehidupan desa. Beberapa dimensi dalam IDM adalah :

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari :
 - a. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
 - b. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
 - c. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
 - d. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari:
 - a. Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah);
 - b. Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi;
 - c. Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Strategi pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas individu dan kelompok, serta peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan informasi. Salah satu strategi yang efektif adalah pemberian pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan untuk mendukung berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (Todaro & Smith, 2015). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk lokal dapat meningkatkan daya saing ekonomi desa dan memperluas jangkauan pasar.

Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan juga berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung kemandirian desa, seperti melalui program dana desa yang dikelola secara transparan, akuntabel dan partisipasi masyarakat (Betan & Nugroho, 2021) Dengan kombinasi pendekatan yang tepat dan strategi pemberdayaan yang komprehensif, desa dapat menjadi entitas yang lebih mandiri dan berdaya dalam menghadapi tantangan pembangunan.

BAB 8

EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi lokal atau *Local Economic Development* (LED) merupakan strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi yang lebih mandiri serta berkelanjutan. LED berfokus pada pemanfaatan sumber daya lokal—alam, manusia, dan kelembagaan—untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Pendekatan ini sejalan dengan ekonomi kerakyatan yang menekankan kemandirian ekonomi berbasis komunitas, pemerataan kesejahteraan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses ekonomi (Blakely & Leigh, 2013).

Ekonomi kerakyatan bertujuan memperkuat daya saing masyarakat lokal, mengurangi ketimpangan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. LED dan ekonomi kerakyatan muncul sebagai respons terhadap ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan, di mana investasi dan industri cenderung terkonsentrasi di perkotaan, sementara daerah pedesaan masih bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam seperti pertanian dan perikanan (Rodríguez-Pose, 2013). Oleh karena itu, LED menjadi solusi dengan mendorong pengelolaan sumber daya lokal secara mandiri untuk menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Selain pertumbuhan ekonomi, LED juga menekankan keberlanjutan dan kemandirian masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan partisipasi aktif masyarakat dalam produksi dan distribusi ekonomi, yang juga merupakan inti dari ekonomi kerakyatan (Mahanani et al., 2021). Contohnya, ekowisata berbasis komunitas tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat peran mereka dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, LED memperkuat ekonomi berbasis masyarakat sebagai pilar utama perekonomian daerah.

Strategi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal menjadi pendekatan yang tepat dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan karena menekankan pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki

masyarakat. Melalui pengembangan industri berbasis komunitas, LED memungkinkan masyarakat memiliki kendali lebih besar atas aset ekonomi mereka, mengurangi ketergantungan pada modal eksternal, serta meningkatkan daya saing daerah (Pike et al., 2016). Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Implementasi LED menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam ekonomi kerakyatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Banyak pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan pinjaman akibat keterbatasan jaminan serta rendahnya literasi keuangan (Rozikin et al., 2020). Hal ini menghambat pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Selain modal, rendahnya keterampilan tenaga kerja menjadi kendala dalam pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal. Tenaga kerja lokal harus memiliki keterampilan yang cukup untuk beradaptasi dengan pasar dan mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah (Rodríguez-Pose, 2013). Namun, banyak daerah masih memiliki keterbatasan dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga potensi ekonomi lokal belum optimal. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan vokasional, pelatihan usaha, serta literasi digital sangat diperlukan guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Keterbatasan infrastruktur juga menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan. Di daerah pedesaan, keterbatasan akses transportasi, listrik, dan internet menghambat distribusi produk lokal ke pasar lebih luas (Pike et al., 2016). Minimnya penetrasi digital menyebabkan UMKM kesulitan memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar mereka. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang merata sangat penting

dalam mendukung ekonomi lokal dan memperkuat ekonomi kerakyatan yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan yang berpihak pada ekonomi lokal dan ekonomi kerakyatan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang mendukung usaha berbasis sumber daya lokal, seperti penyederhanaan perizinan UMKM, insentif bagi industri lokal, serta subsidi bagi usaha berkelanjutan (Rozikin et al., 2020). Selain itu, penguatan kelembagaan lokal, seperti koperasi dan kelompok usaha bersama (KUB), juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Dengan kebijakan yang tepat, LED dapat berkembang lebih efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Dengan memahami peluang dan tantangan implementasi LED, diperlukan strategi sistematis agar konsep ini dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai konteks ekonomi berbasis sumber daya lokal. LED bukan sekadar strategi pembangunan ekonomi, tetapi juga bagian integral dari ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal, LED dapat menjadi solusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

B. Konsep Dasar Pembangunan Ekonomi Lokal

Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED) adalah pendekatan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dengan mengoptimalkan sumber daya lokal. Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, LED menekankan inklusivitas, keberlanjutan, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti komunitas, sektor swasta, dan pemerintah (Blakely & Leigh, 2013). Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap model pembangunan ekonomi konvensional yang sering bergantung pada investasi eksternal dan

menciptakan ketimpangan antarwilayah (Rodríguez-Pose, 2013). LED memungkinkan daerah untuk membangun ekonomi mandiri, mengurangi ketergantungan pada modal luar, dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

Karakteristik Utama LED

Beberapa karakteristik utama LED yang membedakannya dari model pembangunan lainnya adalah:

1. Berdasarkan Potensi Lokal – LED mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam, manusia, maupun kelembagaan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Blakely & Leigh, 2013).
2. Inklusif dan Partisipatif – Melibatkan masyarakat sebagai aktor utama untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan pembangunan ekonomi (Rodríguez-Pose, 2013; Mahanani et al., 2021).
3. Keberlanjutan – Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan sosial (Pike et al., 2016; Mihayo & Peng, 2020).
4. Berkelanjutan dalam Jangka Panjang – Mengurangi ketergantungan pada investasi eksternal dan memperkuat daya saing ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor usaha dan pengembangan UMKM (Rodríguez-Pose, 2013; Rozikin et al., 2020).

Teori *place-based development* menekankan bahwa kebijakan LED harus mempertimbangkan faktor geografis, sosial, dan budaya daerah agar lebih efektif (Pike et al., 2016).

Model dan Pendekatan dalam LED

Implementasi LED sangat bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing wilayah. Model utama yang sering digunakan dalam LED meliputi:

1. Model Top-Down vs. Bottom-Up

- *Top-Down*: Kebijakan dari pemerintah pusat atau lembaga eksternal yang sering kurang mempertimbangkan kebutuhan lokal. Efektif dalam investasi infrastruktur tetapi dapat menciptakan ketimpangan (Rodríguez-Pose, 2013).
 - *Bottom-Up*: Menekankan inisiatif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal. Fleksibel dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang (Acs & Armington, 2006; Blakely & Leigh, 2013).
2. Pendekatan Berbasis Sumber Daya
 - Memanfaatkan keunggulan komparatif daerah, seperti sumber daya alam dan tenaga kerja berkualitas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Pike et al., 2016).
 - Keberhasilan model ini terlihat di Jepang dengan pemanfaatan energi biomassa dan di Indonesia melalui pengembangan agroindustri (Hayashi et al., 2017; Kurniawan, 2022).
 3. Pendekatan Kluster Industri Lokal
 - Diperkenalkan oleh Michael Porter (1998), pendekatan ini bertujuan meningkatkan daya saing daerah melalui pembentukan jaringan usaha dalam sektor industri tertentu.
 - Contoh penerapan di Indonesia adalah industri kopi di Sumatera dan kerajinan di Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan daya saing produk lokal (Mahanani et al., 2021).

Peran Pemangku Kepentingan dalam LED

Keberhasilan LED ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan institusi pendidikan (Blakely & Leigh, 2013).

1. Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Infrastruktur Dasar – Jalan, listrik, air bersih, dan internet sangat penting untuk mendukung UMKM dan distribusi produk lokal (Pike et al., 2016).

- Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan – Program pelatihan membantu tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan global (Rodríguez-Pose, 2013).
 - Insentif untuk UKM – Penyederhanaan perizinan, keringanan pajak, dan pembiayaan berbunga rendah mendorong pertumbuhan usaha lokal (Rozikin et al., 2020).
2. Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil
 - Sebagai penggerak utama dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, seperti pertanian, perikanan, dan ekowisata (Mihayo & Peng, 2020).
 - Program berbasis masyarakat lebih mudah diterima dan bertahan lama karena adanya rasa kepemilikan yang tinggi (Blakely & Leigh, 2013).
 3. Sektor Swasta dan Kemitraan Publik-Swasta (PPP)
 - Penyedia modal dan investasi untuk membantu usaha kecil berkembang (Zvikonyaukwa et al., 2023).
 - Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal (Zvikonyaukwa et al., 2023).
 4. Institusi Pendidikan dan Riset
 - Mengembangkan teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas sektor ekonomi lokal (Hayashi et al., 2017).
 - *Knowledge transfer* melalui pelatihan dan seminar membantu masyarakat lokal mengelola usaha mereka dengan lebih baik (Hayashi et al., 2017).

Dengan sinergi antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, dan institusi pendidikan, LED dapat diterapkan secara efektif untuk menciptakan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

C. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal bertujuan menciptakan ekonomi daerah yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. Local Economic Development (LED) menekankan optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi daerah (Blakely & Leigh, 2013). Keberhasilan LED bergantung pada empat elemen utama: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan infrastruktur ekonomi.

1. Sumber Daya Alam: Pilar Utama Ekonomi Lokal

Sumber daya alam berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan ekowisata (Mihayo & Peng, 2020). Namun, eksploitasi berlebihan dapat merusak lingkungan dan menghambat keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengelolaan berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, serta inovasi produk diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor berbasis sumber daya alam (Pike et al., 2016).

- Sektor Pertanian dan Agroindustri – Diversifikasi tanaman bernilai ekonomi tinggi serta penerapan teknologi pertanian presisi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan (Rodríguez-Pose, 2013).
- Sektor Perikanan dan Kehutanan – Pengelolaan berbasis ekosistem serta modernisasi rantai pasok (misalnya melalui *cold storage*) dapat meningkatkan daya saing produk perikanan dan kehutanan lokal (Hayashi et al., 2017).
- Sektor Ekowisata dan Konservasi – Ekowisata berbasis komunitas dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sambil menjaga keseimbangan ekologi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata dan penerapan standar keberlanjutan sangat penting (Zvikonyaukwa et al., 2023).

2. Sumber Daya Manusia: Kunci Daya Saing dan Inovasi

Keberhasilan LED sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola potensi ekonomi secara produktif dan inovatif (Rodríguez-Pose, 2013). Tantangan utama adalah rendahnya keterampilan tenaga kerja dan kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan dan pendidikan menjadi prioritas dalam strategi LED (Pike et al., 2016).

- Pengembangan Keterampilan Tenaga Kerja Lokal – Pelatihan vokasional dan inkubator bisnis dapat membantu tenaga kerja lokal meningkatkan keterampilan dalam industri pertanian, perikanan, dan pariwisata (Mahanani et al., 2021).
- Peningkatan Literasi Digital – Adaptasi teknologi digital membantu pelaku usaha lokal menjangkau pasar yang lebih luas melalui e-commerce dan pemasaran digital (Hayashi et al., 2017).
- Peran Kelembagaan dalam Pembangunan Ekonomi Lokal – Pemerintah daerah, koperasi, dan asosiasi bisnis perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha berbasis sumber daya lokal (Pike et al., 2016).

3. Sumber Daya Finansial: Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Ketersediaan modal dan akses terhadap investasi berperan penting dalam mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja (Rozikin et al., 2020). Tantangan utama adalah keterbatasan akses ke modal bagi usaha kecil.

- Pembiayaan Mikro dan Skema Kredit – Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta model pembiayaan berbasis komunitas seperti koperasi dan *crowdfunding* memberikan akses modal bagi usaha kecil (Rodríguez-Pose, 2013).
- Kemitraan Publik-Swasta (PPP) – Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta mempercepat pembangunan

infrastruktur dan proyek ekonomi berbasis sumber daya lokal (Pike et al., 2016).

4. Infrastruktur Ekonomi: Pendukung Efisiensi dan Akses Pasar

Infrastruktur fisik dan digital mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi rantai pasok dan akses pasar (Hayashi et al., 2017).

- Peningkatan Infrastruktur Transportasi dan Logistik – Pembangunan jalan, pusat distribusi, dan sistem logistik yang efisien dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk lokal (Pike et al., 2016).
- Ekspansi Infrastruktur Digital – Akses internet yang lebih luas mendukung transformasi digital UMKM dan mempermudah pemasaran produk lokal melalui platform digital (Rodríguez-Pose, 2013).

Dengan sinergi antara sumber daya alam, manusia, finansial, dan infrastruktur yang dikelola secara optimal, LED dapat menciptakan ekonomi lokal yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Tantangan dan Strategi Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal (*Local Economic Development* - LED) bertujuan menciptakan ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal, baik dari aspek sumber daya alam, manusia, kelembagaan, maupun infrastruktur (Blakely & Leigh, 2013). LED tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga mengurangi ketimpangan sosial serta memperkuat kendali masyarakat terhadap ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada investasi eksternal (Rodríguez-Pose, 2013).

Meskipun berpotensi besar, implementasi LED sering menghadapi kendala seperti akses modal yang terbatas, keterampilan tenaga kerja yang rendah, infrastruktur yang kurang memadai, kebijakan yang kurang mendukung, serta minimnya inovasi dan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya lokal (Blakely & Leigh, 2013). Oleh karena itu, strategi yang tepat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini agar LED dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat (Rodríguez-Pose, 2013).

Tantangan Utama dalam Implementasi LED

1. Keterbatasan Akses terhadap Modal dan Investasi
UMKM berbasis sumber daya lokal sering mengalami kesulitan dalam mengakses modal akibat keterbatasan jaminan, tingginya suku bunga, dan rendahnya literasi keuangan (Rozikin et al., 2020). Minimnya investasi sektor swasta serta regulasi yang belum mendukung semakin memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti penguatan koperasi, skema kredit mikro, serta insentif bagi investor (Pike et al., 2016).
2. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja Lokal
Banyak tenaga kerja di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan belum memiliki keterampilan yang cukup dalam manajemen usaha dan teknologi modern (Rodríguez-Pose, 2013). Minimnya pelatihan dan pendidikan berbasis keterampilan menghambat daya saing bisnis lokal. Solusi yang diperlukan adalah program pelatihan vokasional dan inkubator bisnis untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha berbasis sumber daya lokal (Mahanani et al., 2021).
3. Infrastruktur yang Belum Memadai
Infrastruktur fisik dan digital yang buruk, seperti akses jalan, sistem transportasi yang tidak terintegrasi, serta keterbatasan akses internet di daerah terpencil, menyebabkan biaya distribusi tinggi dan mengurangi daya saing produk lokal (Hayashi et al., 2017). Oleh karena itu, pembangunan

infrastruktur yang lebih merata menjadi prioritas dalam strategi LED (Pike et al., 2016).

4. Kurangnya Inovasi dan Teknologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal

Banyak usaha masih bergantung pada metode produksi tradisional yang kurang efisien, menyebabkan produk sulit bersaing di pasar yang lebih luas (Blakely & Leigh, 2013). Minimnya investasi dalam riset dan pengembangan turut menghambat inovasi dalam sektor berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pemerintah untuk memperkenalkan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas usaha lokal (Hayashi et al., 2017).

Strategi untuk Mengatasi Tantangan dalam LED Berbasis Sumber Daya Lokal

Mengatasi tantangan dalam LED memerlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan Akses Permodalan dan Investasi
 - Perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah untuk mendukung petani dan nelayan di daerah terpencil (Mahanani et al., 2021).
 - Investasi berbasis komunitas, seperti koperasi desa dan *crowdfunding*, untuk menyediakan akses modal bagi usaha kecil (Rodríguez-Pose, 2013).
 - Kemitraan dengan sektor swasta guna menciptakan program pendanaan berbasis kemitraan untuk mendukung pengembangan produk lokal (Pike et al., 2016).
2. Penguatan Kapasitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan
 - Pelatihan vokasional dan inkubator bisnis untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dalam mengelola usaha berbasis sumber daya lokal (Rodríguez-Pose, 2013).

- Edukasi digital bagi pengusaha lokal agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan distribusi produk (Pike et al., 2016).
 - Kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk riset dan pengembangan produk berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan daya saing industri daerah (Hayashi et al., 2017).
3. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Digitalisasi
 - Peningkatan akses transportasi dan logistik guna memperlancar distribusi produk lokal dan menekan biaya operasional (Hayashi et al., 2017).
 - Ekspansi akses internet di pedesaan untuk mendukung digitalisasi UMKM dan meningkatkan konektivitas ekonomi lokal (Rodríguez-Pose, 2013).
 - Pembangunan pusat distribusi regional untuk memudahkan akses pasar bagi produk lokal, baik dalam skala domestik maupun ekspor (Pike et al., 2016).
 4. Reformasi Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung
 - Deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha kecil guna mengurangi birokrasi yang menghambat perkembangan ekonomi lokal (Mihayo & Peng, 2020).
 - Subsidi dan insentif bagi usaha berbasis sumber daya alam yang menerapkan praktik berkelanjutan (Rodríguez-Pose, 2013).
 - Kebijakan stabilisasi harga komoditas untuk melindungi petani dan nelayan dari fluktuasi harga pasar yang merugikan mereka (Pike et al., 2016).
 5. Mendorong Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi
 - Adopsi teknologi pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi petani (Kurniawan, 2022).
 - Pemanfaatan teknologi blockchain dalam rantai pasok produk lokal guna meningkatkan transparansi dan daya saing produk di pasar global (Mahanani et al., 2021).

- Investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) untuk menciptakan produk berbasis sumber daya lokal yang lebih bernilai tambah (Hayashi et al., 2017).

Dengan menerapkan strategi yang tepat, LED dapat menjadi solusi utama dalam membangun ekonomi lokal yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Peningkatan akses modal, penguatan SDM, pembangunan infrastruktur, kebijakan yang lebih adaptif, serta pemanfaatan teknologi akan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang lebih kompetitif dan mandiri

E. Studi Kasus Implementasi Local Economic Development (LED) Di Indonesia

Local Economic Development (*LED*) adalah pendekatan yang semakin mendapat perhatian di berbagai daerah Indonesia. LED menekankan pemanfaatan potensi lokal secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan (Blakely & Leigh, 2013). Implementasi LED dilakukan di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, pariwisata, dan UMKM, dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi setiap daerah.

Beberapa daerah telah berhasil mengembangkan ekonomi lokal melalui strategi inovatif dengan keterlibatan aktif masyarakat setempat. Studi kasus berikut memberikan gambaran tentang strategi dan faktor keberhasilan LED di Indonesia:

1. Agroindustri Kakao di Banyuwangi
Pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan kakao menggabungkan inovasi produk dengan integrasi ekowisata. Pendekatan ini meningkatkan nilai tambah produk dan menarik wisatawan untuk mendukung perekonomian lokal.
2. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Maluku

Melalui strategi konservasi dan tata kelola sumber daya laut yang baik, daerah ini berhasil menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kesejahteraan nelayan.

3. Ekowisata Berbasis Komunitas di Bali dan Lombok
Model ini menunjukkan bagaimana pariwisata dapat dikelola secara berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama, memastikan bahwa manfaat ekonomi lebih merata dan lingkungan tetap terjaga.
4. Penguatan UMKM Berbasis Digital di Yogyakarta
Transformasi digital dan strategi pemasaran berbasis teknologi membantu UMKM meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional, memperluas akses pasar, serta meningkatkan efisiensi bisnis.

Keempat studi kasus ini memberikan wawasan tentang strategi yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan. Melalui analisis ini, kita dapat menilai efektivitas berbagai strategi LED serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat direplikasi atau disesuaikan untuk diterapkan di daerah lain (Kurniawan, 2022).Empat kasus tersebut dapat dirangkum dalam table berikut.

Tabel 9.1: Perbandingan Studi Kasus Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal

Studi Kasus	Ciri Ekonomi Lokal	Strategi yang Diterapkan	Dampak Ekonomi dan Sosial
1. Agroindustri Kakao di Banyuwangi	• Berbasis pertanian dan agroindustri. • Potensi lahan perkebunan kakao luas. • Mengandalkan ekspor dan produk olahan.	• Diversifikasi produk turunan kakao (cokelat 103atangan, bubuk kakao, minuman). • Pemberdayaan petani melalui pelatihan fermentasi kakao berkualitas. • Integrasi dengan ekowisata melalui <i>chocolate tourism</i>. • Kolaborasi dengan swasta dan akademisi dalam pengembangan	• Pendapatan petani meningkat hingga 35% dalam 5 tahun. • Ekspor kakao olahan meningkat ke Asia dan Eropa. • Menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan pariwisata.

		teknologi pengolahan kakao.	
2. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Maluku	- Berbasis sektor perikanan laut. - Komoditas utama: ikan tuna dan cakalang. - Menghadapi ancaman eksploitasi berlebihan.	- Sistem kuota perikanan untuk menjaga ekosistem. - Pembangunan <i>cold chain system</i> untuk menjaga kualitas ikan. - Sertifikasi standar ekspor ke Jepang dan Uni Eropa. - Kemitraan dengan sektor swasta untuk pengolahan ikan bernilai tambah.	- Harga jual ikan meningkat 20% karena kualitas lebih baik. - Nelayan mendapatkan pelatihan pengolahan ikan dan bantuan modal. - Menurunkan eksploitasi sumber daya laut.
3. Ekowisata Berbasis Komunitas di Bali & Lombok	- Berbasis sektor pariwisata. - Mengedepankan konservasi alam dan budaya lokal. - Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata.	- Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata. - Penerapan sertifikasi wisata ramah lingkungan. - Promosi melalui digitalisasi dan media sosial. - Pemberdayaan UMKM dalam produksi kerajinan, tekstil, dan kuliner lokal.	- Pendapatan masyarakat desa meningkat hingga 50% dalam lima tahun. - Bali dan Lombok semakin dikenal sebagai destinasi wisata berkelanjutan. - Regulasi ketat dalam pengelolaan lingkungan wisata.
4. Penguatan UMKM Berbasis Digital di Yogyakarta	- Berbasis industri kreatif dan UMKM. - Produk unggulan: batik, kuliner, kerajinan tangan. - Menghadapi tantangan dalam akses pasar dan inovasi produk.	- Digitalisasi pemasaran melalui e-commerce (Shopee, Tokopedia). - Penyediaan inkubator bisnis dan pelatihan manajemen usaha. - Kredit mikro (KUR) untuk pembiayaan UMKM. - Kolaborasi dengan sektor pariwisata untuk promosi produk lokal dalam festival dan bazar budaya.	- Pertumbuhan UMKM meningkat 25% dalam tiga tahun terakhir. - Ekspor produk batik dan kerajinan ke Eropa & Amerika Serikat meningkat. - Literasi digital pelaku UMKM meningkat signifikan.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun masing-masing daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, terdapat beberapa pola strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, yaitu:

1. Diversifikasi Produk dan Inovasi → Studi kasus agroindustri kakao di Banyuwangi serta UMKM di Yogyakarta menunjukkan

bahwa diversifikasi produk dan inovasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.

2. Pemberdayaan Komunitas dan Keterlibatan Masyarakat → Keberhasilan ekowisata berbasis komunitas di Bali dan Lombok, serta pengelolaan perikanan di Maluku, menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
3. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi → Keberhasilan industri perikanan di Maluku serta UMKM di Yogyakarta dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur (*cold chain system*, digitalisasi pemasaran) yang meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.
4. Akses Permodalan dan Kemitraan dengan Swasta → Setiap studi kasus menunjukkan bahwa akses keuangan yang lebih luas, baik melalui kredit mikro, koperasi, atau kemitraan dengan sektor swasta, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih cepat dan stabil.
5. Sertifikasi dan Akses Pasar Global → Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, terutama dalam sektor ekspor, beberapa daerah telah menerapkan strategi sertifikasi standar internasional, seperti dalam industri kakao di Banyuwangi dan perikanan di Maluku.

Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal membutuhkan pendekatan yang terpadu, mengombinasikan kebijakan yang mendukung, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi. Dengan strategi yang tepat, daerah-daerah lain di Indonesia dapat mereplikasi keberhasilan studi kasus ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Kesimpulan

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal (*Local Economic Development* - LED) telah terbukti sebagai strategi efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mendukung infrastruktur dan kebijakan yang tepat, LED mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal (Blakely & Leigh, 2013; Rodríguez-Pose, 2013). Kesimpulan utama dari kajian ini meliputi:

1. Pengembangan ekonomi harus berbasis pada keunggulan sumber daya lokal.
Daerah yang mengoptimalkan sektor unggulannya, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan ekowisata, cenderung mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Pike et al., 2016).
2. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas sangat penting.
LED memerlukan keterlibatan aktif dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencapai hasil optimal. Regulasi yang mendukung dan investasi sektor swasta dalam industri lokal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi (Blakely & Leigh, 2013).
3. Akses terhadap permodalan dan teknologi masih menjadi tantangan.
Banyak pelaku ekonomi lokal kesulitan memperoleh modal usaha akibat keterbatasan jaminan dan rendahnya literasi keuangan (Rozikin et al., 2020). Selain itu, digitalisasi di sektor ekonomi lokal masih terbatas, terutama di daerah dengan infrastruktur telekomunikasi yang kurang berkembang (Hayashi et al., 2017).

4. Keberlanjutan harus menjadi prioritas utama.
Pengelolaan sumber daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat menurunkan daya dukung ekonomi di masa depan (Świrska et al., 2017).

Rekomendasi Strategis

Untuk mengoptimalkan LED berbasis sumber daya lokal, beberapa strategi utama yang perlu diterapkan adalah:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
 - Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang mendukung sektor unggulan berbasis potensi lokal.
 - Penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah (Rozikin et al., 2020).
 - Insentif pajak dan subsidi bagi industri berbasis sumber daya lokal yang menerapkan prinsip keberlanjutan.
2. Meningkatkan Akses Permodalan
 - Memperluas skema *Kredit Usaha Rakyat* (KUR) bagi petani, nelayan, dan UMKM untuk memudahkan akses modal dengan suku bunga rendah.
 - Penguatan koperasi berbasis komunitas sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif.
 - Peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha lokal untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik (Pike et al., 2016).
3. Peningkatan Kualitas SDM dan Adopsi Teknologi
 - Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat lokal melalui kolaborasi pemerintah dan sektor swasta.
 - Peningkatan adopsi teknologi digital dan e-commerce dalam pemasaran produk berbasis sumber daya lokal, sebagaimana diterapkan di sektor UMKM Yogyakarta (Rozikin et al., 2020).

- Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk riset dan inovasi yang meningkatkan daya saing daerah (Hayashi et al., 2017).
4. Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung LED
 - Peningkatan akses jalan, listrik, dan telekomunikasi guna memperlancar distribusi produk lokal.
 - Perluasan akses internet dan digitalisasi ekonomi lokal untuk memperluas pasar bagi produk berbasis sumber daya lokal.
 - Penguatan logistik dan rantai pasok agar produk lokal lebih kompetitif di pasar nasional dan internasional (Hayashi et al., 2017).
 5. Mendorong Model Pembangunan Berkelanjutan
 - Implementasi kebijakan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup (Świrski et al., 2017).
 - Penerapan sertifikasi hijau bagi produk berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan daya saing global.
 - Pengembangan ekowisata berbasis komunitas, seperti di Bali dan Lombok, yang menggabungkan konservasi lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi lokal (Zvikonyaukwa et al., 2023).

Dengan penerapan strategi ini, LED dapat menjadi instrumen utama dalam membangun ekonomi lokal yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan

BAB 9

**PERAN TEKNOLOGI DAN
DIGITALISASI DALAM EKONOMI
KERAKYATAN**

Peran teknologi dan digitalisasi dalam ekonomi kerakyatan sangat besar dan dapat mempengaruhi banyak aspek dalam masyarakat, dari pemberdayaan individu hingga perbaikan infrastruktur ekonomi. Secara rinci, peran teknologi dan digitalisasi dalam ekonomi kerakyatan dapat dibagi dalam beberapa area berikut:

A. Akses ke Pasar Global

Akses ke pasar global adalah salah satu peluang terbesar yang diberikan oleh teknologi dan digitalisasi bagi pelaku ekonomi kerakyatan. Sebelumnya, banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) di tingkat lokal atau desa terbatas dalam jangkauan pasarnya, tetapi dengan adanya teknologi, bisa mengakses pasar internasional secara lebih mudah. Berikut adalah beberapa cara teknologi memfasilitasi akses ke pasar global untuk ekonomi kerakyatan:

1. Platform E-Commerce

Pemasaran Melalui E-Commerce Lokal: e-commerce lokal yang berkembang di banyak negara juga memungkinkan pelaku usaha kecil mengakses pasar yang lebih luas. Contohnya, **Tokopedia**, **Bukalapak**, atau **Shopee** di Indonesia tidak hanya melayani pasar domestik, tetapi juga memberikan peluang bagi produk lokal untuk dipasarkan ke luar negeri melalui fitur internasional.

2. Social Media dan Pemasaran Digital

Media Sosial untuk Branding dan Penjualan: Platform media sosial seperti **Instagram**, **Facebook**, **TikTok**, dan **Pinterest** memberikan peluang besar untuk memperkenalkan produk atau jasa ke audiens global. Dengan membangun brand yang kuat dan menghasilkan konten yang menarik, pelaku usaha kecil dapat menjangkau konsumen internasional yang lebih besar.

Iklan Berbayar dan Kampanye Digital: Teknologi iklan digital memungkinkan usaha kecil untuk menjalankan kampanye iklan yang ditargetkan kepada konsumen di seluruh dunia. Misalnya,

dengan menggunakan **Google Ads**, **Facebook Ads**, atau **Instagram Ads**, pelaku usaha dapat mengarahkan iklan kepada audiens internasional yang lebih spesifik dan tertarik pada produk yang ditawarkan.

3. Marketplace untuk Jasa dan Keterampilan

Platform Freelancer: Dengan adanya platform seperti **Upwork**, **Freelancer**, **Fiverr**, atau **99designs**, individu atau usaha kecil yang menawarkan jasa profesional dapat dengan mudah terhubung dengan klien internasional. Ini menciptakan kesempatan bagi pelaku ekonomi kerakyatan untuk memasarkan keterampilan dalam desain, penerjemahan, penulisan, pengembangan perangkat lunak, dan banyak lagi kepada pasar global.

Global Talent Pool: Teknologi memungkinkan pekerja atau pengusaha lokal untuk menawarkan layanan atau keahlian kepada perusahaan atau individu di luar negeri tanpa batasan geografis. Sebagai contoh, seorang desainer grafis di desa kecil dapat bekerja dengan klien di Eropa atau Amerika Serikat berkat platform digital ini.

4. Penggunaan Teknologi untuk Efisiensi Logistik dan Pengiriman

Layanan Pengiriman Global: Perusahaan logistik seperti **DHL**, **FedEx**, atau **Pos Indonesia** yang terintegrasi dengan e-commerce internasional memungkinkan pengiriman produk dari desa atau daerah terpencil langsung ke konsumen di luar negeri dengan biaya yang terjangkau dan waktu yang relatif singkat. Teknologi pelacakan pengiriman juga memberikan transparansi dan kenyamanan bagi pelanggan internasional.

Otomatisasi dan Sistem Manajemen Inventaris: Penggunaan perangkat lunak manajemen inventaris yang canggih memungkinkan pelaku usaha kecil untuk mengelola stok produk dengan efisien dan otomatis, meminimalkan risiko kehabisan

stok atau overstock, dan mempermudah pengiriman ke pasar internasional. Aplikasi seperti TradeGecko atau Zoho Inventory dapat diintegrasikan dengan platform e-commerce untuk mengelola pemesanan global.

Dengan teknologi, pelaku ekonomi kerakyatan dapat memanfaatkan potensi pasar global tanpa perlu infrastruktur besar atau modal yang sangat tinggi. Sebagai hasilnya, teknologi bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membuka peluang untuk berkembang di tingkat internasional. Jika Anda tertarik dengan salah satu aspek tertentu atau ingin memperdalam pembahasan ini, saya siap membantu lebih lanjut!

B. Peningkatan Keterampilan dan Pendidikan

- ✓ **Platform Pembelajaran Online:** Teknologi memberikan akses kepada masyarakat untuk belajar keterampilan baru secara mandiri. Platform seperti Coursera, Udemy, atau YouTube memberikan pelatihan keterampilan teknis, pemasaran digital, manajemen usaha, dan keterampilan lain yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis atau meningkatkan kualitas produk.
- ✓ **Pelatihan Berbasis Aplikasi:** Aplikasi mobile dan software khusus juga dapat digunakan untuk memberikan pelatihan praktis dalam bidang pertanian, kerajinan tangan, teknologi, serta keterampilan kewirausahaan dan keuangan. Ini membantu pelaku usaha untuk terus berkembang, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan proses produksi.

C. Pemberdayaan Masyarakat

- ✓ **Akses Informasi:** Teknologi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan lebih akurat, termasuk informasi tentang harga pasar, kebijakan pemerintah, peluang usaha, dan tren ekonomi. Hal ini memungkinkan pelaku usaha

untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam hal harga, pemasaran, dan distribusi produk.

- ✓ **E-Government dan Layanan Publik Digital:** Pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Melalui aplikasi atau platform e-government, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi, termasuk izin usaha, pelaporan pajak, dan layanan kesehatan, yang membuat pengelolaan usaha lebih mudah dan lebih efisien.

D. Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan)

Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) adalah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi utama yang saling terkait: **ekonomi**, **sosial**, dan **lingkungan**. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan.

1. Dimensi Ekonomi dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berfokus pada penciptaan nilai ekonomi jangka panjang tanpa menguras sumber daya alam yang ada. Beberapa aspek yang penting dalam dimensi ekonomi ini meliputi:

- ✓ **Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif:** Pembangunan ekonomi harus menguntungkan semua lapisan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
- ✓ **Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Efisien:** Menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan efisien tanpa menurunkan kualitas atau kuantitasnya untuk masa depan.

- ✓ **Inovasi dan Teknologi Hijau:** Mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan inovatif, seperti energi terbarukan dan teknologi rendah karbon, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- ✓ **Pengembangan Ekonomi Lokal:** Mendorong ekonomi lokal dan UMKM dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengurangi ketergantungan pada sektor industri besar yang dapat merusak lingkungan.

2. Dimensi Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan harus memastikan kesejahteraan sosial yang merata dan adil. Pembangunan sosial tidak hanya fokus pada pencapaian kesejahteraan individu, tetapi juga mencakup penguatan nilai-nilai sosial yang positif di masyarakat. Beberapa aspek penting dalam dimensi sosial ini adalah:

- ✓ **Pemberdayaan Masyarakat:** Pembangunan sosial berkelanjutan berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses ke peluang ekonomi. Ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati manfaatnya.
- ✓ **Kesetaraan Gender:** Menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kesempatan ekonomi.
- ✓ **Keadilan Sosial:** Pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dibagikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal, dan tidak menambah kesenjangan sosial.
- ✓ **Akses terhadap Layanan Dasar:** Pembangunan berkelanjutan memastikan semua individu memiliki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan air bersih.

Pemanfaatan

- 1) **Green Technology:** Digitalisasi memungkinkan penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti pengelolaan energi yang efisien, pengelolaan limbah berbasis teknologi, dan pemantauan emisi karbon menggunakan IoT. Ini penting untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan, di mana kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- 2) **Pertanian Digital:** Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian dengan metode pertanian presisi (precision farming), yang menggunakan sensor dan data untuk memonitor kondisi tanah, cuaca, dan tanaman. Dengan teknologi ini, petani dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

E. Transformasi Ekonomi Digital

Transformasi Ekonomi Digital merujuk pada proses perubahan mendalam dalam cara ekonomi berfungsi, di mana teknologi digital menjadi inti dari hampir semua aspek bisnis, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, transformasi ini menawarkan berbagai peluang dan tantangan yang dapat mengubah cara pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) beroperasi dan berinteraksi dengan pasar. Berikut adalah gambaran lebih mendalam mengenai **transformasi ekonomi digital** dan dampaknya:

Digitalisasi adalah langkah pertama dalam transformasi ekonomi digital. Ini mencakup penerapan teknologi digital di hampir semua aspek sektor ekonomi, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan transaksi.

- ✓ **Penggunaan Platform Digital untuk Distribusi:** UMKM sekarang dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk menjual produk secara langsung ke konsumen global. Penggunaan aplikasi dan sistem manajemen digital

mempercepat distribusi barang, memperkecil biaya logistik, dan mempercepat waktu pemasaran produk.

- ✓ **Integrasi Teknologi dalam Layanan Publik:** Pemerintah dapat menerapkan teknologi untuk mempermudah akses terhadap layanan publik, seperti layanan pajak, perizinan usaha, dan kebijakan ekonomi lainnya melalui platform digital. Ini membantu mempercepat proses bisnis, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi.

Teknologi dan digitalisasi dalam ekonomi kerakyatan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan akses ke pasar global, pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan keterampilan, dan inovasi dalam model bisnis, teknologi mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan mandiri. Selain itu, teknologi juga mempercepat transformasi dalam sektor-sektor penting seperti pertanian, UMKM, dan industri kreatif yang menjadi pilar ekonomi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, I.I. and Primitasari, N. (2023) 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Indonesia Bagian Timur', *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(03), pp. 494–503. Available at: <https://doi.org/10.22219/jie.v7i03.28265>.
- Abdul Kader, M., & Galuh Ciamis, U. (2018). PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA. In *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen* (Vol. 15, Issue 1).
- Amran, S. (2021) 'Filsafat koperasi dalam penguatan hukum koperasi di Indonesia', *Koperasi : Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja Koperasi Institut Manajemen Koperasi Indonesia*, pp. 3–12.
- Anjani, P.S. et al. (2023) 'Peranan Pemerintah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19', *Salam (Islamic Economics Journal)*, 4(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.24042/slm.v4i1.15135>.
- Arifqi, M. M. (2021) 'Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta)', *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(02), pp. 57–73. doi: 10.35905/balanca.v2i02.1554.
- Ayunda, S. et al. (2022) 'STRATEGI MENINGKATKAN PERKEMBANGAN EKONOMI DI ERA MODERN BERBASIS PANCASILA', *Jurnal Gema Keadilan*, 9(II).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Perkebunan Indonesia: Kakao 2023. BPS. <https://www.bps.go.id>
- Bagas & Radjab. (2019). Tergerusnya Gotong Royong di Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone. *Hasanuddin Journal of Sociology*. Vol 1 (2). h.116-126 <https://doi.org/10.31947/hjs.v1i2.9431>
- Bamidele Micheal Omowole et al. (2024) 'Conceptualizing green business practices in SMEs for sustainable development', *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 6(11), pp. 3778–3805. Available at: <https://doi.org/10.51594/ijmer.v6i11.1719>.
- Banerjee, A. et al. (2024) Social Protection in the Developing World. he Massachusetts Institute of Technology. Available at: https://economics.mit.edu/sites/default/files/2023-08/Social_Protection_paper_manuscript.pdf.

- Bank Indonesia. (2023). Kajian pengembangan UMKM berbasis digital di Yogyakarta. Jakarta: Bank Indonesia.
- Basri, Saifuddin, B. (2021) 'EKONOMI KERAKYATAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (STUDI KASUS KOPERASI MITRA DHUAFA KECAMATAN POLEWALI)', 3(November), pp. 10–14.
- Bateman, I.J., Mace, G.M. (2020). The natural capital framework for sustainably efficient and equitable decision making. *Nat Sustain* 3, 776–783. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-0552-3>
- Bersama, K. and Kemakmuran, M. (2024) 'PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH MELALUI KOLABORASI BERSAMA MENUJU KEMAKMURAN EKONOMI', 1(5), pp. 198–203.
- Betan, N.A.U & Nugroho, P.I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* Vol 5(1), h.133-139. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>
- Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2013). *Planning local economic development: Theory and practice* (5th ed.). SAGE Publications.
- Chambers, R. (1997) *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Chittithaworn, C. et al. (2011) 'Factors Affecting Business Success of Small & Medium Enterprises (SMEs) in Thailand', *Asian Social Science*, 7(5), p. p180. Available at: <https://doi.org/10.5539/ass.v7n5p180>.
- De Andrade, R.D. et al. (2025) 'Investigating green jobs and sustainability in SMEs: Beyond business operations', *Journal of Cleaner Production*, 486, p. 144477. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.144477>.
- DEWI, K.G.P.D., DEWI, A.A.I.K.G. and NURAK, A.P.N. (2023) 'PKM Praktik Economy Digital Dan Participatory Approach Untuk Penguatan Kelembagaan Paguyuban Pedagang Pasar Seni Sukawati', *Akuntansi dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp. 48–58. Available at: <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i2.738>.
- DiMenna, J. (2022) 'Globalization and Trade Liberalization: The Impact on Bangladesh's Textile Industry', *Major Papers - University of Windsor*, 207. Available at: <https://scholar.uwindsor.ca/major-papers/207>.
- Dinas Perkebunan Banyuwangi. (2022). Laporan tahunan pengelolaan kakao di Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

- Fahrizal, A., Anisah, H.U. and Hidayatullah, M. (2024) 'Kewirausahaan Sosial di Muara Teweh : Membangun Ekonomi Komunitas Melalui Inovasi dan Kolaborasi yang Berkelanjutan', (4).
- Fajarika, D., Trapsilawati, F. and Sopha, B.M. (2024) 'Influential factors of small and medium-sized enterprises growth across developed and developing countries: A systematic literature review', *International Journal of Engineering Business Management*, 16, p. 18479790241258097. Available at: <https://doi.org/10.1177/18479790241258097>.
- Fitriyani, I., Kadewi Sumbawati, N., Rachman, R., Ekonomi dan Manajemen, F., & Samawa Sumbawa Besar, U. (2024). Peran Entrepreneur dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Indonesia. In *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* (Vol. 4, Issue 1). <http://m.kemenpora.go.id>
- Fuchs, F. and Lingnau, V. (2024) 'The Homo Economicus as a Prototype of a Psychopath? A Conceptual Analysis and Implications for Business Research and Teaching', *Journal of Business Ethics*, 195(4), pp. 763–777. doi: 10.1007/s10551-024-05638-7.
- Godke Veiga, M. and McCahery, J.A. (2019) 'The Financing of Small and Medium-Sized Enterprises: An Analysis of the Financing Gap in Brazil', *European Business Organization Law Review*, 20(4), pp. 633–664. Available at: <https://doi.org/10.1007/s40804-019-00167-7>.
- Gustika, S. and Susena, K. C. (2022) 'Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Sn-Emba) Ke-1 Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa', *Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen penyerapan*, pp. 101–108.
- Hadi, S., & Setyawan, R. (2021). Peran ekonomi kreatif dalam penguatan UMKM di era digital: Studi kasus Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(2), 145-160. <https://doi.org/10.20885/jebi.vol36.iss2.art5>
- Hafsah, S., Usamah Hanafie, U., Wilda, K. (2019). Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. *Frontier Agribisnis* Vol 3(4) <https://doi.org/10.20527/frontbiz.v3i4.2118>
- Hakim, L., Indra, ;, & Irawan, A. (n.d.). STRATEGI MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL DENGAN MEMINIMALISIR IMPOR UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT.
- Halim., G. (2023 Maret 9). Pengertian Desa Maju dan Berkembang Bungko News <https://www.kemendesa.go.id/berita>

/view/detil/4147/sewindu-uu-desa-gus-halim-tahun-2021-dana-desa-meningkat-begitu-juga-ekonomi-des

- Hasmawati, F. (2018) 'Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal', Jurnal Pengembangan Masyarakat, V(5), pp. 54–65.
- Hasmawati, F. (2018) 'EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS POTENSI LOKAL', Jurnal Pengembangan Masyarakat, V(5). Available at: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/PEMAS/article/view/4986/0>.
- Hayashi, T., Sawauchi, D., & Kunii, D. (2017). Forest maintenance practices and wood energy alternatives to increase uses of forest resources in a local initiative in Nishiwaga, Iwate, Japan. Sustainability, 9(11), 1949. <https://doi.org/10.3390/su9111949>
- Healey-Benson, F. and Kirby, D.A. (2024) 'Welsh Harmonious SMEs: a Blueprint for Addressing Inequality through Entrepreneurship', in: Institute for Small Business and Entrepreneurship 46th Annual Conference, Sheffield, United Kingdom.
- Hidayat, W. (2023) 'Resesi Melalui Pengaturan Hukum bagi UMKM dan Koperasi (Optimization of The Community Economy in Facing The Threat of Recession Through Legal Arrangements for SMEs and Cooperatives)', 53(7).
- Ibrahim, S.N.K., Leus, J.D.C.N. and Dewi, M.P. (2024) 'Collaborative Governance Sebagai Strategi Inovatif Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Flores Timur', Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 13(2), pp. 64–73. Available at: <https://doi.org/10.22146/jkki.92992>.
- ILO (2019) Small Matters: Global Evidence on the Contribution of SMEs to Employment Creation and Development. International Labour Organization. Available at: https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/%40publ/documents/publication/wcms_723282.pdf.
- Indahsari, K. (2012) 'Dari Ekonomi Pancasila Ke Ekonomi Kerakyatan', Jurnal Pendidikan, pp. 1–12.
- International Labour Organizations (2019) Small Matters: Global evidence on the contribution to employment by the self employed, micro-enterprises and SMEs. Geneva: ILO.
- Jongwanich, J. and Kohpaiboon, A. (2024) 'Digital technology adoption and SMEs' Financial Performance: Evidence from Thailand', Discussion Paper Series - Thammasat University [Preprint], (81). Available at: https://www.econ.tu.ac.th/uploads/discussion_paper/file/20240103/ackmorsw2589.pdf.

- Junarto, R. and Salim, M.N. (2022) 'Strategi Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia', *Tunas Agraria*, 5(2), pp. 142–164. Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.181>.
- Kader, M. A. (2018) 'Peran Ukm Dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia', *JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), pp. 15–32. doi: 10.34010/jurisma.v8i1.995.
- Kartasapoetra, dkk. (2013) *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2022). *Laporan pengelolaan sumber daya perikanan Maluku*. Jakarta: KKP RI.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). *Tren ekowisata di Indonesia: Studi kasus Bali dan Lombok*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Kerakyatan, P. E., Ratna, D., & Hapsari, I. (2018). Dwi Ratna Indri Hapsari Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional ditinjau dari HUKUM DALAM MENDORONG DINAMIKA PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI KERAKYATAN (Vol. 26, Issue 2). <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bea2c400d717/7-perjanjian-perdagangan-internasional-ini-akan->
- KH. OEMAR BAKRY, (1983) *Tafsir AL- QUR 'AN Terjemahan, Pentashih DEPARTEMEN AGAMA*. Jakarta.
- Knowles, J.C., Pernia, E.M. and Racelis, M. (1999) 'SOCIAL CONSEQUENCES OF THE FINANCIAL CRISIS IN ASIA', *Asian Development Bank (ADB) Economics Staff Paper*, 60. Available at: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28156/esp060.pdf>.
- Kurniawan, A. (2022). *Local economic development strategy through scenario planning approach (study on the development of rural agro-tourism areas in Banyuwangi)*. *Wacana Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 25(1). <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2022.025.01.01>
- Kusumawardhana, I. (2023) 'A Dynamic System Approach: Modalitas Kontrol Pemerintah Terhadap Agenda Pembangunan Di Negara Berkembang', *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), pp. 146–162. Available at: <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.478>.
- Leal-Arcas, R. et al. (2025) 'The Future of Global Economic Governance: Balancing Trade, Sustainability, and Social Justice', *Minnesota Journal of International Law*, 35(1).

- Liwaul, L. (2023) 'Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kewirausahaan Lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat', *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 4(2), pp. 104–123. Available at: <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i2.15>.
- Mahanani, R., Hidayat, T., Wardati, I., Galushasti, A., & Wiyono, L. (2021). Local economic development strategies to increase economic growth in agrotourism areas. *Turyzm/Tourism*, 31(2), 117-131. <https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.2.07>
- Maharani, S. D. (2016) 'Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia', *Jurnal Filsafat*, 26(1), p. 30. doi: 10.22146/jf.12624.
- Marconatto, D.A.B. et al. (2022) 'Women on the Front Line: The Growth of SMEs during Crises', *Sustainability*, 14(16), p. 10120. Available at: <https://doi.org/10.3390/su141610120>.
- Maysarah, Rahma, Almira Hani, A.F. (2016) 'Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', 12, pp. 1–23.
- Melati, I. S., dkk. (2022). *Eksistensi ekonomi kerakyatan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Meliala, A. J. (n.d.). *Melawan dinamika kapitalisme dengan hukum ekonomi kerakyatan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada - Rajawali Pers.
- Mihayo, I., & Peng, D. (2020). Role of fishery and forest resources in local economic performance: Evidence from the Lake Zone of Tanzania. *International Journal of Economics and Finance*, 12(2), 22. <https://doi.org/10.5539/ijef.v12n2p22>
- Mujahidin, A., Saifuddin, S. and Busrah, B. (2021) 'Ekonomi Kerakyatan Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Kecamatan Polewali)', *Journal Pegguruang: Conference Series*, 3(2), p. 847. doi: 10.35329/jp.v3i2.2223.
- Munzir, E. and Syamsuddin, A. (2020) *Ekonomi Kerakyatan Dalam Diskusi Dua Generasi*. Available at: <https://emedia.dpr.go.id/ebook/portfolio/ekonomi-kerakyatan/>.
- Mutaal, M. (2024). Local economic development through maggot cultivation in Klaten, Indonesia, to support environmental sustainability. *Buletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo*, 26(1), 49-58. <https://doi.org/10.37149/bpsosek.v26i1.1260>
- Neupane, B.K., Neupane, M.P. and Tamang, B. (2025) 'Balancing Economic Growth and Cultural Preservation: Navigating the Challenges of

- Globalization in Nepal', *NPRC Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1).
- Nur Sarfiah, S., Eka Atmaja, H., & Marlina Verawati, D. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) UMKM SEBAGAI PILAR MEMBANGUN EKONOMI BANGSA MSMEs THE PILLAR FOR ECONOMY. *Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1).
<https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Nurjhadhi, M., Irawan, E., Ilman, A.H. (2019). Identifikasi Komoditas Unggulan Desa Untuk Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Semabung Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 04(01) pp. 56-62
<https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.382>
- Okugbere, O. (2025) 'Access to Sustainable Finance in Stimulating SME Growth and Economic Resilience in the United States for Overall Economic Growth and Development', *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, IX(I), pp. 1053–1057. Available at: <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.9010086>.
- Perdana, M.A.C. et al. (2023) 'Pengaruh Dukungan Pemerintah, Infrastruktur, dan Akses Pasar terhadap Pertumbuhan Usaha Kewirausahaan di Wilayah Perkotaan', *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(03), pp. 149–161. Available at: <https://doi.org/10.58812/sek.v1i03.121>.
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2016). *Local and regional development*. Routledge.
- Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E. and Simanjuntak, D. B. (2019) 'Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta', *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(1), pp. 21–31. Available at: <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/viewFile/859/562>.
- Porter, M. E. (1998). *Clusters and the new economics of competition*. Harvard Business Review.
- Pusat Inkubasi (Pinbuk). BMT.Prov.Lampung. Thn.2001.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- QUO VADIS. Kawasan Ekonomi Khusus (K.E.K). Pt. Raja Grafindo Prada, Jakarta, Thn.2010
- Ralio, V.R.Z. and Donadone, J.C. (2019) 'The forms of intermediation in the space of Brazilian micro and small-sized enterprises: SEBRAE, from foundation to performance in the 21st century', *Gestão & Produção*, 26(4), p. e4219. Available at: <https://doi.org/10.1590/0104-530x4219-19>.

- Reform, J.A. et al. (2023) 'KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN BENCANA DI PROVINSI BANTEN', 11, pp. 1–16.
- Rinawati, A. (2020). DALAM MENGHADAPI KAPITALISME GLOBAL. *Jurnal Terapung : Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2).
- Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? *Regional Studies*, 47(7), 1034–1047. <https://doi.org/10.1080/00343404.2012.748978>
- Rompas, W.I. (2018) 'MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA DALAM RANGKA AKSELERASI PEREKONOMIAN DAN SEKTOR PARIWISATA DI SULAWESI UTARA: SEBUAH KAJIAN LITERATUR', *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (EMBA)* [Preprint].
- Roofe, M.E. and Roofe, A.E.S. (2016) 'A Commentary on SMEs in Brazil: Lessons for Jamaica and the Caribbean', *Social and Economic Studies*, 65(2 & 3), pp. 161–175.
- Rozikin, M., Haris, R., & Rahman, Z. (2020). Analysis of local government efforts in local economic resources development. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201021.013>
- Sabil (2014) 'Sistem Ekonomi Kerakyatan Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Ukm, Koperasi Dan Pemerintah Daerah', *Moneter*, 1(1), pp. 51–57.
- Sabur, Debora. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Politica* Vol. 14(1). h.1-21. doi: <https://10.22212/jp.v14i1.4120>
- Sach & Warner. (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper 5398.
- Salam, M.D. and Prathama, A. (2022) 'PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM', *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(02).
- Schwartz, D., Bar-El, R. and Bentolila, D.J. (2022) 'Adapting Reverse Mentoring Strategy to SMEs: A New Pilot Model Implemented in Brazil', *Sustainability*, 14(15), p. 9515. Available at: <https://doi.org/10.3390/su14159515>.
- Sriboonlue, P. and Puangpronpitag, S. (2019) 'Towards Innovative SMEs: An Empirical Study of Regional Small and Medium Enterprises in Thailand', *Procedia Computer Science*, 158, pp. 819–825. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.119>.

- Styaningrum, F. (2021) 'Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia', E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 10(8), p. 565. Available at: <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i08.p01>.
- Styaningrum, F., Kunci, K., & Ekonomi Kerakyatan, S. (2021). E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA KONSEP SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM INDONESIA. 10(8), 656–663. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/>
- Sulistyo Budi Utomo et al. (2024) 'Pendampingan Legalitas Dan Perancangan Ekosistem Koperasi Jasa', Proficio, 5(2), pp. 51–56. Available at: <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i2.3366>.
- Sumilat, R.D. (2021) 'PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL (Studi di Pasar Langowan)', POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 10(03).
- Suparman, (2006) Budi Daya Hewan, Cetakan I GANESA EXACT.
- Surya, B. et al. (2021) 'Economic Growth, Increasing Productivity of SMEs, and Open Innovation', Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(1), p. 20. Available at: <https://doi.org/10.3390/joitmc7010020>.
- Swasono, S.-E. (1985). Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi: Membangun sistem ekonomi nasional. Jakarta: LP3ES.
- Tewari, P.S. et al. (2013) Competitive Small and Medium Enterprises: A diagnostic to help design smart SME policy. 82516. World Bank Group. Available at: <https://documents1.worldbank.org/curated/ar/534521468331785470/pdf/825160WP0P148100Box379861B00PUBLIC0.pdf>.
- Todaro, M.P, & Smith, S.C. (2020). Economic Development. Edition 3. Pearson Education.
- Turner, M. et al. (2016) 'Small and medium-sized enterprises in Thailand: government policy and economic development', Asia Pacific Journal of Public Administration, 38(4), pp. 251–269. Available at: <https://doi.org/10.1080/23276665.2016.1256545>.
- Vella, S. (2011) SMEs and economic resilience building. ISLANDS AND SMALL STATES INSTITUTE, University of Malta.
- Wahyuni, S.T. et al. (2024) 'Analisa Program “ Meroket ” Dalam Percepatan Pemberdayaan Ekonomi UMKM Di kabupaten Trenggalek', 4(1), pp. 2429–2436.

- World Economic Forum (2021) Here are the top 10 nations enjoying the fastest growth in small businesses – and why it matters. World Economic Forum. Available at: <https://www.weforum.org/stories/2021/11/here-are-the-top-countries-enjoying-the-largest-growth-in-small-businesses-and-why-that-matters/>.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Yoshino, N. and Taghizadeh-Hesary, F. (2018) 'The Role of SMEs in Asia and Their Difficulties in Accessing Finance', Asian Development Bank Institute (ADBI) Working Paper Series, 911. Available at: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/474576/adbi-wp911.pdf>.
- Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN PANCASILA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 4(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.327>
- Yuskar (2006) 'Bung Hatta, Ekonomi Kerakyatan, dan Koperasi: Potret Masalah, Kini, dan Yang Akan Datang', Buku Kecil Rangkaian Ulang Tahun Bung Hatta Ke 106, pp. 1–19.
- Zvikonyaukwa, J., Musengi, K., & Mudzengi, C. (2023). Assessing the contribution of ecotourism to economic growth and rural development offered by wildlife resources to people living in communities around Matusadonha National Park. Journal of Sustainable Business and Economics, 6(2), 12-24. <https://doi.org/10.30564/jsbe.v6i2.5692>

PROFIL PENULIS

Dr. Nurhayati, SE, ME Merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Lulus dari Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Sudi Pembangunan Universitas Trisakti dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia dan melanjutkan Pasca Sarjana (S3) di Program Kebijakan Publik Universitas Trisakti. Pengalaman mengajar Pengantar Ekonomi Mikro, Pengantar Ekonomi Makro, Statistika, Ekonometrika dan Praktikum Alat Analisis Kuantitatif. Banyak menulis artikel di bidang Ekonomi, Regional, dan Pembangunan Berkelanjutan. Penulis aktif sebagai pengurus Jurnal sebagai Managing Editor pada Jurnal Media Ekonomi. Penulis juga aktif sebagai Ketua Lembaga Pengolahan Data dan Statistik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti.

Dwi Wulan Pujiriyani, merupakan dosen Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Dengan latar belakang pendidikan di bidang antropologi dan sosiologi pedesaan, yang bersangkutan memiliki minat pada kajian agraria dan pedesaan

Reza Arviciena Sakti, S.E., M.E Penulis, yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 1 Juni 1995, merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR). Gelar Sarjana Ekonomi berhasil diraih penulis pada tahun 2018 setelah menempuh pendidikan sarjana di Program Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan magister di Program Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Mataram dan menyelesaikan studi dengan gelar Magister Ekonomi pada tahun 2020. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, penulis terus

berkomitmen dalam pengembangan ilmu ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

Sebagai akademisi, penulis memiliki ketertarikan mendalam pada penelitian yang menyoroti kontribusi ekonomi terhadap tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Fokus penulis adalah mengeksplorasi bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pencapaian agenda global tersebut, terutama dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain aktif mengajar, penulis juga terlibat dalam penelitian dan pengabdian yang bertujuan untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan semangat akademik, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam menjembatani prinsip syariah dengan tantangan pembangunan global.

Ir. Mohamad Bawazeer, IPU., merupakan dosen praktisi pada mata kuliah Ekonomi Politik Sumber Daya Alam, dan Politik Bisnis Internasional di FISIP UPN Veteran Jakarta, berkarir di dunia perminyakan sejak menyelesaikan studi perminyakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1980, berperan aktif dalam berbagai asosiasi profesi dan industri perminyakan di tingkat nasional dan internasional, dalam beberapa tahun terakhir dipercaya sebagai Ketua Kadin Indonesia Komite Tetap Timur Tengah & OKI dan ikut terlibat dalam banyak peninjauan kerjasama bisnis dan investasi dengan negara-negara Timur Tengah & OKI, menulis buku “Ekonomi, Politik, dan Peluang Bisnis di Negara-Negara Teluk,” yang diterbitkan pada 2021 lalu.

Andi Kurniawan adalah dosen Hubungan Internasional (HI) FISIP UPN Veteran Jakarta, menyelesaikan studi magister HI dari FISIP Universitas Indonesia, menempuh program pra-doktoral di University

of Sheffield, United Kingdom, dan memiliki minat kajian ekonomi politik sumber daya alam, kerjasama perdagangan dan investasi di Selatan Global, dan Big Data dalam HI.

Bainal Huri, S.Sos., M.Kom.I. Dosen UTB Lampung seorang penulis yang menyukai UMKM serta dalam berbagai usaha , mulai dari usaha pedagang kecil (kaki lima) hingga pedagang menengah. Dengan latar belakang pendidikan dibidang komunikasi,Saya Bainal Huri (M. Benaldo) juga hobi berOrganisasi, Menulis, & Berdakwah sejak usia remaja dan memutuskan untuk berfokus pada penulisan usaha (UMKM) yang mungkin dapat menginspirasi para pembaca untuk berfikir yang lebih kreatif & inovatif dalam usaha bisnis UMKM yang lebih menjanjikan.

Ayu minarsi S.E, merupakan penulis dan saat ini masih melanjutkan pendidikan pasca sarjana Universitas islam negeri sulthan Thaha saifuddin Jambi. Selain itu ayu jugaa merupakan salah satu fashion designer yang berasal dari Kota jambi sekaligus pengusaha muda yang berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk anak anak muda di bidang busana dan juga sudah memulai membuka pelatihan dan kursus menjahit. Ia juga aktif di berbagai organisasi, salah satu nya menjadi pengurus koordinator cabang pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII) Provinsi Jambi.

Endah Kurnia Lestari, lahir di Jember, 14 April 1978 adalah seorang penulis, akademisi dalam bidang perencanaan pembangunan ekonomi. Meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Jember, kemudian melanjutkan studi master di bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan di Universitas Brawijaya (UB). Pada tahun 2016 memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Saat ini dipercaya menjabat sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Ekonomi FEB UNEJ. Selama lebih

dari 10 tahun, berkontribusi dalam berbagai penelitian dan proyek terkait ekonomi pembangunan wilayah serta telah menerbitkan beberapa buku teks dan buku Ajar (Perencanaan Pembangunan I, Perencanaan Pembangunan II, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan) dan artikel ilmiah yang membahas tentang pembangunan ekonomi dan perencanaan pembangunan wilayah.

Lutfi Muta'ali, adalah staf pengajar Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi UGM, dengan Kelompok Bidang Keahlian Perencanaan Pembangunan Wilayah. Memiliki Background pendidikan bidang Geografi, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Ekonomi Wilayah Perdesaan. Telah menulis puluhan buku untuk topik pengembangan wilayah, tata ruang dan lingkungan. Selain bidang pembangunan wilayah, minat keilmuan lain yang digeluti adalah tata ruang wilayah, perencanaan lingkungan, dan ekonomi regional. Disamping sebagai akademisi, juga terlibat langsung sebagai narasumber dan praktisi perencanaan pengembangan wilayah, tata ruang dan perencanaan lingkungan. Dapat dihubungi via email luthfimutaali@ugm.ac.id.

Andra Juansa, seorang akademisi dan penulis yang memiliki semangat tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan latar belakang di dunia pendidikan dan penelitian, ia aktif dalam menelaah berbagai topik yang relevan dengan perkembangan akademik dan sosial. Karya-karyanya tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga bertujuan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam di kalangan pembaca.

Selain aktif dalam penelitian, Andra Juansa juga terlibat dalam berbagai forum diskusi dan seminar ilmiah. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan harus terus dikembangkan dan dibagikan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

KAMI HADIR DENGAN BERBAGAI PAKET
PENERBITAN YANG SESUAI KEBUTUHAN ANDA
STARDIGITAL PUBLISHING

*"Karya buku adalah investasi masa depan,
menulis cara terbaik untuk mengiklil ilmu"*

KIRIM NASKAH & TERBITKAN BUKU SEKARANG

WhatsApp
0812-6007-4406

Informasi Lebih Lanjut
www.stardigitalpublishing.com

IKAPI
Ikatan Penerbit Indonesia
PT. Star Digital Publishing
No. Anggota IKAPI: 202/DIY/2024



PT. Star Digital Publishing adalah perusahaan bergerak di bidang Penerbitan Buku Berkedudukan di Bantul-Yogyakarta-Indonesia dengan alamat website www.stardigitalpublishing.com merupakan web/situs resmi kami PT. Star Digital Publishing sebagai media untuk menerbitkan buku-buku karya berkualitas dan terbaik, serta penerbit menjamin aktif dan dapat diakses secara berkesinambungan.

Visi kami adalah menjadi jembatan bagi penulis dan pembaca, memberikan platform yang mendukung kreativitas dan inovasi dalam dunia literasi ilmu pengetahuan. Kami berusaha untuk menerbitkan karya-karya yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia maupun di dunia.

Badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum:

NOMOR : AHU-059267.AH.01.30.Tahun 2024

Kegiatan Usaha : 58110 - Penerbitan Buku

PT. Star Digital Publishing Berkedudukan di BANTUL-Yogyakarta-Indonesia

Anggota IKAPI: No. 202/DIY/2024

Email:

ptstardigitalpublishing@gmail.com

Contact :

Admin 1: 0812-6007-4406

Admin 2: 0813-1881-5928

Hormat Kami,

Redaksi: PT. Star Digital Publishing

(Amanah, Melayani Sepenuh Hati)

EKONOMI KERAKYATAN

Membangun Kemandirian Nasional

Buku Ekonomi Kerakyatan : Membangun Kemandirian Nasional membahas Konsep Dasar Ekonomi Kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan menitikberatkan pada kemandirian dan keadilan sosial, pilar-pilar utama yang menopangnya, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor ini. Selain itu, peran UMKM, koperasi, dan model bisnis berbasis gotong royong dibahas sebagai elemen penting dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di era globalisasi dan digitalisasi, ekonomi berbasis sumber daya lokal menjadi kunci dalam membangun kemandirian nasional. Buku ini juga mengupas bagaimana teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui digitalisasi UMKM, e-commerce, dan akses pasar yang lebih luas. Dengan pendekatan komprehensif, buku ini memberikan wawasan bagi akademisi, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip ekonomi kerakyatan. Melalui pemanfaatan potensi lokal dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, ekonomi kerakyatan dapat menjadi solusi dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penulis:

Nurhayati - Dwi Wulan Pujiriyani
Reza Arviciena Sakti - Mohamad Bawazeer
Andi Kurniawan - Bainalhuri Halim - Ayu Minarsi
Endah Kurnia Lestari - Lutfi Muta'ali - Andra Juansa



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA



StarDigital Publishing
www.stardigitalpublishing.com

ISBN 978-623-89803-0-7



9

786238

980307